



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT



**RENCANA AKSI  
PERCEPATAN PENINGKATAN**

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2023 - 2025**





## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENINGKATAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tujuan penyusunan rencana aksi percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025 adalah sebagai Instrumen yang mengintegrasikan program dan kegiatan para pihak dalam peran dan komitmen sebagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat dari kategori sedang ke kategori tinggi;
- b. bahwa untuk percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia diperlukan peran aktif dan dukungan para pihak baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Aksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023-2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 132);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 );

8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 305/RO-KESRA/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2023-2025

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Para pihak adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala lembaga atau Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB II  
RENCANA AKSI  
PERCEPATAN PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 2

Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi serta dapat di integrasikan di tingkat Kabupaten/Kota maupun untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 3

Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 – 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi para pihak dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat. Indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi :

- a. dimensi pengetahuan dengan indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah ;
- b. dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator usia harapan hidup ; dan
- c. dimensi standar hidup layak dengan indikator pengeluaran perkapita di sesuaikan.

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN IPM

BAB III : STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI

BAB IV : PERAN DAN AKSI PERCEPATAN PERCEPATAN IPM

BAB V : MONITORING DAN EVALUASI

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Uraian Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 5

Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi masukan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Para pihak.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 – 2025
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Daerah Percepatan Peningkatan IPM, yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 – 2025 dilakukan oleh Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangannya.
  - b. pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 – 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Sekretaris Tim Koordinasi.
  - c. pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau bila diperlukan.
  - d. evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau bila diperlukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30, Desember 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'HARISSON', is written over the printed name of the Regional Secretary.

HARISSON



## RENCANA AKSI PERCEPATAN PENINGKATAN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan telah diselesaikannya penyusunan Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2023-2025. Selanjutnya, pendekatan partisipatif, inklusif, terintegrasi merupakan prinsip yang digunakan dalam setiap tahapan penyusunan Dokumen Rencana Aksi. Rencana Aksi ini juga dapat diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, dan RKPD serta dapat diselaraskan dengan visi, misi, target, dan indikator pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Saya berharap Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2023-2025 ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena keberhasilan pencapaian setiap target yang telah dibuat memerlukan komitmen bersama dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pada tahap pelaporannya.

Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2023-2025 adalah bentuk komitmen pemerintah baik itu pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Peningkatan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Koordinasi Daerah Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat yang telah bekerja keras di tengah melaksanakan tugas-tugas yang lain. Semoga dokumen ini mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dan dapat memberikan daya ungkit bagi pencapaian target-target pembangunan di daerah.

Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada USAID ERAT yang telah berkontribusi dalam mendukung penyusunan Dokumen Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan USAID ERAT ini merupakan bentuk kolaborasi dan Kerjasama yang baik antara para pihak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 30 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



H. SUTARMIDJI, SH, M.HUM

## **TIM PENYUSUN**

Linda Purnama  
Hendra Bahtiar  
Supriani  
Fitri Darsini  
Nede Priska Bairo  
Verawati  
Fatmawati  
Abdul Harris Jauhari  
Dian Sulianti  
Haendra  
Wike Yolanda  
Novita Salim  
Budi Sanjaya  
Budi Arnando  
Suyanto  
Agus Hasim  
Preatin  
Riki Ahmadi

## **EDITOR**

Ihsan Haerudin  
Eko Cahyono

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.3 Penyusunan Baseline IPM .....	3
1.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia .....	4
1.4.1 Umur Harapan Hidup saat Lahir – UHH (Life Expectancy-e0) .....	4
1.4.2 Rata-rata Lama Sekolah – RLS (Mean Years of Schooling – MYS) .....	4
1.4.3 Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling – EYS) .....	4
1.4.4 Pengeluaran per Kapita disesuaikan .....	4
1.5 Penghitungan IPM.....	4
1.6 Mengukur Kecepatan IPM .....	5
1.6.1 Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat.....	6
1.7 Dasar Hukum .....	9
1.8 Sistematika Penulisan .....	10
2 PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN IPM .....	12
2.1 Profil dan Karakteristik Daerah .....	12
2.2 Program Prioritas Daerah.....	15
2.3 Perkiraan pertumbuhan IPM.....	18
2.4 Kondisi dan Permasalahan IPM .....	22
2.4.1 Kondisi dan Perkembangan Angka IPM .....	22
2.4.2 Permasalahan IPM per Komponen.....	26
3 STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI .....	1
3.1 Strategi.....	1
3.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat .....	1
3.1.2 Dimensi Pengetahuan .....	2
3.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak .....	3
3.2 Program Kerja .....	4

3.2.1	Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat .....	5
3.2.2	Dimensi Pengetahuan .....	9
3.2.3	Dimensi Standar Hidup Layak .....	14
4	PERAN DAN AKSI PERCEPATAN PENINGKATAN IPM .....	21
4.1	Rencana Aksi .....	21
4.1.1	Usulan Aksi Percepatan IPM.....	21
4.2	Pembagian Peran dan Aksi .....	33
5	MONITORING DAN EVALUASI.....	1
6	PENUTUP.....	3

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: IPM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 - 20221 .....	6
Tabel 2:IPM Kalimantan Barat dan Komponen, 2017-2021.....	7
Tabel 3: Perkiraan IPM Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat .....	18
Tabel 4 Perkiraan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat .....	19
Tabel 5 Perkiraan HRS dan RLS di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat .	21
Tabel 6 Perkiraan peningkatan pengeluaran per kapita per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Rp.000 per kapita per tahun) .....	22
Tabel 7 IPM Kalimantan Barat dan Komponen pada 2017-2021 .....	23
Tabel 8: Jumlah SMA dan SMK Berasrama .....	40
Tabel 9: REKAP JUMLAH SISWA SMA, SMK DAN SLB NEGERI PENERIMA PBP JULI - DESEMBER, 2022 .....	41
Tabel 10: Data Guru di Kalimantan Barat.....	43
Tabel 11 Data siswa di Kalimantan Barat.....	43
Tabel 12 Lembaga Sertifikasi Profesi di Kalimantan Barat.....	44
Tabel 13 Persentase Perempuan pernah kawin usia 10 tahun ke atas dan umur perkawinan pertama di Kabupaten / Kota, tahun 2021 .....	44
Tabel 14: Data Sekolah di Kalimantan Barat.....	45
Tabel 15 PDRB Kabupaten / Kota di Kalbar tahun 2017-2021 .....	48
Tabel 16 Persentase Penduduk 15 tahun ke atas bekerja menurut sector di Kabupaten / Kota tahun 2021 .....	49
Tabel 17 Hasil Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2021 .....	52
Tabel 18 Usulan peran percepatan IPM melalui aspek Umur Panjang dan Hidup Sehat .....	33
Tabel 19 Usulan Peran & Aksi percepatan IPM melalui aspek Pengetahuan .....	36
Tabel 20 Usulan Peran percepatan IPM melalui aspek Standar Hidup Layak.....	42

## DAFTAR GRAFIK

Gambar 1: Perkembangan IPM Kalimantan Barat 2017-2021.....	8
Gambar 2: IPM Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten / Kota tahun 2021 .....	9
Gambar 3: Pertumbuhan IPM 2017-2021 Menurut Kabupaten / kota di Kalimantan Barat.....	9
Gambar 4: Peta Provinsi Kalimantan Barat.....	12
Gambar 5: Kabupaten Berbatasan dengan Malaysia .....	12
Gambar 6: Danau Sentarum - Kabupaten Kapuas Hulu.....	14
Gambar 7: Prosentase Penduduk Usia Produktif .....	14
Gambar 8: Perkiraan IPM Kalimantan Barat 2021-2025 .....	18
Gambar 9: Perkiraan Umur Harapan Hidup di Kalimantan Barat.....	19
Gambar 10: Perkiraan HLS dan RLS di Kalimantan Barat .....	20
Gambar 11: Perkiraan Belanja Per kapita per tahun di Kalimantan Barat (Rp. 000) .....	21
Gambar 12: Perkembangan IPM Kalimantan Barat 2017-2021.....	24
Gambar 13: IPM Kalimantan Barat dan Kabupaten / Kota 2021 .....	25
Gambar 14: Pertumbuhan IPM Kalimantan Barat 2017 - 2021 menurut Kabupaten / Kota (%).....	25
Gambar 15: Umur Harapan Hidup Kalimantan Barat, 2017 - 2021.....	26
Gambar 16: UHH per Kabupaten / Kota Kalbar tahun 2021 .....	27
Gambar 17: Kabupaten Terendah Persalinan di Fasyankes .....	28
Gambar 18: Kabupaten tertinggi ditolong tenaga non medis.....	28
Gambar 19: Kabupaten Tertinggi Berat Badan Bayi Lahir Rendah .....	28
Gambar 20: Kabupaten Terendah Stunting.....	29
Gambar 21: Kabupaten Terendah Wasting.....	29
Gambar 22: Kabupaten terendah ASI eksklusif.....	30
Gambar 23: Kabupaten Terendah Baduta diberi ASI .....	30
Gambar 24: Kabupaten Terendah Pemantauan Buhbang Bayi.....	30
Gambar 25: Kabupaten terbesar Ibu hamil anemia .....	31
Gambar 26: Kabupaten Terendah air minum layak .....	32
Gambar 27: Kabupaten Terendah Rumah Tanggat memiliki sumber air bersih layak .....	32
Gambar 28: Kabupaten terendah rumah tangga memiliki jamban layak.....	33
Gambar 29: Kabupaten terendah imunisasi Campak .....	34
Gambar 30: HLS & RLS Kalimantan Barat, 2017-2021 .....	35
Gambar 31: HLS Kabupaten / Kota Kalimantan Barat, 2021 .....	36
Gambar 32: RLS Kabupaten / Kota Kalimantan Barat, 2021 .....	37
Gambar 33: Kabupaten Terendah HLS.....	37
Gambar 34: Kabupaten Rendah RLS .....	38
Gambar 35: APS 16-18 tahun di Kabupaten / Kota Kalimantan Barat .....	38
Gambar 36: APS 7-12 Kabupaten Kota di Kalimantan Barat.....	39
Gambar 37: APS 13-15 Kabupaten Kota di Kalimantan Barat.....	39
Gambar 38: Pengeluaran per kapita disesuaikan Kalbar tahun 2017-2021 (juta rupiah) .....	46

Gambar 39: Pengeluaran per kapita Kabupaten Kota di Kalbar tahun 2021 (000 rupiah) .....	47
Gambar 40: Alur pengendalian inflasi daerah 2020-2024 .....	50
Gambar 41: Alur program memperkuat akses keuangan kepada masyarakat .....	50

## DAFTAR SINGKATAN

<b>APBD</b>	<b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</b>
<b>APS</b>	Angka Partisipasi Sekolah
<b>ASI</b>	Air Susu Ibu
<b>BBLR</b>	Berat Bayi Lahir Rendah
<b>BPS</b>	Biro Pusat Statistik
<b>HLS</b>	Harapan Lama Sekolah
<b>IKLH</b>	Indikator Kualitas Lingkungan hidup
<b>IKS</b>	Indeks Keluarga Sehat
<b>IPM</b>	Indeks Pembangunan Manusia
<b>JKN</b>	Jaminan Kesehatan Nasional
<b>LSP</b>	Lembaga Sertifikasi Profesi
<b>MDG'S</b>	Milenium Development Goals
<b>P2L</b>	Pekarangan Pangan Lestari
<b>P2M</b>	Pekarangan Pangan Mandiri
<b>PBI</b>	Penerima Bantuan Iuran
<b>PDRB</b>	Produk Domestik Reginal Bruto
<b>Perbub/walkot</b>	Peraturan Bupati / Wali Kota
<b>Pergub</b>	Peraturan Gubernur
<b>PT</b>	Pendidikan Tinggi
<b>RLS</b>	Rata-rata Lama Sekolah
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>SD / MI</b>	Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah
<b>SDG'S</b>	Sustainable Development Goals
<b>SKB / PKBM</b>	Sanggar Kegiatan Belajar / Pusat Kegiatan Belajar dan Mengajar
<b>SMA / SMK / MA</b>	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah
<b>SMP / MTs</b>	Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah
<b>STMB</b>	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
<b>TIK</b>	Tempat uji Kompetensi
<b>UHH</b>	Usia Harapan Hidup

<b>UKM</b>	Unit Kesehatan masyarakat
<b>UKP</b>	Upaya Kesehatan perseorangan
<b>UMKM</b>	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
<b>USAID ERAT</b>	United States of America Aid - Program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat
<b>Wasting</b>	Balita kurus

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Aksi merupakan dokumen yang disusun untuk berperan sebagai acuan dan arahan bagi pemerintah (pelaksana) melaksanakan berbagai macam aksi daerah yang diturunkan menjadi program dan kegiatan (Bappenas, 2011). Dokumen ini memiliki peran strategis karena segala mekanisme dan teknik serta literatur kepustakaan dalam pemerintah untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan tersedia dan dijelaskan secara rinci didalamnya sehingga Rencana Aksi menjadi pola pelaksana program dan kegiatan dalam mengimplementasikannya.

Dalam penyusunannya, rencana aksi bersifat partisipatif, serta mengacu pada referensi kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencana aksi disusun secara terarah dan memiliki integrasi yang baik, terukur, terencana, dan tepat sasaran. Keberadaan Rencana Aksi ini nantinya juga akan menjadi panduan bagi perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Mengukur kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat diamati melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari daerah itu sendiri. IPM sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Teguh Dartanto (2020) menyebutkan tantangan-tantangan baru sebagai konsekuensi dari peningkatan IPM Indonesia, antara lain: 1) ketidakmerataan capaian IPM di tiap-tiap provinsi di Indonesia sehingga pada jangka panjang

akan terus meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia, 2) peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia menuntut adanya kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh sehingga kelompok masyarakat usia tua tidak hidup menderita dalam kemiskinan. Perlu adanya penguatan sistem pensiun dan atau perlindungan hari tua sehingga mereka dapat menikmati panjang umur, hidup mulia, dan bahagia, 3) kenaikan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah masih bersifat kuantitas, belum mencerminkan kualitas pendidikan.

Capaian IPM Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada tahun 2021 berada di angka 67.90 yang lebih rendah dari capaian IPM nasional dengan angka 72.29. Walaupun angka IPM Kalbar meningkat 0.24 poin atau tumbuh 0.36 persen dibanding tahun 2020, dan berada pada zona sedang. Namun secara nasional, Kalbar berada diposisi ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia. IPM tiga tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi yang berada di bawah Kalbar terdapat Provinsi Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat dan Papua.

Pada tahun 2021 IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang berada di atas angka rata-rata Provinsi adalah Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya dan Bengkayang. IPM terendah yakni Kabupaten Kayong Utara, Sekadau dan Kapuas Hulu. Untuk itu perlu dilakukan upaya percepatan peningkatan IPM Kalbar sebagai komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun sebagai sebuah rencana aksi. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga terkait dalam mengimplementasikan capaian yang dapat menyumbang peningkatan IPM sesuai dengan isu-isu dan permasalahan Kalimantan Barat.

Selanjutnya dalam rangka akselerasi IPM di Kalbar, Rencana Aksi merupakan komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mendorong pelaksanaan percepatan perbaikan IPM dari yang sebelumnya IPM berada dicapaian sedang menjadi capaian tinggi Selanjutnya penyusunan Rencana Aksi dimaksudkan pula sebagai pedoman dan arahan

bagi seluruh Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga terkait dalam mengimplementasikan capaian yang dapat menyumbang peningkatan IPM sesuai dengan isu-isu dan permasalahan Kalimantan Barat.

## 1.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi akselerasi IPM Kalbar bertujuan, antara lain :

- 1) Sebagai panduan untuk percepatan IPM Kalbar dari sedang ke tinggi
- 2) Sebagai panduan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan terkait percepatan IPM Kalbar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada setiap tahapan pembangunan daerah;
- 3) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Pusat dalam mensinergikan program dan kegiatan Kementerian/LPNK terkait akselerasi peningkatan IPM Kalimantan Barat.
- 4) Panduan bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah yang mengakselerasi peningkatan IPM.
- 5) Sebagai acuan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mensinergikan program dan kegiatan akselerasi IPM Kalbar.

## 1.3 Penyusunan Baseline IPM

Isu pembangunan kembali menghangat di tahun 2015. Pada tahun 2015, *Millenium Development Goals* (MDGs) memasuki batas tahun pencapaian. MDGs merupakan referensi penting pembangunan di Indonesia. Agenda MDGs tidak akan berhenti di tahun 2015, namun dilanjutkan dengan mengembangkan konsep dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 – MDGs. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin (Bappenas).

Indeks Pembangunan Manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama

Sekolah (RLS). Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **1.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

### **1.4.1 Umur Harapan Hidup saat Lahir – UHH (Life Expectancy-e0)**

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil proyeksi SP 2010.

### **1.4.2 Rata-rata Lama Sekolah – RLS (Mean Years of Schooling – MYS)**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

### **1.4.3 Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling – EYS)**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

### **1.4.4 Pengeluaran per Kapita disesuaikan**

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2018 = 100. Penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan metode Rao.

## **1.5 Penghitungan IPM**

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks Umur Harapan Hidup, indeks Pengetahuan, dan indeks Standar Hidup Layak.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{EDU} \times I_{PPP} \times 100}$$

Dimana:

$I_{UHH}$  : Merupakan Indeks Kesehatan (Umur Harapan Hidup)

$I_{EDU}$  : Merupakan Indeks Pendidikan (Pengetahuan)

$I_{PPP}$  : Merupakan Indeks Standar Hidup Layak (Paritas Daya Beli)

Dengan turunan sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{Min}}{UHH_{Max} - UHH_{Min}}$$

$$I_{EDU} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Max} - HLS_{Min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{Min}}{RLS_{Max} - RLS_{Min}}$$

$$I_{PPP} = \frac{LN(PPP) - LN(PPP_{Min})}{LN(PPP_{MAX}) - LN(PPP_{Min})}$$

Keterangan:

$I_{HLS}$ : Indeks Harapan Lama Sekolah

$I_{RLS}$  : Indeks Rata-Rata Lama Sekolah

## 1.6 Mengukur Kecepatan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

$IPM_t$  : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{t-1}$  : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

### 1.6.1 Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat

Di tingkat nasional. Selama 2010-2021, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76%<sup>1</sup>. Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik Umur Harapan Hidup, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak. Berikut angka IPM di masing-masing provinsi di Indonesia:

Tabel 1: IPM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 - 20221

No.	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
		2018	2019	2020	2021
1	Provinsi Aceh	71.19	71.9	71.99	72.18
2	Provinsi Sumatera Utara	71.18	71.74	71.77	72.00
3	Provinsi Sumatera Barat	71.73	72.39	72.38	72.65
4	Provinsi Riau	72.44	73.00	72.71	72.94
5	Provinsi Jambi	70.65	71.26	71.29	71.63
6	Provinsi Sumatera Selatan	69.39	70.02	70.01	70.24
7	Provinsi Bengkulu	70.64	71.21	71.40	71.64
8	Provinsi Lampung	69.02	69.57	69.69	69.9
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70.67	71.3	71.47	71.69
10	Provinsi Kepulauan Riau	74.84	75.48	75.59	75.79
11	Provinsi DKI Jakarta	80.47	80.76	80.77	81.11
12	Provinsi Jawa Barat	71.30	72.03	72.09	72.45
13	Provinsi Jawa Tengah	71.12	71.73	71.87	72.16
14	Provinsi DI Yogyakarta	79.53	79.99	79.97	80.22
15	Provinsi Jawa Timur	70.77	71.50	71.71	72.14
16	Provinsi Banten	71.95	72.44	72.45	72.72
17	Provinsi Bali	74.77	75.38	75.50	75.69
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	67.30	68.14	68.25	68.65
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	64.39	65.23	65.19	65.28
20	Provinsi Kalimantan Barat	66.98	67.65	67.66	67.90
21	Provinsi Kalimantan Tengah	70.42	70.91	71.05	71.25

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html>

No.	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
		2018	2019	2020	2021
22	Provinsi Kalimantan Selatan	70.17	70.72	70.91	71.28
23	Provinsi Kalimantan Timur	75.83	76.61	76.24	76.88
24	Provinsi Kalimantan Utara	70.56	71.15	70.63	71.19
25	Provinsi Sulawesi Utara	72.2	72.99	72.93	73.30
26	Provinsi Sulawesi Tengah	68.88	69.50	69.55	69.79
27	Provinsi Sulawesi Selatan	70.90	71.66	71.93	72.24
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	70.61	71.20	71.45	71.66
29	Provinsi Gorontalo	67.71	68.49	68.68	69.00
30	Provinsi Sulawesi Barat	65.10	65.73	66.11	66.36
31	Provinsi Maluku	68.87	69.45	69.49	69.71
32	Provinsi Maluku Utara	67.76	68.70	68.49	68.76
33	Provinsi Papua Barat	63.74	64.70	65.09	65.26
34	Provinsi Papua	60.06	60.84	60.44	60.62

Sumber: SIMREG, BAPPENAS RI, Tahun 2021.

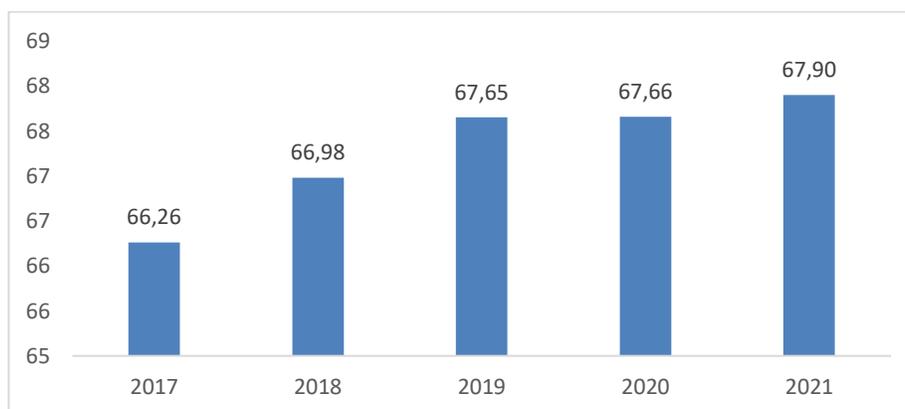
Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 67,90 pada tahun 2021 dan secara nasional berada pada peringkat 30, memiliki peringkat yang sama dari tahun sebelumnya, dengan nilai IPM pada tahun 2020 sebesar 67,66. Dengan capaian IPM tersebut, Provinsi Kalimantan Barat berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “sedang”. Selain itu, terjadi pertumbuhan IPM yang cukup signifikan dibanding dengan tahun 2020 yang sedikit melambat akibat pandemi Covid-19.

Tabel 2: IPM Kalimantan Barat dan Komponen, 2017-2021

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	69,92	70,18	70,56	70,69	70,76
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,5	12,55	12,58	12,60	12,65
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,05	7,12	7,31	7,37	7,45
Pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP)	Ribu Rp	8.472	8.860	9.055	8.930	8.974
<b>IPM</b>	-	<b>66,26</b>	<b>66,98</b>	<b>67,65</b>	<b>67,66</b>	<b>67,90</b>
Pertumbuhan IPM	%	-	1,09	1,00	0,01	0,35

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,61 persen per tahun. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 1: Perkembangan IPM Kalimantan Barat 2017-2021

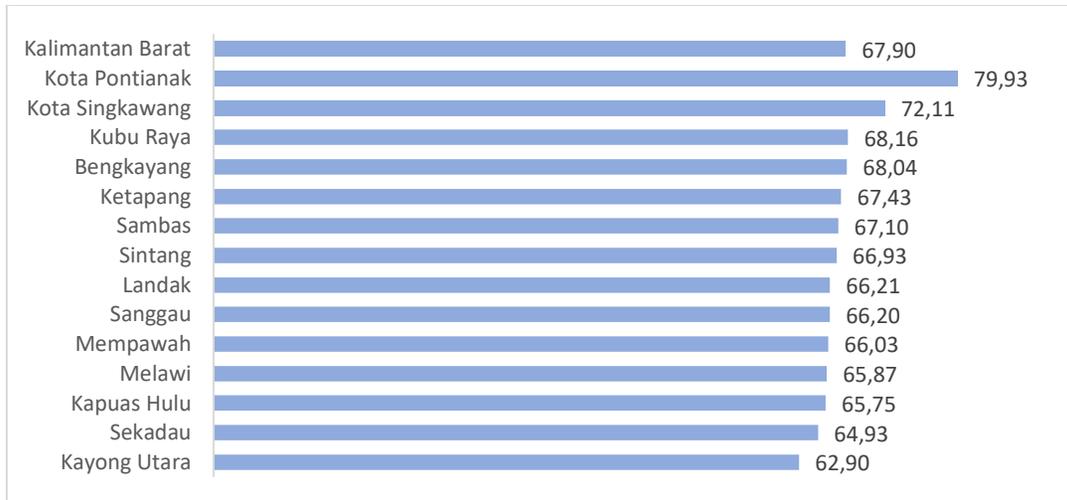
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok.

Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat mencapai 67,90 pada tahun 2021. Dengan capaian IPM tersebut, Kalimantan Barat berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “sedang”.

IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat pada tahun 2021 cukup bervariasi dengan kisaran angka dari 62,90 hingga 79,93. Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten dengan IPM terendah, sedangkan Kota Pontianak adalah yang tertinggi. Ada empat Kabupaten/Kota yang capaian IPM-nya di atas IPM Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kubu Raya. Sedangkan sisanya 8 kabupaten berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Barat.

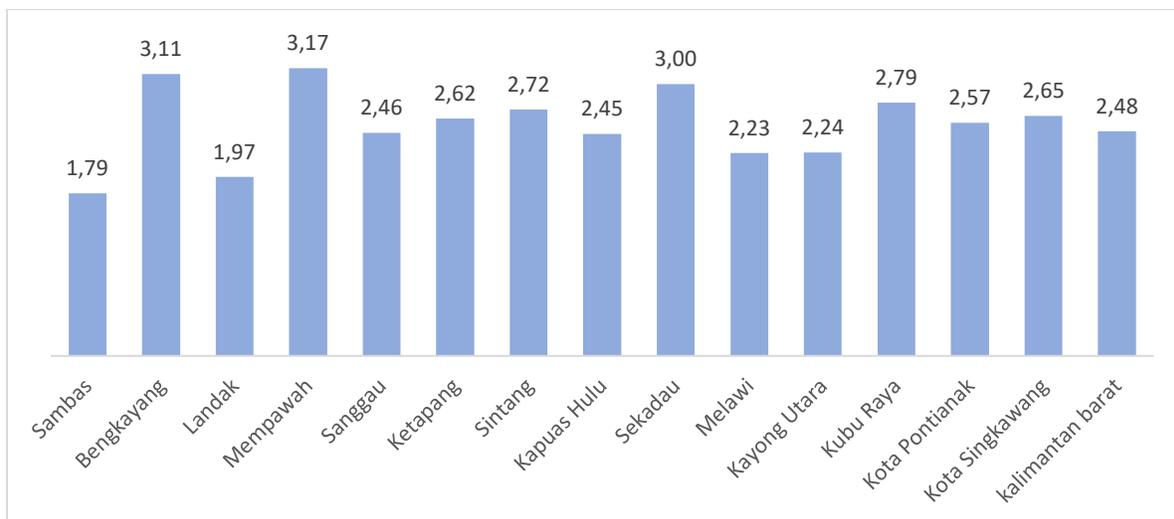
Dari sisi klasifikasinya, IPM yang bernilai 70 ke atas hanya ada 2 (dua) daerah, yakni Kota Pontianak dan Singkawang. Kedua daerah tersebut termasuk sebagai daerah dengan IPM tinggi. Sedangkan sisanya masuk dalam IPM kategori sedang dengan nilai antara 60 sampai dengan 69. IPM Kalimantan Barat masuk dalam kategori sedang yaitu 67,90.



Gambar 2: IPM Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten / Kota tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Dalam kurun waktu lima tahun, beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan. Lima kabupaten dengan pertumbuhan pembangunan manusia tercepat adalah Kabupaten Mempawah (3,17%), Bengkayang (3,11%), Sekadau (3,00%), dan Kubu Raya (2,79%).



Gambar 3: Pertumbuhan IPM 2017-2021 Menurut Kabupaten / kota di Kalimantan Barat

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

## 1.7 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;
- 8) Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Tahapan penulisan dimulai dari menghimpun data dan informasi serta melakukan analisis permasalahan tiap komponen penyusun IPM yang program dan kegiatan pendukungnya berada di perangkat daerah, serta melakukan diseminasi untuk mendapatkan program kegiatan tematik percepatan IPM yang dapat diimplementasikan oleh masing-masing perangkat daerah terkait. Dokumen ini terdiri atas 6 (enam) bagian, sebagai berikut:

- Bab Kesatu tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi tujuan, dasar hukum dan sistematika penulisan
- Bab Kedua tentang Profil Daerah dan Permasalahan, memberikan gambaran ringkas mengenai Profil Daerah dan Karakteristik Daerah, Program Prioritas Daerah dan Kondisi serta Permasalahan IPM

- Bab Ketiga tentang Strategi Implementasi Percepatan IPM menyangkut Strategis, Program dan Kegiatan, Pemetaan Kelembagaan
- Bab Keempat tentang Peran dan Aksi Percepatan Peningkatan IPM menyangkut Penetapan Baseline IPM, Usulan Aksi, serta pembagian peran dan aksi
- Bab Kelima tentang Monitoring dan Evaluasi;
- Bab Keenam tentang Penutup.

Kerangka waktu Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Barat yang difasilitasi oleh USAID ERAT yaitu :

No	Kegiatan	Peran	Bulan:						
			6	7	8	9	10	11	12
I. Tahap persiapan									
II. Tahap pengolahan data									
III. Tahap perumusan dan finalisasi									
IV. Tahap desiminasi									
V. Tahap penetapan									

## 2 PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN IPM

### 2.1 Profil dan Karakteristik Daerah

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km<sup>2</sup> atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km<sup>2</sup>) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km<sup>2</sup>), sedangkan yang keempat adalah Kalimantan Timur. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
- 2) Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa.
- 4) Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur



Gambar 5: Kabupaten Berbatasan dengan Malaysia



Gambar 4: Peta Provinsi Kalimantan Barat

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota yang terbagi dalam 174 Kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.046 Desa. Dari dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara. Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni

Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sambas, Mempawah, Bengkayang, Kubu Raya, Ketapang, dan Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Landak, dan Ketapang. Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Daratan Kalimantan Barat secara umum merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna atau Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan diapit oleh Pegunungan Kalingkang-Kapuas Hulu di bagian Utara, dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan tidak aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah Gunung Baturaya di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah Gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.

Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah provinsi yang dijuluki dengan "Seribu Sungai". Julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalur utama sarana



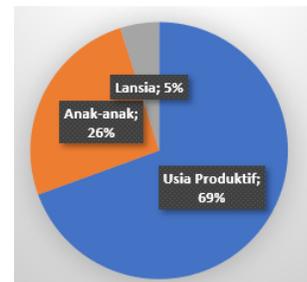
Gambar 6: Danau Sentarum - Kabupaten Kapuas Hulu

transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah

yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau, dan Kota Pontianak). Selanjutnya, Kalimantan Barat memiliki Danau Sentarum dengan luas 117.500 hektar dan Danau Luar dengan luas 5.400 hektar. Kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan luas wilayah 147.307 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2019 adalah 37.58 jiwa perkilometer persegi. Dilihat dari sebaran penduduk, Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni sebesar 6.205,33 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2019. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni sebesar 8.27 jiwa per kilometer persegi.

Menurut kelompok umur, sebesar 69,43 persen atau sebanyak 3.776.988 jiwa merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tingginya penduduk usia produktif memberikan keuntungan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Sementara itu untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2019 yakni sebesar 25,69 persen atau sebanyak 1.397.449 jiwa, sedangkan untuk penduduk usia lanjut usia (kelompok 65 tahun ke atas) sebesar 4,98



Gambar 7: Prosentase Penduduk Usia Produktif

persen atau sebanyak 265.593 jiwa. Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kalimantan Barat, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5,440,030. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam (59,91 persen), penganut agama Katholik (22.17 persen). Sedangkan penganut Kristen (11.49 persen), penganut Khonghucu (0,24 persen), Hindu (0,06 persen), dan Budha (6.69 persen).

## 2.2 Program Prioritas Daerah

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 bahwa terdapat tiga prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan yakni: **meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat**, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung perekonomian, dan penyederhanaan birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Akselerasi Peningkatan IPM Kalimantan Barat berada dalam Prioritas 1 pembangunan daerah: Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat, dan Prioritas Pembangunan Kalimantan Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Prioritas 1:** Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif dan berdaya saing dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta pengelolaan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta pemanfaatan hutan secara lestari. Kesejahteraan masyarakat juga ditunjang dari peningkatan kualitas dan daya saing SDM dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan berdaya saing, peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan pemuda.

**Prioritas 2:** Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung Perekonomian. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan bijaksana guna mendukung aktivitas perekonomian serta pengurangan ketimpangan melalui pengembangan wilayah. Hal tersebut akan diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengembangan konektivitas multimoda, pemanfaatan energi alternatif, pengembangan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah-wilayah yang belum berkembang dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

**Prioritas 3:** Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik. Meningkatnya kemampuan aparaturnya pemerintah memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan aparaturnya pemerintah yang handal dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sederhana, melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, penyederhaan prosedur pelayanan, peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta pelaksanaan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

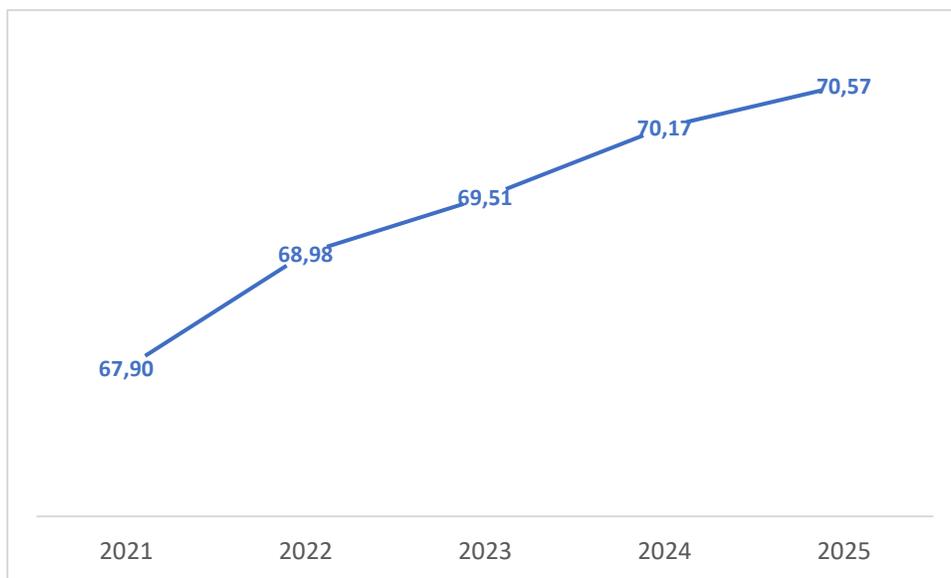
Selanjutnya arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran tiga prioritas pembangunan akan diwujudkan ke dalam implementasi, yaitu:

- 1) **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.** Mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur di daerah termasuk daerah perbatasan yang ditandai dengan indikator Indeks Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat.

- 2) **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.** Meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selain itu juga untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan yang akan diwujudkan melalui pemekaran daerah, sehingga pelayanan pembangunan daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang ditandai dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang ditandai dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana indeks tersebut tersusun dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan dan pembangunan kesejahteraan.
- 4) **Mewujudkan masyarakat sejahtera.** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata yang ditandai dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Jumlah Desa Mandiri.

- 5) **Mewujudkan masyarakat yang tertib.** Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.** Pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan yang ditandai dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

### 2.3 Perkiraan pertumbuhan IPM



Gambar 8: Perkiraan IPM Kalimantan Barat 2021-2025

Perkiraan IPM Provinsi Kalimantan Barat sampai 2025 mencapai 70,57. Perkiraan ini dilakukan menggunakan baseline data 2021 seperti yang disajikan pada gambar 8. Perhitungan ini menggunakan pertumbuhan 0,4.

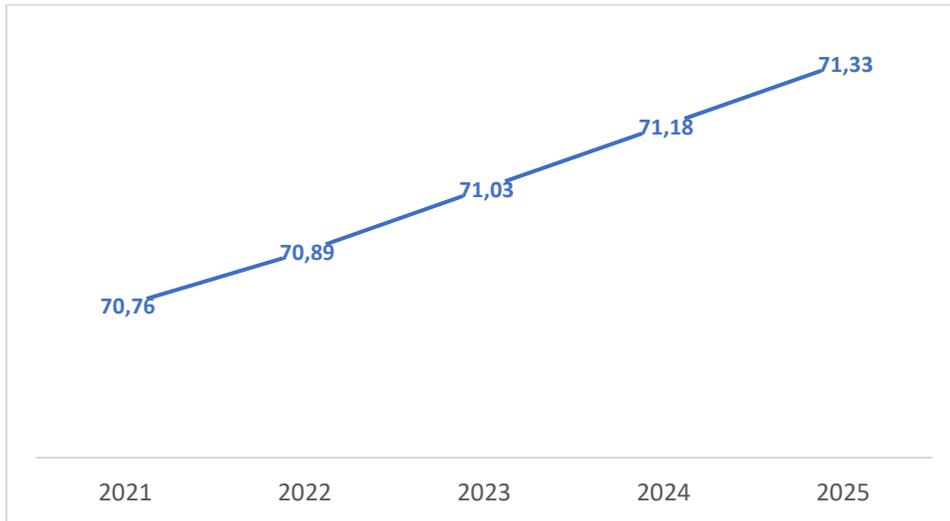
Tabel 3: Perkiraan IPM Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat

Provinsi/Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	67,10	68,28	69,43	70,30	70,75
Bengkayang	68,04	68,50	69,32	69,91	70,29
Landak	66,21	66,93	67,76	68,27	68,65
Mempawah	66,03	66,71	67,72	68,40	68,82

Provinsi/Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Sanggau	66,20	66,78	67,55	68,21	68,60
Ketapang	67,43	68,47	69,23	70,02	70,40
Sintang	66,93	67,92	68,96	69,71	70,16
Kapuas Hulu	65,75	66,50	67,39	68,03	68,34
Sekadau	64,93	65,50	66,28	66,88	67,25
Melawi	65,87	66,57	67,26	67,87	68,15
Kayong Utara	62,90	63,93	64,92	65,74	66,17
Kubu Raya	68,16	68,76	69,76	70,41	70,84
Kota Pontianak	79,93	80,47	81,01	81,60	81,91
Kota Singkawang	72,11	72,83	73,28	73,78	74,10
Kalimantan Barat	67,90	68,98	69,51	70,17	70,57

Pertumbuhan IPM di Kabupaten/Kota diperkirakan meningkat sampai 2025. Kota Pontianak tetap memiliki IPM tertinggi diikuti Kota Singkawang.

### A. Dimensi Kesehatan



Gambar 9: Perkiraan Umur Harapan Hidup di Kalimantan Barat

Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan meningkat menjadi 71,33 tahun pada 2025. Perkiraan ini dapat dilihat pada Gambar 9

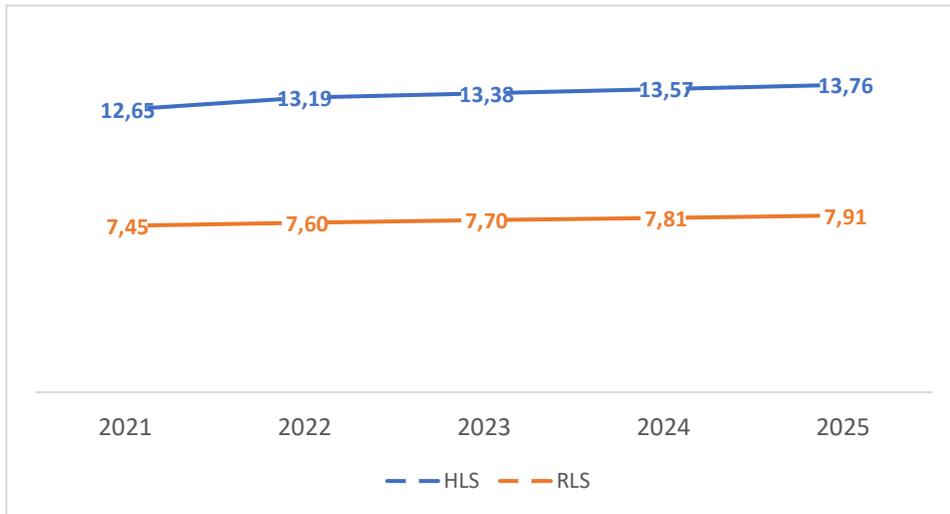
Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bengkayang memiliki perkiraan UHH tertinggi pada 2025 (74,14 tahun), sementara UHH terendah adalah Kabupaten Kayong Utara (68,85 tahun) seperti yang disajikan pada Tabel 4

Tabel 4 Perkiraan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	69,08	69,15	69,31	69,47	69,63

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Bengkayang	73,84	73,89	74,01	74,04	74,14
Landak	73,04	73,08	73,13	73,17	73,27
Mempawah	71,18	71,14	71,25	71,27	71,36
Sanggau	71,42	71,55	71,68	71,81	71,94
Ketapang	71,11	71,14	71,23	71,22	71,29
Sintang	71,84	71,85	71,96	71,98	72,07
Kapuas Hulu	72,53	72,57	72,66	72,65	72,72
Sekadau	72,05	72,09	72,17	72,23	72,36
Melawi	72,98	73,01	73,10	73,09	73,16
Kayong Utara	68,48	68,50	68,57	68,71	68,85
Kubu Raya	70,69	70,74	70,83	70,87	70,98
Kota Pontianak	73,12	73,13	73,23	73,27	73,38
Kota Singkawang	72,18	72,24	72,36	72,43	72,56
Provinsi Kalimantan Barat	70,76	70,89	71,03	71,18	71,33

## B. Dimensi Pengetahuan



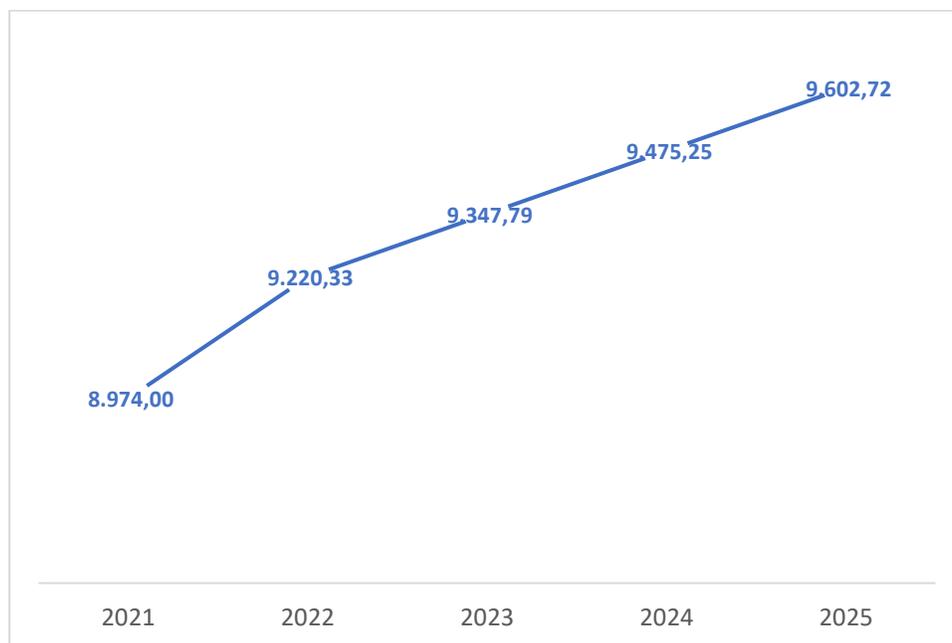
Gambar 10: Perkiraan HLS dan RLS di Kalimantan Barat

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan meningkat menjadi 13,76 pada 2025, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada 2025 meningkat menjadi 7,91 seperti yang disajikan pada Gambar 10 Tabel 15 menunjukkan HLS dan RLS pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak memiliki angka HLS dan RLS tertinggi, sementara terendah RLS adalah Kabupaten Kayong Utara.

Tabel 5 Perkiraan HRS dan RLS di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
	HLS	RLS								
Sambas	12,63	6,72	13,12	7,21	13,33	7,38	13,53	7,55	13,74	7,72
Bengkayang	12,10	6,80	12,44	6,85	12,59	6,87	12,74	6,96	12,89	7,06
Landak	12,43	7,12	12,84	7,33	12,98	7,39	13,11	7,46	3,25	7,52
Mempawah	12,65	7,04	13,14	7,20	13,36	7,32	13,58	7,44	13,80	7,56
Sanggau	11,59	7,39	12,05	7,41	12,23	7,52	12,41	7,63	12,59	7,73
Ketapang	11,81	7,46	12,44	7,73	12,66	7,91	12,88	8,08	13,10	8,26
Sintang	12,04	7,08	12,61	7,37	12,86	7,50	13,11	7,64	13,36	7,77
Kapuas Hulu	12,08	7,53	12,43	7,84	12,54	7,99	12,65	8,14	12,77	8,28
Sekadau	11,89	6,85	12,19	7,03	12,35	7,13	12,51	7,23	12,67	7,32
Melawi	11,17	6,91	11,49	7,15	11,61	7,29	11,72	7,43	11,83	7,57
Kayong Utara	11,84	6,02	12,28	6,44	12,43	6,59	12,58	6,75	12,73	6,90
Kubu Raya	13,87	7,00	14,26	7,15	14,48	7,26	14,71	7,37	14,94	7,48
Kota Pontianak	15,01	10,43	15,42	10,55	15,59	10,69	15,77	10,83	15,94	10,97
Kota Singkawang	12,91	7,90	13,54	7,92	13,71	8,00	13,88	8,08	14,06	8,17
Provinsi Kalimantan Barat	12,65	7,45	13,19	7,60	13,38	7,70	13,57	7,81	13,76	7,91

### C. Dimensi Standar Hidup Layak



Gambar 11: Perkiraan Belanja Per kapita per tahun di Kalimantan Barat (Rp. 000)

Pengeluaran per kapita di Provinsi Kalimantan Barat (Rp.000 per kapita per tahun) diperkirakan meningkat sampai Rp.9.602,72 pada 2025 seperti yang ditampilkan pada Gambar 11 Kota Pontianak diperkirakan memiliki pengeluaran per kapita tertinggi pada 2025, sementara Kabupaten Kapuas Hulu memiliki angka terendah Rp.7.756,67 seperti yang tampak pada Tabel 6.

Tabel 6 Perkiraan peningkatan pengeluaran per kapita per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Rp.000 per kapita per tahun)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Sambas	9.828,00	10.312,09	10.484,44	10.656,80	10.829,15
Bengkayang	9.193,00	9.555,44	9.720,13	9.884,82	10.049,51
Landak	7.431,00	7.687,65	7.837,14	7.986,64	8.136,14
Mempawah	7.758,00	8.066,43	8.187,70	8.308,97	8.430,24
Sanggau	8.328,00	8.515,80	8.635,97	8.756,14	8.876,31
Ketapang	9.209,00	9.332,04	9.453,14	9.574,25	9.695,36
Sintang	8.708,00	9.058,32	9.189,55	9.320,78	9.452,01
Kapuas Hulu	7.168,00	7.416,21	7.529,70	7.643,19	7.756,67
Sekadau	7.462,00	7.670,22	7.783,50	7.896,78	8.010,06
Melawi	8.415,00	8.583,42	8.690,91	8.798,40	8.905,90
Kayong Utara	7.920,00	8.218,97	8.393,75	8.568,54	8.743,32
Kubu Raya	8.630,00	9.002,20	9.135,89	9.269,58	9.403,27
Kota Pontianak	14.610,00	14.730,48	14.858,57	14.986,65	15.114,74
Kota Singkawang	11.767,00	11.803,54	11.897,94	11.992,33	12.086,73
Provinsi Kalimantan Barat	8.974,00	9.220,33	9.347,79	9.745,25	9.602,72

## 2.4 Kondisi dan Permasalahan IPM

### 2.4.1 Kondisi dan Perkembangan Angka IPM

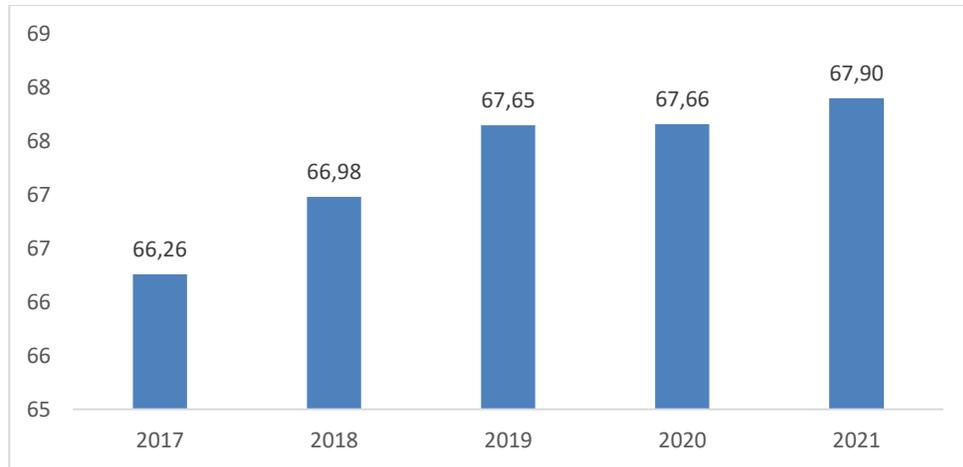
IPM Kalimantan Barat sebesar 67,90 pada tahun 2021 dan secara nasional berada pada peringkat 30, memiliki peringkat sama dengan tahun sebelumnya, dengan nilai IPM pada tahun 2020 sebesar 67,66 berada pada kategori sedang.

Tabel 7 IPM Kalimantan Barat dan Komponen pada 2017-2021

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	69,92	70,18	70,56	70,69	70,76
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,5	12,55	12,58	12,60	12,65
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,05	7,12	7,31	7,37	7,45
Pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP)	Ribu Rp	8.472	8.860	9.055	8.930	8.974
<b>IPM</b>	-	<b>66,26</b>	<b>66,98</b>	<b>67,65</b>	<b>67,66</b>	<b>67,90</b>
Pertumbuhan IPM	%	-	1,09	1,00	0,01	0,35

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat,2022

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM di Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021 mengalami **pertumbuhan rata-rata 0,35 persen per tahun**. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kalimantan Barat.

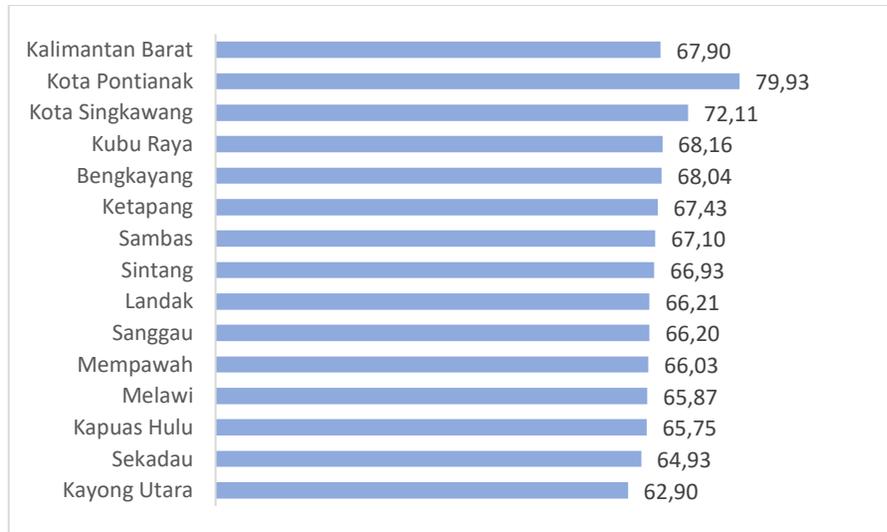


Gambar 12: Perkembangan IPM Kalimantan Barat 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat pada tahun 2021 cukup bervariasi dengan kisaran angka dari 62,90 hingga 79,93. Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten dengan IPM terendah, sedangkan Kota Pontianak adalah yang tertinggi. Terdapat empat kabupaten dan kota yang capaian IPM-nya di atas IPM Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kubu Raya, sedangkan 8 kabupaten sisanya berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Barat.

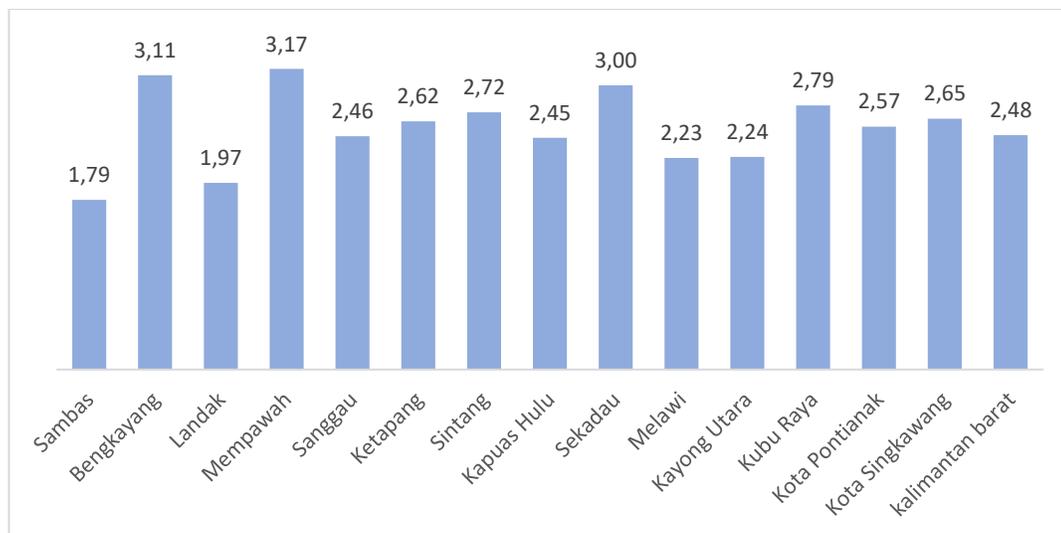
Menurut klasifikasinya, IPM yang bernilai 70 ke atas hanya ada di dua daerah, yakni Kota Pontianak dan Singkawang. Kedua daerah tersebut termasuk sebagai daerah dengan IPM tinggi. Sedangkan sisanya masuk dalam IPM kategori sedang dengan nilai antara 60 sampai dengan 69.



Gambar 13: IPM Kalimantan Barat dan Kabupaten / Kota 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Dalam kurun waktu lima tahun, beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan yakni Kabupaten Mempawah (3,17%), Bengkayang (3,11%), Sekadau (3,00%), dan Kubu Raya (2,79%).



Gambar 14: Pertumbuhan IPM Kalimantan Barat 2017 - 2021 menurut Kabupaten / Kota (%)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

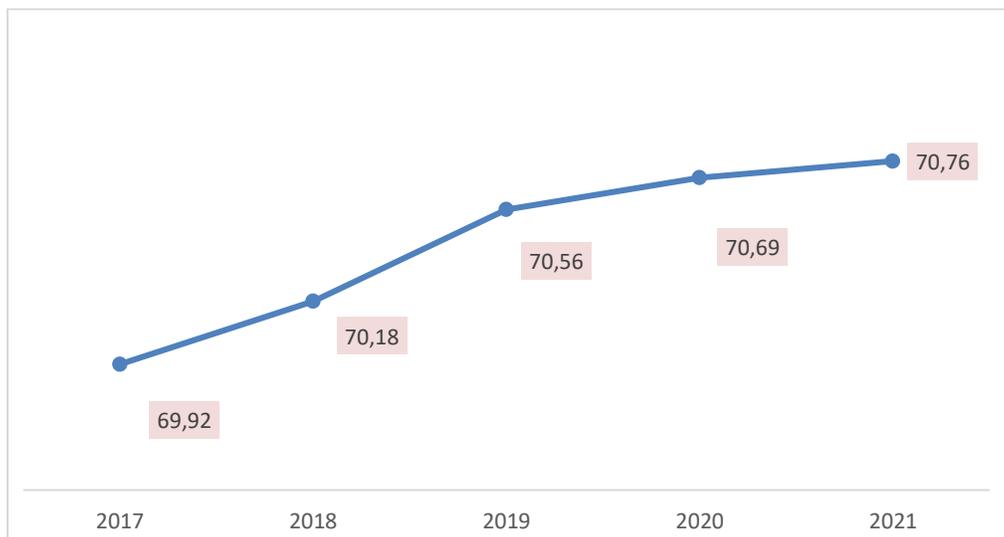
Selain itu, IPM Kalimantan Barat dapat dilihat berdasarkan dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Pengetahuan dan Standar Hidup Layak yang akan menunjukkan secara

lebih rinci letak tantangan dan permasalahan dalam upaya mengakselerasi peningkatan IPM Kalimantan Barat.

## 2.4.2 Permasalahan IPM per Komponen

### 2.4.2.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh umur harapan hidup (UHH) saat lahir. UHH saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, dan kualitas kesehatan.

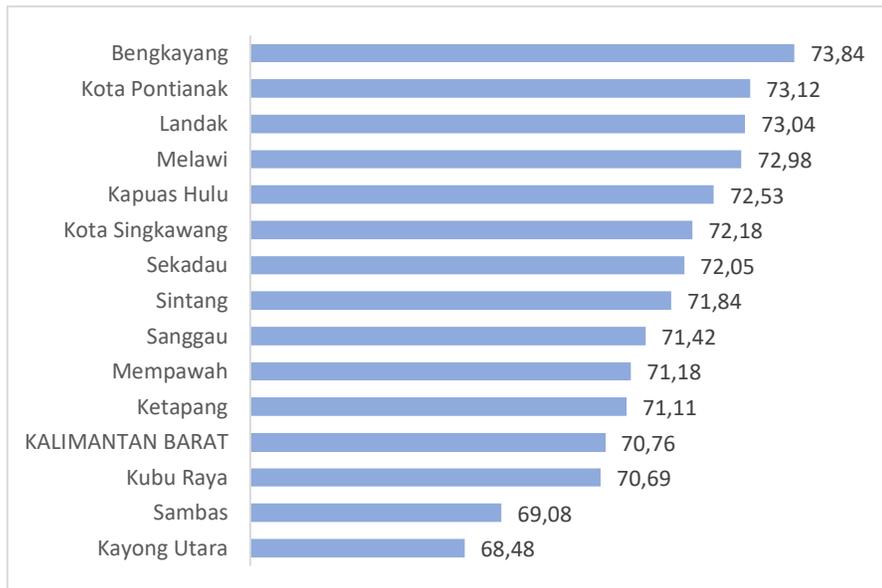


Gambar 15: Umur Harapan Hidup Kalimantan Barat, 2017 - 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Selama kurun waktu 2017 hingga 2021, umur harapan hidup Kalimantan Barat terus meningkat artinya harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2021, umur harapan hidup saat lahir di Kalimantan Barat telah mencapai 70,76 tahun. Pada kabupaten/kota, umur harapan hidup saat lahir tahun 2021 berkisar antara 68,48 hingga 73,84 tahun. Umur harapan hidup tertinggi berada di Kabupaten Bengkayang.

Gambar 16: UHH per Kabupaten / Kota Kalbar tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

UHH terendah berada di Kabupaten Kayong Utara, dan umur harapan hidup paling cepat tumbuh di Kabupaten Kayong Utara (tumbuh 0,29 persen dibandingkan tahun 2020). Jadi, meskipun Kabupaten Kayong Utara menjadi daerah dengan UHH terendah, tetapi perkembangannya cukup cepat. Umur harapan hidup tertinggi berada di Kabupaten Bengkayang.

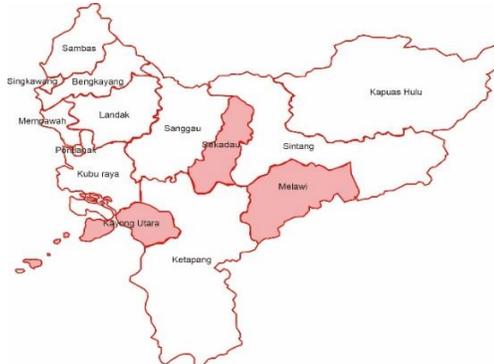
Menurut data Susenas 2021 menunjukkan ibu yang melahirkan di pelayanan kesehatan sebesar 77,56%, tiga kabupaten yang prosentase terendah melahirkan di pelayanan kesehatan adalah Sekadau 38,75%, Kayong Utara 51,10% dan Melawi 60,81%. Persalinan ditolong tenaga non kesehatan juga masih tinggi di Kalimantan Barat yaitu sebesar 9,16% (Susenas 2021) tertinggi di Kabupaten Sekadau (27,76%), Kayong Utara (23,56%) dan Ketapang (15,15%). Berat Bayi Lahir Rendah menjadi masalah jika berat bayi <2500 Gr, di Kalimantan Barat angka BBLR sebesar 13,73% (Susenas 2021) tertinggi di Kabupaten Kayong Utara (23,82%), Ketapang (22,49%) dan Sintang (19,78%)

Peningkatan IPM dengan beberapa variabel yang mempengaruhi UHH saat lahir di antaranya :

**A. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan Berat Bayi Lahir Rendah**

1) Masalah

a. Menurut data Susenas 2021 menunjukkan ibu yang melahirkan di pelayanan kesehatan sebesar 77,56%, tiga kabupaten yang prosentase terendah melahirkan di pelayanan kesehatan adalah Sekadau 38,75%, kayong Utara 51,10% dan Melawi 60,81%.



Gambar 17: Kabupaten Terendah Persalinan di Fasyankes

b.

c. Persalinan ditolong tenaga non kesehatan juga masih tinggi di Kalimantan Barat yaitu sebesar 9,16% (Susenas 2021) tertinggi di Kabupaten Sekadau (27,76%), Kayong Utara (23,56%) dan Ketapang (15,15%)



Gambar 18: Kabupaten tertinggi ditolong tenaga non medis

d. Berat Bayi Lahir Rendah menjadi masalah jika berat bayi <2500 Gr, di Kalimantan Barat angka BBLR sebesar 13,73% (Susenas 2021) tertinggi di Kabupaten Kayong Utara (23,82%), Ketapang (22,49%) dan Sintang (19,78%)



Gambar 19: Kabupaten Tertinggi Berat Badan Bayi Lahir Rendah

## 2) Penyebab Masalah

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga non kesehatan atau di luar sarana kesehatan, antara lain:

- Akses ke tenaga kesehatan/ pelayanan kesehatan
- Rendahnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga
- Dukungan keluarga dalam mendapatkan pertolongan persalinan di sarana kesehatan
- Konsumsi gizi ibu hamil yang tidak sesuai kebutuhan

## B. Status Gizi Bayi dan Balita

### 1) Masalah



Gambar 20: Kabupaten Terendah Stunting

#### a. *Stunting*

Angka Stunting di Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar 29,8% (SSGI 2021), tertinggi di Kubu Raya (40,3%), Sintang (38,2%) dan Melawi (37,2%).



Gambar 21: Kabupaten Terendah Wasting

#### b. *Wasting* (Balita Kurus)

Angka wasting di Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar 10% (SSGI 2021), tertinggi di Sintang (13,8%), Melawi (10,8%) dan Ketapang (10,3%).

Angka Under Weight di Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar 24% (SSGI 2021), tertinggi di Melawi (28,7%) Sambas (28,2%), dan Kubu Raya (27,5%)

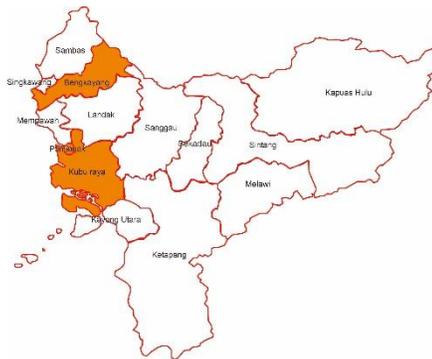
#### d. ASI



Air Susu Ibu optimal disebut ASI Eksklusif atau hanya ASI saja diberikan sampai anak berumur 6 bulan. Dari data menunjukkan bayi yang diberikan ASI eksklusif sebesar 73,11% (data IKS 2022) terendah di Bengkayang (61,07%), Ketapang (61,92) dan Singkawang (62,13%).

Gambar 22: Kabupaten terendah ASI eksklusif

#### e. Baduta diberikan ASI



Air Susu Ibu merupakan makanan bayi yang paling baik, dan sebaiknya diberikan sampai anak berusia 2 tahun. Dari data Susenas 2021 menunjukkan baduta yang diberikan ASI di Kalimantan Barat sebesar 82,57% terendah di Pontianak (66,95%) Kubu Raya (75,89%) dan Bengkayang (76,147%).

Gambar 23: Kabupaten Terendah Baduta diberi ASI

#### f. Pemantauan tumbuh kembang Balita



Dari data capaian program tahun 2021 menunjukkan hanya 48,2%. Balita yang dipantau tumbuh kembangnya, terendah di Kota Singkawang (16%), Kabupaten Melawi (30,9%) dan Kayong Utara (31%).

Gambar 24: Kabupaten Terendah Pemantauan Buhbang Bayi

g. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) yang rendah

Dari data capaian program tahun 2021 menunjukkan hanya 48,2%. Balita yang dipantau tumbuh kembangnya, terendah di Kota Singkawang (16%), Yang termasuk dalam lima pilar STBM seperti penyediaan air minum, jamban, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah rumah tangga, dan kebiasaan cuci tangan pakai sabun.

2) Penyebab Masalah :

Status gizi merupakan output dari beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

- a. Perilaku Konsumsi masyarakat
- b. Sosial ekonomi masyarakat (kemampuan / daya beli)
- c. Perilaku sanitasi masyarakat yang masih rendah.
- d. Pengetahuan ibu / ibu hamil.

**C. Kesehatan Masa Kehamilan, dan Kelahiran**

1) Masalah

- a) Rendahnya pemeriksaan kehamilan yang optimal, yaitu minimal 6 kali selama kehamilan.

Berdasarkan data program tahun 2021 menunjukkan ibu hamil yang memeriksakan kehamilan sebesar 40,51%.

- b) Kurang gizi pada ibu hamil

Data capaian program gizi 2021 menunjukkan prosentase anemi pada ibu hamil sebesar 15%, dengan 3 kabupaten terbesar yaitu Kapuas Hulu (56%), Bengkayang (32,9%) dan Kayong Utara (21,6%).



Kurang Energi Kronik tahun 2021 sebesar 9,2%, dengan 3 kabupaten terbesar yaitu Kapuas Hulu (24,4%), Melawi (14%) dan Ketapang (11,3%).

Gambar 25: Kabupaten terbesar Ibu hamil anemia

## 2) Penyebab Masalah :

- a) Akses pelayanan kesehatan.
- b) Pengetahuan dan kemauan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan yang optimal.
- c) Rendahnya perilaku konsumsi gizi ibu hamil dan pil tambah darah.
- d) Sosial ekonomi masyarakat khususnya ibu hamil.
- e) Terlambat mengambil keputusan, terlambat mendatangi fasyankes dan terlambat penanganan saat proses persalinan (3 Terlambat).
- f) Kehamilan terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, dan terlalu banyak.

## D. Kesehatan Lingkungan

### 1) Masalah

#### a) Air minum yang layak



Gambar 26: Kabupaten Terendah air minum layak

Berdasarkan data Susenas (BPS, 2021), di Provinsi Kalimantan Barat rumah tangga menggunakan air minum yang layak sebesar 78,76%, terendah di Kabupaten Sekadau (48,85%), Sintang (52,13%) dan Sanggau (57,25%).

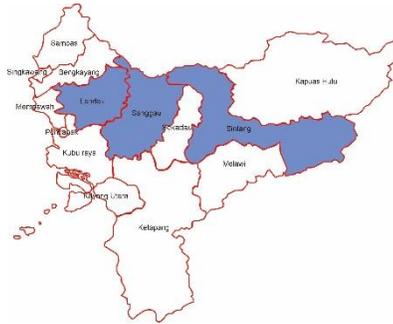
#### b) Sumber Air Bersih



Gambar 27: Kabupaten Terendah Rumah Tangga memiliki sumber air bersih layak

Berdasarkan data Susenas (BPS, 2021), di Provinsi Kalimantan Barat rumah tangga yang memiliki sumber air bersih yang layak sebesar 39,56%, terendah di Kabupaten Sambas (9,1%), Kubu Raya (12,05%) dan Mempawah (29,72%).

### c) Sarana Sanitasi yang layak



Gambar 28: Kabupaten terendah rumah tangga memiliki jamban layak

Berdasarkan data Susenas (BPS, 2021), di Provinsi Kalimantan Barat rata rata rumah tangga yang memiliki Sarana Sanitasi/ Jamban yang layak sebesar 78,39%, terendah di Kabupaten Landak (62.85%), Sintang (65,33%) dan Sanggau (70,34%).

### 2) Penyebab Masalah :

- a. Akses sumber air terbatas;
- b. Pengetahuan dan kemauan masyarakat dalam menyediakan dan memanfaatkan sumber air dan sarana sanitasi layak;
- c. Ketidakmampuan sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi layak;

## E. Jaminan Kesehatan Nasional

### 1) Masalah

- a. Berdasarkan data Susenas tahun 2021, di Provinsi Kalimantan Barat yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 36,12%, tertinggi di Kabupaten Sanggau (55,7%), Melawi (53,76%) dan Sekadau (53,41%).
- b. Pemilihan Desa lokasi KKN tematik bisa ditentukan berdasarkan Data Indeks Keluarga Sehat yang dapat diminta pada Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.

### 2) Penyebab Masalah :

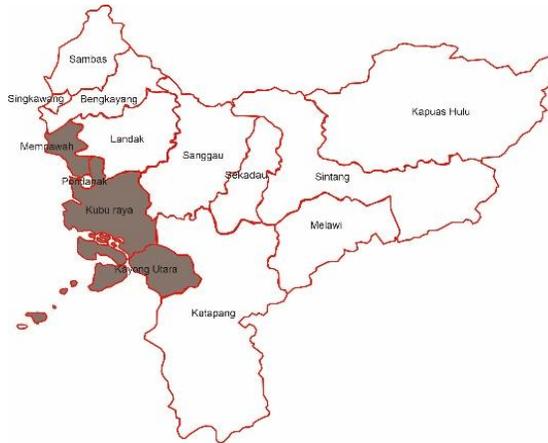
Masalah yang ada dipengaruhi antara lain :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengikuti kepesertaan JKN, dan kemauan masyarakat dalam berpartisipasi;

- b. Ketidakmampuan sosial ekonomi masyarakat dalam mengikuti kepesertaan JKN.

## F. Imunisasi

### 1) Masalah



Gambar 29: Kabupaten terendah imunisasi Campak

Untuk capaian imunisasi pada Balita yang menjadi indikator utama adalah imunisasi campak. Karena imunisasi campak merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi. Capaian Provinsi berdasarkan data Susenas tahun 2021 adalah 52,04% terendah di Kabupaten

Kubu Raya (35,99%), Kayong Utara (37,9%) dan Mempawah (39,89%).

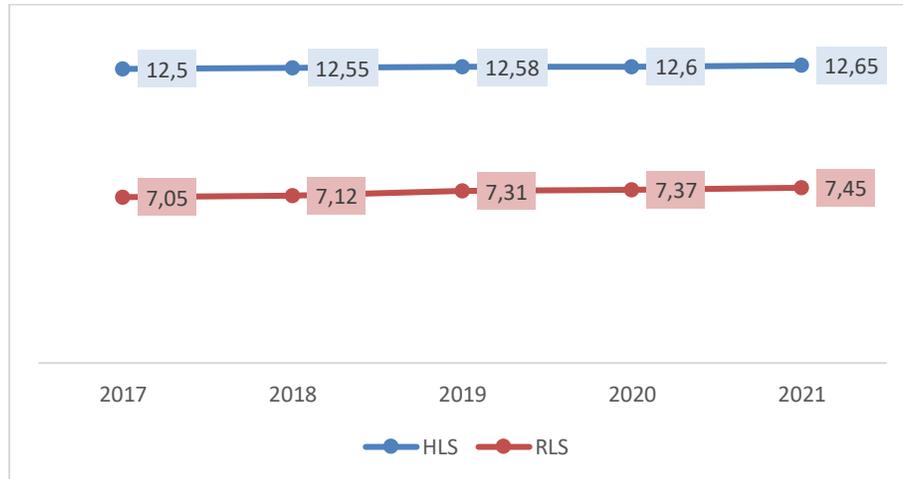
### 2) Penyebab Masalah :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang vaksinasi, dan kemauan untuk berpartisipasi;
- b. Adanya penolakan di masyarakat;
- c. Adanya ketakutan di masyarakat karena adanya Kejadian Pasca Imunisasi (KIPI).

#### 2.4.2.2 Dimensi Pengetahuan

Penghitungan IPM terkait dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Selama tahun 2017-2021, pertumbuhan harapan lama sekolah di Kalimantan Barat sebesar 0,29 persen.

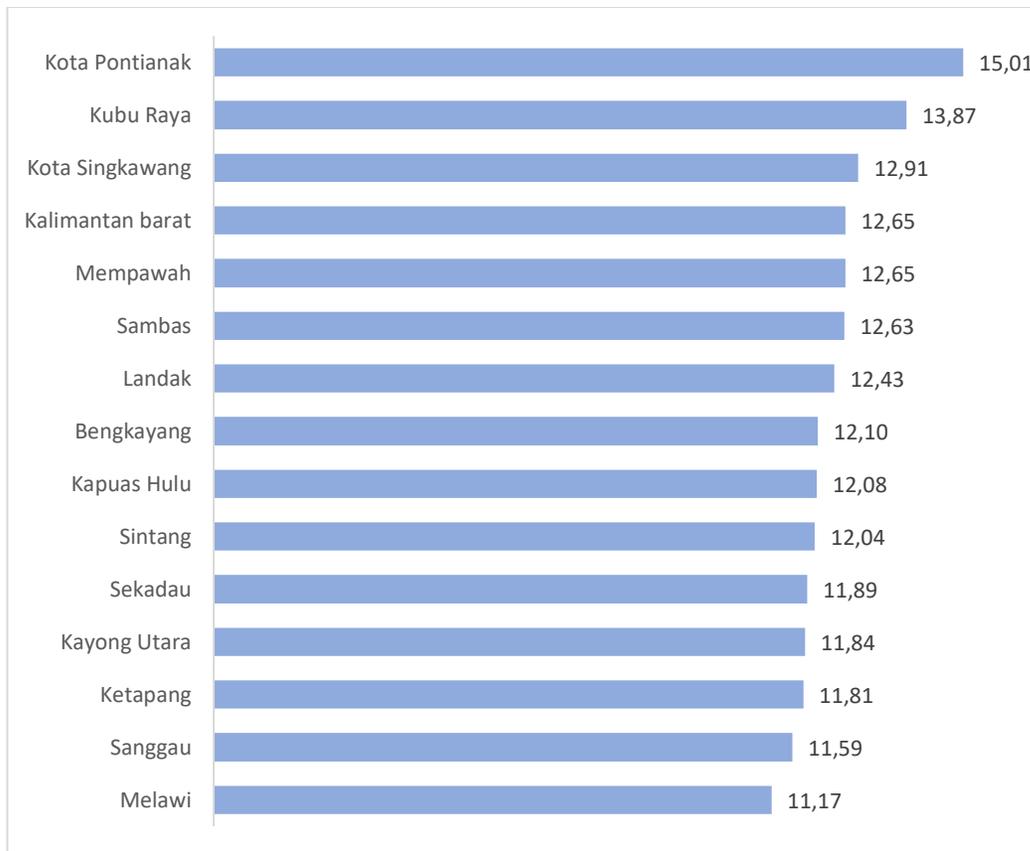
Sedangkan pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat sebesar 1,39 persen.



Gambar 30: HLS & RLS Kalimantan Barat, 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

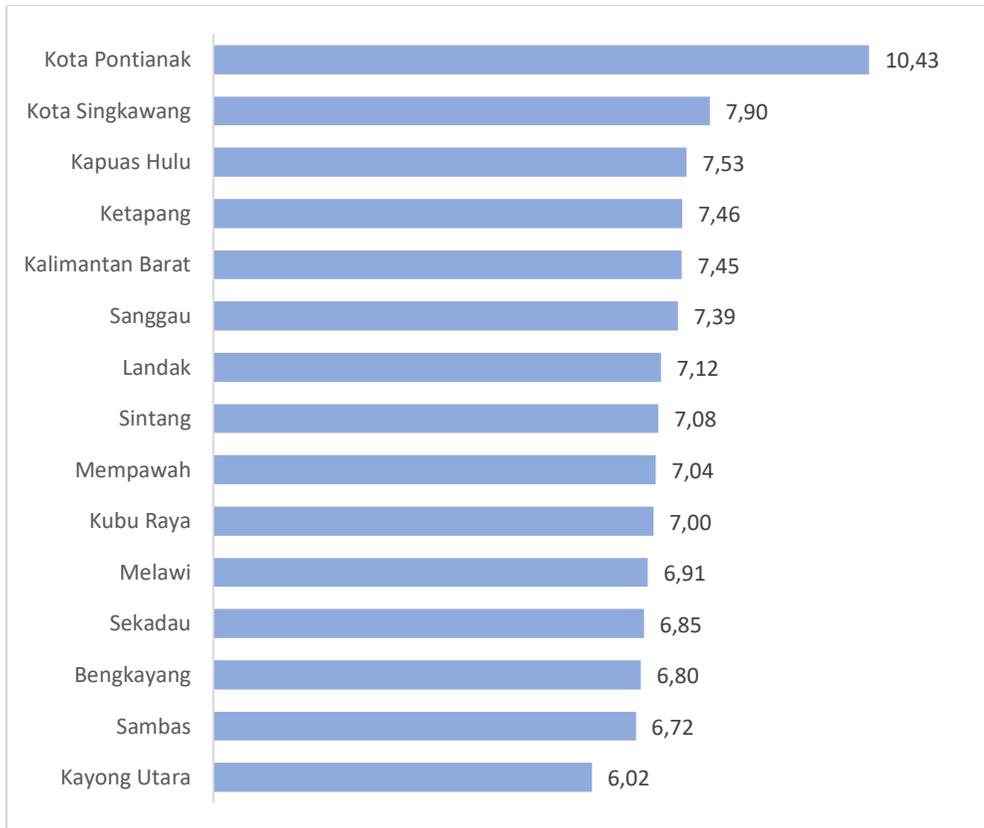
Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah. Di tingkat kabupaten/kota, angka harapan lama sekolah tahun 2021 berkisar antara 11,17 sampai 15,01 tahun. Kota Pontianak memiliki angka harapan lama sekolah tertinggi yaitu 15,01 tahun yang menunjukkan anak yang berusia 7 tahun di Kota Pontianak diharapkan bisa menyelesaikan sekolah sampai Diploma III sederajat. Sementara angka harapan lama sekolah terendah berada di Kabupaten Melawi yaitu 11,17 tahun. Sementara Kabupaten Bengkayang menjadi kabupaten dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah paling lambat. Dalam kurun waktu yang sama, Kota Singkawang menjadi kabupaten/kota dengan pertumbuhan harapan lama sekolah paling cepat di Kalimantan Barat.



Gambar 31: HLS Kabupaten / Kota Kalimantan Barat, 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Indikator kedua dari dimensi pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah. Di tingkat kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah tahun 2021 berkisar antara 6,02 sampai 10,43 tahun. Kota Pontianak memiliki angka rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 10,43 tahun artinya rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas di Kota Pontianak adalah 10,43 tahun atau setara SMP kelas 1.



Gambar 32: RLS Kabupaten / Kota Kalimantan Barat, 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Melihat dua indikator penyusun dimensi pengetahuan yaitu HLS dan RLS maka dapat dilihat bahwa terdapat lima kabupaten/kota dengan HLS terendah di Kalimantan Barat yaitu **Kabupaten Sekadau, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, dan Melawi** yang mana kelima kabupaten tersebut HLS nya kurang dari 12 tahun. Sementara itu untuk RLS, lima kabupaten **dengan RLS terendah di Kalimantan**



Gambar 33: Kabupaten Terendah HLS

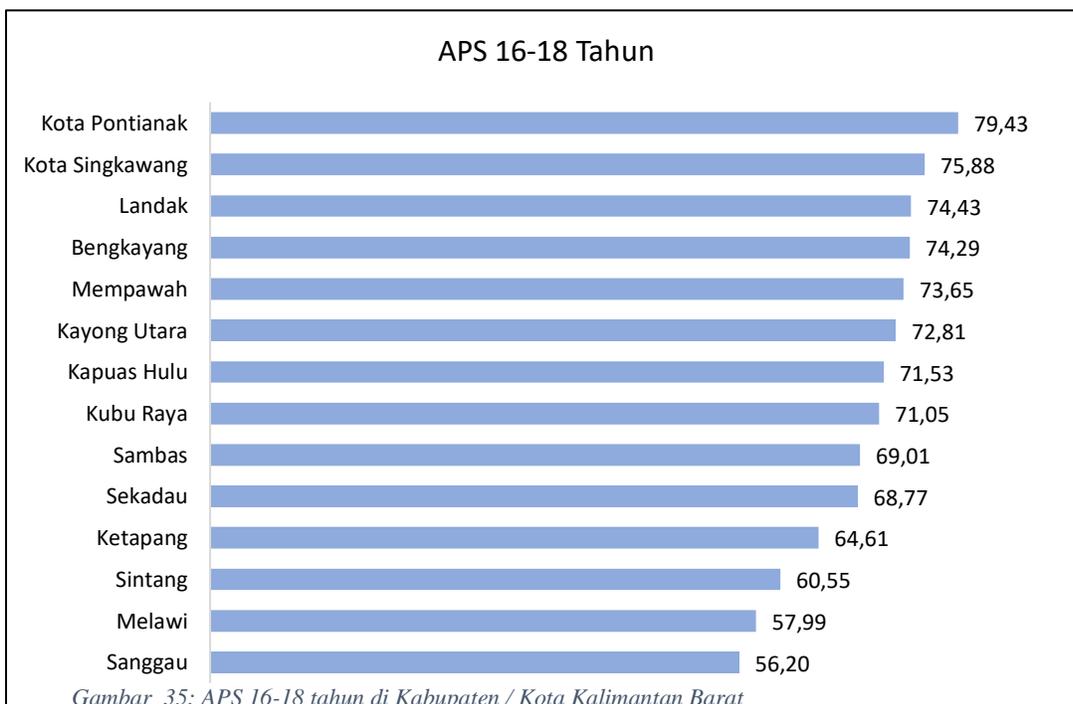
**Sekadau, Bengkayang, Sambas, dan Kayong Utara.** Untuk mendukung program



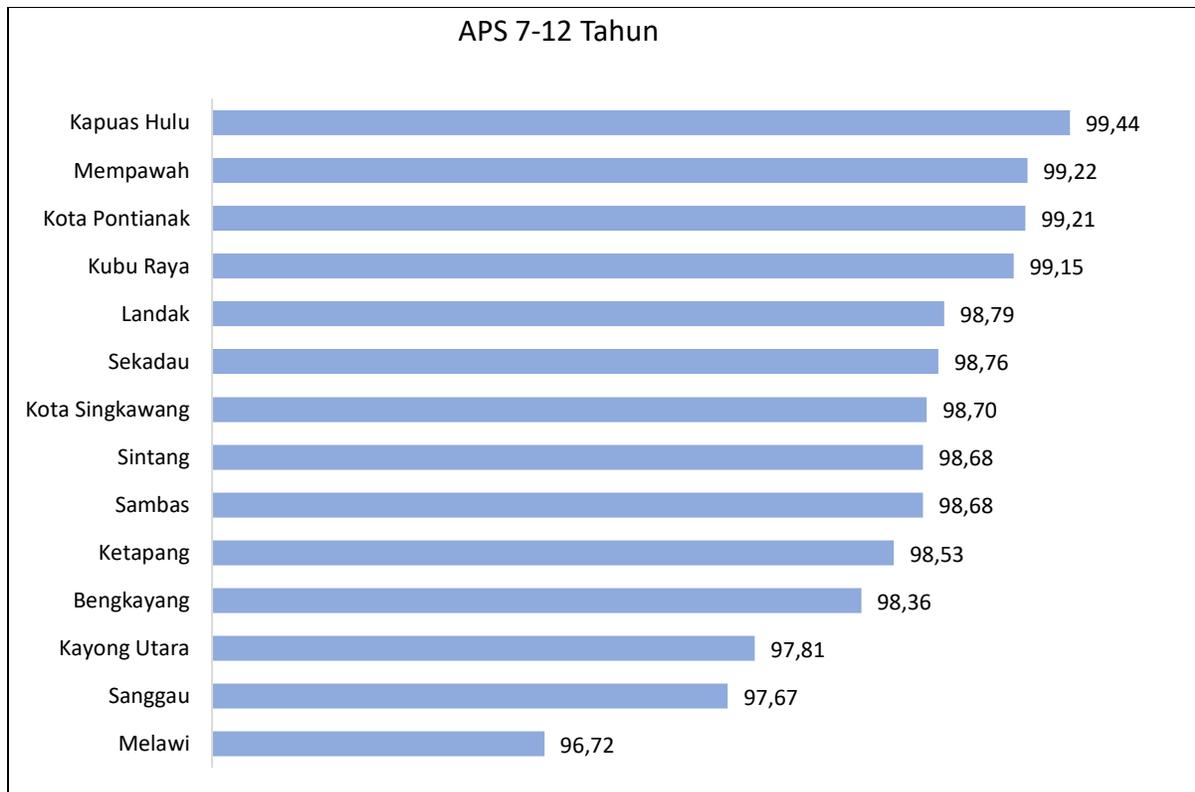
Gambar 34: Kabupaten Rendah RLS

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya percepatan peningkatan IPM agar lebih terfokus dan terarah, maka dapat dimulai dari kabupaten/kota dengan kondisi yang HLS dan RLS yang terendah. Dari kriteria tersebut maka diperoleh tiga kabupaten yang HLS dan RLS nya terendah se-Kalimantan Barat yaitu di Kabupaten Sekadau, Melawi, dan Kayong Utara.

Fokus lokasi untuk ketiga kabupaten tersebut didukung pula dengan indikator pendidikan lain yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) di mana pada setiap jenjang usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun Kabupaten Melawi merupakan kabupaten dengan nilai APS terendah atau peringkat ke-2 terendah. Sementara untuk Kabupaten Sekadau, pada jenjang usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun APS nya termasuk rendah jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian untuk Kabupaten Kayong Utara APS 7-12 tahun termasuk tiga kabupaten/kota dengan nilai yang terendah.

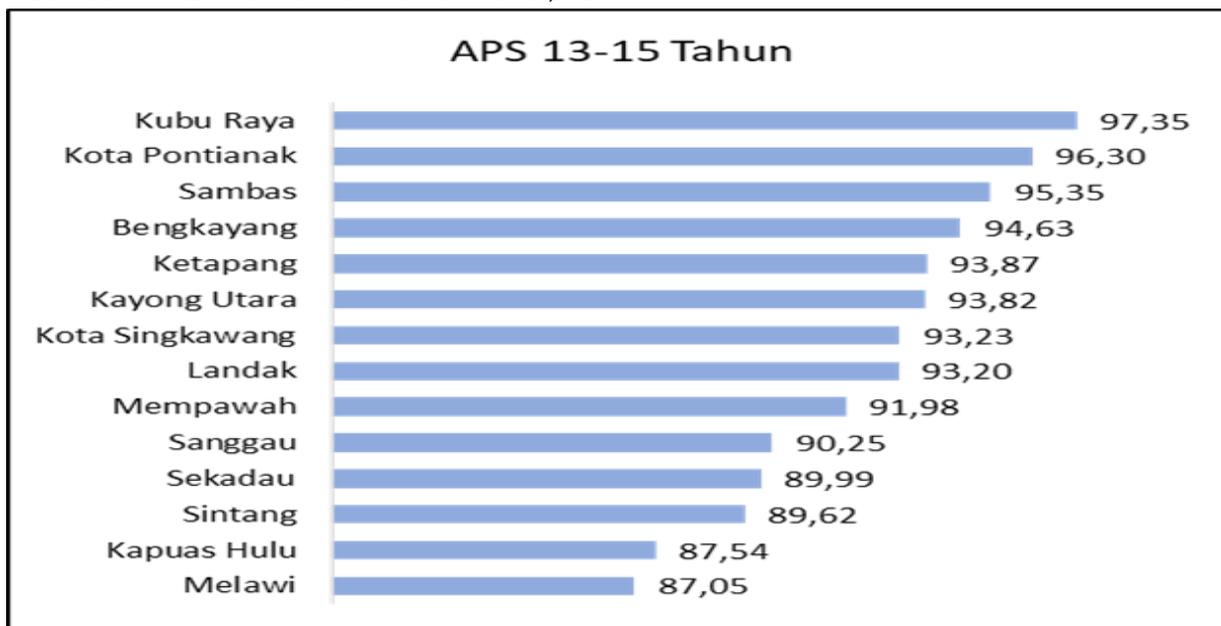


Gambar 35: APS 16-18 tahun di Kabupaten / Kota Kalimantan Barat



Gambar 36: APS 7-12 Kabupaten Kota di Kalimantan Barat

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022



Gambar 37: APS 13-15 Kabupaten Kota di Kalimantan Barat

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Dengan demikian, beberapa variabel yang mempengaruhi peningkatan IPM dimensi pengetahuan antara lain:

**A. Keterbatasan Akses**

- 1) Lokasi tempat tinggal peserta didik berada jauh dari satuan pendidikan. Jika tidak diperhatikan akan menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah, sehingga perlu akses lebih dekat kepada satuan pendidikan.
- 2) Orang tua / wali tidak membiayai biaya tidak langsung pendidikan
- 3) pola pikir orang tua yang apatis terhadap pentingnya pendidikan
- 4) Keterbatasan tenaga pendidik dalam mengembangkan model pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik
- 5) Implementasi pendidikan inklusif sebagaimana diamanah aturan belum dilaksanakan sepenuhnya
- 6) adanya kebijakan moratorium (pengangkatan guru tidak sesuai dengan jumlah guru yang keluar)

Data Sekolah Berasrama di tingkat SMA/SMK di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

*Tabel 8: Jumlah SMA dan SMK Berasrama*

No	Kabupaten/Kota	SMA	SMK
1	Kab. Sambas	3	1
2	Kab. Bengkayang	3	2
3	Kab. Sanggau	2	2
4	Kab. Sintang	4	1
5	Kab. Kapuas Hulu	4	2
6	Kab. Ketapang	3	1
7	Kab. Kayong Utara	1	-
8	Kab. Landak	1	-
9	Kab. Melawi	1	-
10	Kota Singkawang	-	1
11	Kab. Sekadau	-	2
12	Kab. Mempawah	-	1
13	Kab Kubu Raya	-	-
14	Kota Pontianak	-	-

	Jumlah	24	13
--	--------	----	----

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat,2022

## B. Rendahnya Minat Terhadap Sekolah yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Agar ada ketertarikan siswa dan orang tua pada sekolah yang tersedia di Kalimantan Barat dilakukan beberapa upaya diantaranya :

- 1) Penyediaan Sekolah Gratis melalui Program Bantuan Pendidikan (Beasiswa)
  - a) Beasiswa kepada peserta didik, program untuk memberikan pendidikan gratis kepada seluruh peserta didik agar tidak terdapat pungutan kepada peserta didik.
  - b) Beasiswa pada jenjang SMA, SMK dan SLB, termasuk pembiayaan untuk anak putus sekolah. Upaya ini dilakukan dalam rangka mencegah anak putus sekolah karena masalah ekonomi. Berikut Data Pemberian Basiswa untuk Tingkat SMA,SMK dan SLB khusus Negeri di Provinsi Kalimantan Barat sebagai Berikut :

Tabel 9: REKAP JUMLAH SISWA SMA, SMK DAN SLB NEGERI PENERIMA PBP JULI - DESEMBER, 2022

Kabupaten/Kota	NEGERI		
	SMA	SMK	SLB
Bengkayang	6.919	3.137	66
Kapuas Hulu	7.383	1.383	56
Kayong Utara	3.962	1.097	24
Ketapang	8.477	7.126	76
Kubu Raya	8.404	2.382	63
Landak	10.244	3.284	90
Melawi	3.705	1.679	0
Mempawah	5.469	1.993	58
Sambas	11.194	9.598	137
Sanggau	8.216	3.649	49
Sekadau	4.623	1.454	31
Sintang	8.606	5.842	44
Pontianak	10.358	9.407	0
Singkawang	9.252	4.053	136
<b>JUMLAH</b>	<b>106.812</b>	<b>56.084</b>	<b>830</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat,2022

Kebutuhan Pemberian Bantuan Perlengkapan Sekolah, dilakukan di antaranya sebagai berikut :

- a) Pemberian perlengkapan sekolah ditujukan kepada peserta didik tidak mampu, perlengkapan sekolah yang diberikan berupa pakaian seragam, sepatu, tas, dan atribut.
  - b) Peserta didik tidak mampu agar diberikan bantuan perlengkapan sekolah untuk meringankan pengeluaran orang tua khususnya pada saat penerimaan peserta didik baru, sehingga peserta didik dapat menggunakan pakaian yang sama dengan anak lainnya.
- 2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui:
- a) Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan
  - b) Meningkatkan kualitas guru, *upskilling* dan *reskilling* tenaga pendidik, sehingga guru memiliki kompetensi yang selanjutnya mencetak peserta didik yang memiliki daya saing tinggi.
  - c) Penetapan sekolah penggerak dan pusat keunggulan, serta peningkatan akreditasi sekolah, agar kualitas pendidikan semakin meningkat.
  - d) Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan penting untuk dilakukan, agar menjamin mata pelajaran dapat terlaksana di kelas.
  - e) Ketersediaan guru yang belum memenuhi standar pendidikan nasional, sehingga perlu upaya pemenuhan kebutuhan guru dan peningkatan pengetahuan kompetensi guru.
- 3) Memperhatikan Rasio Peserta Didik terhadap Guru Tingkat Sekolah Dasar, SMP dan SMA/SMK
- Menambah jumlah guru untuk daerah yang rasio peserta didiknya tinggi terutama rasio peserta didik guru pada jenjang Sekolah Dasar, SMP dan SMA/SMK, berikut data guru dan peserta didik:

Tabel 10: Data Guru di Kalimantan Barat

Data Guru Prov. Kalimantan Barat - Dapodikdasmen						
No	Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Ketapang	4,083	1,856	601	470	23
2	Kota Pontianak	2,891	1,444	1,127	808	70
3	Kab. Sambas	3,61	1,611	669	475	8
4	Kab. Kuburaya	3,329	1,468	870	450	12
5	Kab. Sintang	3,211	1,407	635	428	9
6	Kab. Sanggau	3,226	1,214	489	312	12
7	Kab. Landak	2,859	1,271	703	246	12
8	Kab. Kapuas Hulu	2,561	1,146	526	106	6
9	Kab. Bengkayang	2,107	858	518	203	11
10	Kab. Melawi	2,028	920	344	179	11
11	Kab. Mempawah	1,692	602	331	190	12
12	Kota Singkawang	1,318	621	328	304	38
13	Kab. Sekadau	1,389	574	304	136	4
14	Kab. Kayong Utara	1,017	447	246	89	8
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>35,321</b>	<b>15,439</b>	<b>7,691</b>	<b>4,396</b>	<b>236</b>

Sumber : Dapodikdasmen,2022

Tabel 11 Data siswa di Kalimantan Barat

Data Peserta Didik Prov. Kalimantan Barat - Dapodikdasmen						
No	Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Sambas	46,769	20,776	11,156	8,915	0
2	Kota Pontianak	40,95	19,406	10,308	7,409	420
3	Kab. Ketapang	40,567	14,277	8,082	2,449	0
4	Kab. Kuburaya	36,474	11,973	10,338	5,593	0
5	Kab. Sanggau	35,412	12,634	7,513	4,775	0
6	Kab. Sintang	27,69	12,223	6,4	5,319	76
7	Kab. Landak	28,108	12,539	10,198	2,355	0
8	Kota Singkawang	23,339	8,756	3,479	4,512	356
9	Kab. Bengkayang	17,971	8,905	5,689	1,537	29
10	Kab. Kapuas Hulu	16,328	7,483	6,505	1,425	0
11	Kab. Sekadau	16,846	6,072	4,804	2,746	40
12	Kab. Mempawah	17,245	6,117	4,128	972	78
13	Kab. Melawi	15,468	6,622	4,673	1,18	0
14	Kab. Kayong Utara	7,653	3,438	3,32	670	29
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>370,82</b>	<b>151,221</b>	<b>96,593</b>	<b>49,857</b>	<b>1,028</b>

Sumber : Dapodikdasmen,2022

4) Program Sertifikasi melalui Lembaga sertifikasi profesi daerah Lulusan SMK diberikan bantuan Uji Sertifikasi Kompetensi pada Program Keahlian tertentu.

Tabel 12 Lembaga Sertifikasi Profesi di Kalimantan Barat

No.	Nama LSP	Jumlah TUK	Jumlah Skema	Jumlah Asesor
1	LSP Politeknik Negeri Ketapang	-	6	-
2	LSP SMKN 5 Pontianak	4	-	23
3	LSP Pariwisata Citra Insan	5	3	20
4	LSP Politeknik Negeri Pontianak	8	21	146
5	LSP SMK Negeri 7 Pontianak	4	4	-
6	LSP SMK Negeri 9 Pontianak	-	-	-
7	LSP SMTI Pontianak	3	5	23
8	LSP SMKN 1 Ngabang	-	3	-
9	LSP SMKN 2 Singkawang	17	12	31
10	LSP P1 SMK Negeri 4 Pontianak	21	6	39
11	LSP SMKN 1 Sintang	9	5	38
12	LSP SMKN 2 Ketapang	2	7	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

### C. Tingginya Angka Pernikahan Anak

Pernikahan anak atau pernikahan di bawah usia 19 tahun, Provinsi Kalimantan Barat masih relatif tinggi yaitu sebesar 32,72 persen. Di antara 100 perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin terdapat 38 yang usia perkawinan pertamanya di bawah 19 tahun. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan perempuan di Provinsi Kalimantan Barat tidak maksimal.

Tabel 13 Persentase Perempuan pernah kawin usia 10 tahun ke atas dan umur perkawinan pertama di Kabupaten / Kota, tahun 2021

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	<19 tahun	>=19 tahun	Jumlah
<b>KALIMANTAN BARAT</b>		<b>32,72</b>	<b>67,28</b>	<b>100,00</b>
1	Sambas	29,66	70,34	100,00
2	Bengkayang	30,52	69,48	100,00
3	Landak	36,61	63,39	100,00
4	Mempawah	31,52	68,48	100,00

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	<19 tahun	>=19 tahun	Jumlah
5	Sanggau	32,65	67,35	100,00
6	Ketapang	37,84	62,16	100,00
7	Sintang	40,75	59,25	100,00
8	Kapuas Hulu	33,36	66,64	100,00
9	Sekadau	37,28	62,72	100,00
10	Melawi	44,17	55,83	100,00
11	Kayong Utara	35,16	64,84	100,00
12	Kubu Raya	34,04	65,96	100,00
13	Pontianak	19,69	80,31	100,00
14	Singkawang	26,45	73,55	100,00

#### D. Kualitas dan Kuantitas Program Paket A, B, C oleh SKB dan PKBM

Mengejar ketertinggalan pendidikan bagi penduduk yang tidak berusia sekolah lagi. Penduduk dengan usia di bawah usia 21 tahun disediakan BOP jika tergabung di SKB atau PKBM sebagai penyelenggara Paket A, B, dan C. Untuk usia di atas 21 tahun diperlukan pendekatan khusus dalam penganggaran. Berikut Data SKB dan PKBM di Provinsi Kalimantan Barat :

Tabel 14: Data Sekolah di Kalimantan Barat

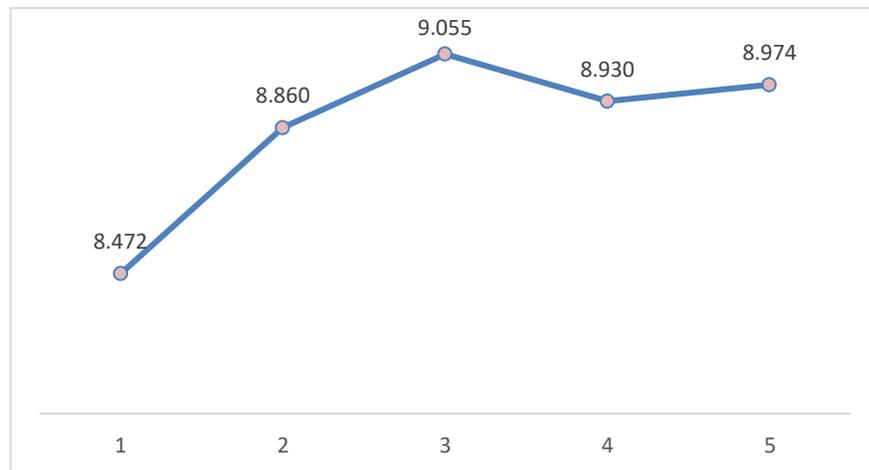
Data Sekolah Prov. Kalimantan Barat - Dapodikdasmen							
No	Wilayah	PKBM			SKB		
		Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kab. Ketapang	23	0	23	1	1	0
2	Kab. Sambas	18	0	18	1	1	0
3	Kab. Kuburaya	24	0	24	1	1	0
4	Kab. Sanggau	9	0	9	1	1	0
5	Kab. Sintang	12	0	12	1	1	0
6	Kab. Landak	14	0	14	0	0	0
7	Kab. Kapuas Hulu	6	0	6	0	0	0
8	Kota Pontianak	17	0	17	1	1	0
9	Kab. Bengkayang	12	0	12	1	1	0
10	Kab. Melawi	9	0	9	1	1	0
11	Kab. Sekadau	10	0	10	0	0	0
12	Kab. Mempawah	18	0	18	1	1	0
13	Kota Singkawang	7	0	7	0	0	0
14	Kab. Kayong Utara	6	0	6	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

Sumber : Dapodikdasmn,2022

### 2.4.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dalam perhitungan IPM standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita disesuaikan, mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan. Selama tahun 2017-2021, pertumbuhan pengeluaran per kapita di Kalimantan Barat sebesar 1,47 persen.

Dimensi standar hidup yang layak sangat penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita, Disparitas/kesenjangan pada dimensi pengeluaran per kapita selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun sempat menurun di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Tahun 2020, indikator ini terpengaruh secara signifikan akibat adanya pandemi Covid-19.

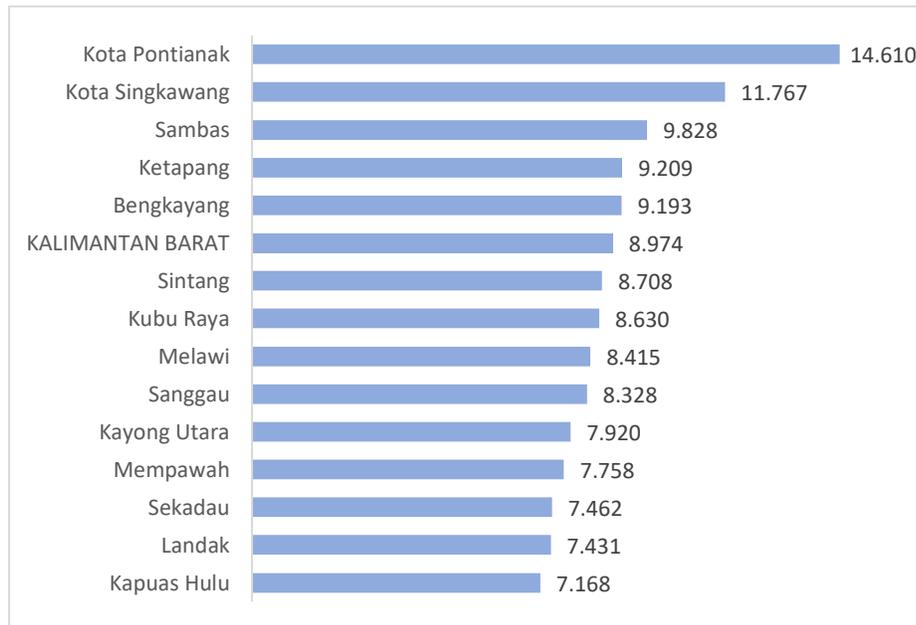


Gambar 38: Pengeluaran per kapita disesuaikan Kalbar tahun 20217-2021 (juta rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

PDRB per kapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah, yaitu hasil dari pembagian PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk. Pemerintah dapat menggunakan PDRB per kapita untuk memahami bagaimana ekonomi tumbuh dengan populasinya. Analisis di tingkat Provinsi dapat memberikan gambaran tentang pengaruh populasi domestik di provinsi tersebut.

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022



Gambar 39: Pengeluaran per kapita Kabupaten Kota di Kalbar tahun 2021 (000 rupiah)

Di tingkat kabupaten/kota, pengeluaran per kapita pada tahun 2021 lebih bervariasi. Pengeluaran per kapita berkisar antara 7,17 juta sampai 14,61 juta rupiah. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Pontianak, sementara pengeluaran per kapita terendah berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam kurun waktu lima tahun, pengeluaran per kapita di seluruh kabupaten/kota terus meningkat.

PDRB perkapita tertinggi adalah di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang, namun yang sudah di atas rata-rata PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Barat ada 5 kabupaten/kota yang artinya masyarakat di kabupaten tersebut dikatakan semakin makmur. Kabupaten Melawi merupakan kabupaten yang mempunyai PDRB perkapita terendah.

Tabel 15 PDRB Kabupaten / Kota di Kalbar tahun 2017-2021

Provinsi/Kab/Kota	PDRB Per Kapita (Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
KALIMANTAN BARAT	<b>36.589.607</b>	<b>39.343.890</b>	<b>42.109.566</b>	<b>39.631.760</b>	<b>42.282.900</b>
Sambas	33.051.591	35.644.513	38.325.603	32.927.474	34.947.961
Bengkayang	29.908.717	31.831.117	33.872.597	30.425.841	32.028.706
Landak	24.371.995	26.181.059	27.960.628	27.067.275	28.955.587
Mempawah	26.988.714	29.100.242	31.406.433	28.445.128	29.719.720
Sanggau	36.917.370	39.050.342	40.810.449	41.160.529	44.375.796
Ketapang	45.438.299	49.602.960	53.677.134	49.484.664	53.302.081
Sintang	30.111.961	32.393.865	35.072.107	34.954.875	37.172.635
Kapuas Hulu	34.070.337	36.400.679	38.790.866	40.698.450	43.634.962
Sekadau	26.885.556	29.346.813	31.911.491	31.088.954	33.505.998
Melawi	21.546.994	23.091.158	24.680.081	23.003.775	24.332.104
Kayong Utara	31.988.765	34.232.620	36.682.900	33.386.417	35.268.232
Kubu Raya	53.294.603	46.142.802	50.249.030	47.586.378	50.772.472
Kota Pontianak	53.294.603	56.568.916	59.943.403	57.257.217	60.568.889
Kota Singkawang	41.863.526	44.240.574	45.914.856	43.219.241	45.726.180

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Jika dilihat dari persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, *sektor* pertanian (A) di Provinsi Kalimantan Barat yang menunjang penyerapan tenaga kerja dan perekonomian, kemudian pekerja di sektor perdagangan, transportasi, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa perorangan (S), dan pekerja di sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih serta konstruksi dan bangunan (M) merupakan sektor yang paling rendah penyerapan tenaga kerjanya.

Tabel 16 Persentase Penduduk 15 tahun ke atas bekerja menurut sector di Kabupaten / Kota tahun 2021

Kabupaten/Kota	Sektor			Jumlah
	A	M	S	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	57,11	13,41	29,47	100,00
Bengkayang	54,46	18,44	27,10	100,00
Landak	67,16	8,67	24,18	100,00
Mempawah	31,29	23,12	45,58	100,00
Sanggau	64,47	13,03	22,50	100,00
Ketapang	52,59	14,75	32,66	100,00
Sintang	61,94	13,64	24,42	100,00
Kapuas Hulu	49,78	21,97	28,25	100,00
Sekadau	64,44	10,82	24,74	100,00
Melawi	46,84	24,18	28,98	100,00
Kayong Utara	48,70	15,89	35,41	100,00
Kubu Raya	39,69	19,42	40,89	100,00
Pontianak	4,35	18,91	76,74	100,00
Singkawang	21,57	20,81	57,62	100,00
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>47,34</b>	<b>16,33</b>	<b>36,32</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021.

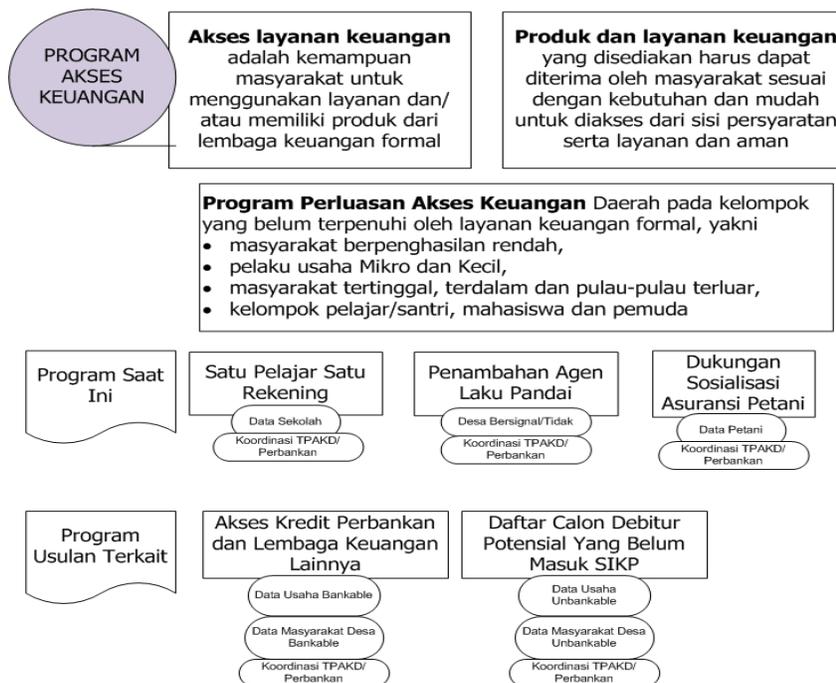
Selain peningkatan 2 hal tersebut di atas dari dimensi ini masih perlu juga ditingkatkan Pengendalian Harga, Ketersediaan/Stok, Produktivitas Sektor penyerap Tenaga Kerja terbanyak, Lapangan Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Lokal.

Standar Hidup Layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang dan jasa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan beberapa kebijakan, utamanya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian

inflasi, percepatan akses keuangan daerah, dan memperkuat akses bahan pokok (Bapak) kepada masyarakat secara luas.



Gambar 40: Alur pengendalian inflasi daerah 2020-2024



Gambar 41: Alur program memperkuat akses keuangan kepada masyarakat

Aspek ekonomi sangat mempengaruhi kemampuan akses masyarakat terhadap pangan dan gizi. Walaupun pangan tersedia di suatu wilayah namun keterbatasan ekonomi pada tingkat rumah tangga menyebabkan terbatasnya akses untuk mendapatkan pangan, khususnya pangan yang bergizi dan aman. Akibatnya, masyarakat cenderung membeli pangan pokok yang relatif lebih murah tetapi kurang gizi mikro, protein dan lemak serta tidak terjamin keamanannya.

Kerentanan rumah tangga terhadap pangan umumnya dipengaruhi oleh strategi penghidupan dan kesempatan kerja yang ada. Strategi penghidupan didefinisikan sebagai kemampuan, modal/aset rumah tangga (alam, fisik, manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengamankan kebutuhan dasar berupa pendapatan, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan sinergitas dan langkah konkrit, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai strategi jangka panjang yang implementasinya dilakukan melalui program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pemerintah juga melakukan konsolidasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok program penanggulangan kemiskinan, yaitu :

- 1) Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial berbasis keluarga (perlindungan dan pemenuhan hak-hak layanan dasar masyarakat);
- 2) Kelompok Program berbasis Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 3) Kelompok Program berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Diversifikasi mata pencaharian akan meningkatkan ketahanan rumah tangga yang rentan pangan. Rumah tangga miskin akan dapat mengatasi guncangan (*shock*) dengan baik jika mereka memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Berdasarkan pengamatan, kelompok rumah tangga rentan yang tidak memiliki diversifikasi mata pencaharian pada saat guncangan terjadi, maka cukup sulit untuk mengatasinya. Hal ini terutama disebabkan karena kurangnya sumber pendapatan yang lain di luar mata pencaharian utama mereka. Setiap program diversifikasi mata pencaharian yang direncanakan dengan baik akan dapat mengatasi tantangan ini sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

## A. Ketahanan Pangan

Penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pembangunan pertanian yang dirancang dengan efektif. Dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat, maka program terkait ketahanan pangan dan gizi lebih mengutamakan pada perbaikan gizi keluarga seperti kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Pertanian Keluarga, Gerakan Peningkatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Rumah Tangga.

Strategi penanganan rentan pangan perlu difokuskan pada lokasi yang berpotensi rentan terhadap rawan pangan. Sebagaimana hasil analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan. Lokasi penanganan wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) tahun 2021 wilayah kecamatan difokuskan pada kecamatan yang masuk Prioritas Sangat Rentan dan Rentan.

Tabel 17 Hasil Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2021

No	Uraian			Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
1	Prioritas.1	Sangat Rentan	1	1	0.57
2	Prioritas.2	Rentan	2	10	5.75
3	Prioritas.3	Agak Rentan	3	22	12.64
4	Prioritas.4	Agak Tahan	4	41	23.56
5	Prioritas.5	Tahan	5	79	45.40
6	Prioritas.6	Sangat Tahan	6	21	12.07

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

Rendahnya ketahanan pangan dan gizi daerah disebabkan oleh :

- 1) Kapasitas produksi pertanian masih rendah;
- 2) Pemanfaatan sumberdaya pangan lokal belum optimal dan cenderung rendah;
- 3) Pemanfaatan Lahan-lahan Kosong dan Terlantar untuk Pertanian di antaranya melalui Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) atau Pekarangan Pangan Mandiri (P2M) belum optimal;

- 4) Cadangan Pangan Wilayah baik yang dikelola oleh Pemerintah Desa maupun Kelompok Masyarakat di antaranya melalui Program Pengembangan Lumbung Pangan belum dikembangkan dengan baik;
- 5) Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, puskesmas), pengembangan usaha produktif/UMKM untuk menggerakkan ekonomi wilayah, serta pemberian bantuan sosial masih rendah;
- 6) Peningkatan akses air bersih dengan memanfaatkan sumber daya lokal dengan teknologi tepat guna serta penyediaan fasilitas dan layanan air bersih masih rendah;
- 7) Penurunan pangsa pengeluaran pangan melalui sosialisasi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal yang mandiri sehingga mengurangi pengeluaran untuk pembelian bahan makanan;
- 8) Peningkatan pendidikan/penyuluhan terhadap ibu Rumah Tangga sebagai ujung tombak pendidikan keluarga belum optimal;
- 9) Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Pangan dan Gizi serta Pola Hidup Sehat untuk mencegah munculnya kasus-kasus pangan dan gizi seperti stunting belum optimal;
- 10) Rendahnya tingkat ketahanan pangan dan gizi diindikasikan pada kecamatan yang jauh dari ibu kota, kecamatan perbatasan, kecamatan pemekaran, dan wilayah perkotaan.

Untuk meningkatkan akses konsumsi makanan dan *non* makanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perikanan, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), membangun jaringan distribusi, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat. Guna menunjang hal tersebut, beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian adalah :

- 1) Kebutuhan pembukaan lapangan kerja, dan latihan kerja dalam upaya meningkatkan pendapatan;
- 2) Kemampuan daerah menyediakan makanan dan *non* makanan secara mandiri;

- 3) Memperbanyak program atau kegiatan yang bersifat padat karya;
- 4) Peningkatan asupan gizi masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan sebagai lahan pangan mandiri;
- 5) Pemberdayaan masyarakat petani/peternak/nelayan.

### 3 STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI

#### 3.1 Strategi

##### 3.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Peningkatan UHH akan dilaksanakan melalui aspek sebagai berikut:

- a. Menekan dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
- b. Melakukan peningkatan upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)
- c. Peningkatan dan perbaikan kondisi sanitasi

Secara detail tujuan dan strategi dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan	Strategi
UHH - Penurunan AKI dan AKB	Memperkuat kebijakan dalam mendorong <i>private sectors</i> untuk mendukung mobilitas akses jalan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah
	Kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mendukung program posyandu prima
	Melakukan inventarisasi DTKS di tingkat kabupaten
	Mendorong insentif fiskal berbasis kinerja komponen kesehatan ke Kabupaten/Kota
	Memperkuat agenda pelayanan kesehatan masyarakat
	Mendukung Gerakan mahasiswa (KKN) untuk merespon komponen kesehatan dan kampanye pencegahan perkawinan anak
	Pendekatan teknologi dan sosial media. Promosi pengetahuan edukasi seks, dampak perkawinan anak dan kekerasan gender
	Memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam mempromosikan kesehatan gizi ibu hamil dan pencegahan perkawinan anak
	Pendekatan teknologi tentang promosi pencegahan pernikahan anak, edukasi seks dan STBM
	Memperkuat data tumbuh kembang Balita melalui inventarisasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak sampai ke tingkat desa
UHH - Sanitasi dan Air Bersih	Pendataan Sebaran Penggunaan Sumber Air Bersih dan Sarana Sanitasi
	Memperkuat kebijakan dalam mendorong keterlibatan aktor swasta dalam peningkatan sanitasi dan air bersih
UHH - Cakupan Masyarakat dalam Kepersertaan JKN	Memperkuat cakupan pada JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui sumber APBD Kabupaten
	Memperkuat implementasi PERGUB 28/2022 tentang kepersertaan JKN. Memperkuat sasaran program kepersertaan JKN

Tujuan	Strategi
UHH - Capaian Imunisasi	Memperkuat promosi imunisasi campak di tingkat kabupaten melalui program/kegiatan kader Posyandu di tingkat desa
	Melibatkan tokoh agama/masyarakat (Kemenag) dalam promosi imunisasi campak di tingkat desa
	Pendekatan teknologi tentang promosi vaksinasi untuk kesehatan dan balita
	Menggalakkan kembali kader posyandu/relawan kesehatan

### 3.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi ini akan melakukan peningkatan pada dua aspek yaitu:

- 1) Peningkatan HLS, melalui:
  - d. Melakukan peningkatan dan mempertahankan mutu pelayanan pendidikan
  - e. Menciptakan dan menjamin tersedianya fasilitas pendidikan serta akses yang mudah di jangkau
  - f. Meningkatkan angka partisipasi sekolah
- 2) Peningkatan RLS, melalui:
  - a. Peningkatan focus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan

Secara detail tujuan dan strategi dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan	Strategi
Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia SD (7-12 tahun)	Meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia SMP (13-15 tahun)	
Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia SMA/SMK (16-18 tahun)	
Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perguruan Tinggi Usia (19-24 tahun)	
Ketersediaan Asrama Gratis untuk siswa SMA/SMK	Menciptakan dan menjamin tersedianya fasilitas pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.
Ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	
Meningkatkan Rasio peserta didik terhadap guru tingkat SD	Melakukan peningkatan dan mempertahankan mutu layanan pendidikan
Meningkatkan Rasio peserta didik terhadap guru tingkat SMP	
Meningkatkan Rasio peserta didik terhadap guru tingkat SMA	

Tujuan	Strategi
Meningkatkan Rasio peserta didik terhadap guru tingkat SMK	
Pengembalian anak usia sekolah yang tidak sekolah	
Mencegah peningkatan kasus pernikahan anak	
Meningkatkan akses paket A,B, dan C	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan

### 3.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Pada dimensi ini menenkan pada tiga aspek yaitu:

- a. Melakukan peningkatan pembangunan pada sektor ekonomi
- b. Melakukan pencegahan dan pengurangan resiko terjadinya inflasi
- c. Memberikan edukasi terhadap pola pengeluaran penduduk

Secara detail tujuan dan strategi dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan	Strategi
Meningkatkan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	1. Penyediaan sistem resi gudang pasar flamboyan sesuai dengan ketentuan fungsi pasar induk.
	2. Memfasilitasi desain kebijakan penyediaan sistem gudang pasar Mengidentifikasi atau mengkaji ulang hasil identifikasi keberagaman 96 produk (makanan dan non makanan) pada kab/kota <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan informasi sistem logistik provinsi</li> <li>2. Penyediaan informasi sistem logistik kab/kota</li> <li>3. Percepatan implementasi road map pengendalian inflasi prov</li> <li>4. percepatan implementasi road map pengendalian inflasi kab/kota</li> </ol>
	3. Memfasilitasi kebijakan penyediaan pakan lokal yang terjangkau dan berkualitas.
	4. Diseminasi teknologi pakan berbasis sumberdaya lokal
	5. Memfasilitasi dan Membina Pembentukan Koperasi Petani/ Peternak sesuai kewenangan provinsi
	6. Fasilitasi kebijakan untuk penguatan kelembagan bidang usaha dalam peningkatan skala usaha kelompok masyarakat
	7. Mendorong percepatan Peningkatan skala usaha kelompok masyarakat

Tujuan	Strategi
	8. Memfasilitasi kebijakan kemitraan antara industri dengan usaha kecil dan mikro untuk mendukung kenaikan kelas usaha
	9. Memfasilitasi UMKM potensial kab/kota untuk masuk ke platform digital provinsi
	10. Membangun platform digital untuk e-commerce UMKM daerah
	11. Memfasilitasi UMKM lokal masuk ke e-commerce sebanyak 1000 UMKM
	12. Menyusun perda prov sebagai turunan dari PP no 7 tahun 2021. 13. Kab/kota menyusun perda sebagai turunan dari PP no 7 tahun 2021
	13. Provinsi memfasilitasi Sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha
	14. Melaksanakan pelatihan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kewenangan Provinsi
	15. Melaksanakan pelatihan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan tenaga kerja di kab/kota berdasarkan kewenangan
	17. Penyusunan roadamp percepatan akses keuangan daerah oleh TPAKD provinsi
	18. Penyusunan roadamp percepatan akses keuangan daerah oleh TPAKD Kab/Kota
	19. Mendorong dukungan kemitraan usaha kecil/ mikro yang belum memiliki akses permodalan
	20. Membangun kesadaran untuk meningkatkan keragaman permintaan makanan dan non makanan di tingkat masyarakat
	21. Menyediakan desain kebijakan suplai demand makanan dan non makanan
	22. Memfasilitasi dan Membina Pembentukan badan keuangan (Koperasi) Petani/ Peternak sesuai kewenangan provinsi
	23. Mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
	24. Memperkuat Promosi dan akses pemasaran pemanfaatan hutan dan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat

### 3.2 Program Kerja

Tabel berikut menyajikan program kerja untuk setiap komponen IPM, untuk melihat program kerja selengkapnya dapat dilihat pada LAMPIRAN 1: MATRIK RENCANA AKSI.

### 3.2.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat, dan lintas sektor tingkat daerah provinsi.	Peningkatan upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat, dan lintas sektor tingkat daerah provinsi.	Mempawah, Sintang, Bengkayang, Kubu Raya, Melawi, Sekadau dan Kayong Utara
		Pengelolaan layanan kesehatan	
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi. khusus data AKI dan AKB.	
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif.	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.
		Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan.	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat.	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	
		Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan.	
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (terintegrasi dengan KKN Tematik IPM melalui kurikulum STBM).	
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi. khusus data	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya,

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
upaya kesehatan masyarakat.		pernikahan anak, edukasi seks dan STBM	Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sambas, Sanggau, Bengkayang, Ketapang
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota	Mempawah, Ketapang, Pontianak, Kayong Utara, Singkawang
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Mempawah, Ketapang, Pontianak, Kayong Utara, Singkawang
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan (Km) Rekonstruksi Jalan (Km) Rehabilitasi Jalan (Km) Pemeliharaan Berkala Jalan (Km)	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.
Program kesejahteraan rakyat.	Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan.	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.
Program perlindungan jaminan sosial	Pengelolaan data fakir miskin	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.	Sanggau, Melawi, Sekadau, Kapuas Hulu, Sambas,

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
	cakupan daerah provinsi		Ketapang, Sintang, Mempawah.
Program pengelolaan keuangan daerah	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah	Provinsi
		Penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi	
Program peningkatan kualitas keluarga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak kewenangan provinsi	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga kewenangan provinsi	Kayong Utara, Sambas, Kubu Raya, Ketapang, Mempawah, Sanggau, Sintang, Sekadau
Program pengembangan fasilitas daya saing kepemudaan	Penyadaraan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, dan kepemudaan kewenangan provinsi	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan sarana dan prasarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan.	Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Sanggau, Mempawah, Landak, Sambas
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM lintas kabupaten/kota	Penyusunan rencana kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Sekadau, Sintang, Ketapang, Landak, Melawi, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sanggau
		Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM.	

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
		Peningkatan SPAM jaringan perpipaan. Perluasan SPAM jaringan perpipaan Perbaikan SPAM jaringan perpipaan Fasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM regional lintas kabupaten/kota Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan.	
Program pengelolaan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	Penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik	Sekadau, Sintang, Ketapang, Landak, Melawi, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sanggau
		Pemicuan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik regional Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	

### 3.2.2 Dimensi Pengetahuan

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	a. Pengadaan Perlengkapan Siswa SD	Kab Sanggau, Kab Melawi dan Kab Kayong Utara
		b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah SD	Kab Sanggau, Kab Melawi dan Kab Kayong Utara
		c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab Sanggau, Kab Melawi dan Kab Kayong Utara
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	a. Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP	Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Kapuas Hulu
		b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Kapuas Hulu
		c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Kapuas Hulu
		d. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Kapuas Hulu
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	14 Kabupaten/ Kota (Prioritas Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Melawi)
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Tinggi	Peningkatan Advokasi, Koordinasi dan Sosialisasi Pendidikan	14 Kabupaten/ Kota (Prioritas Kab Sekadau, Kab Melawi, Kab Kayong Utara)
		Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi	
		KKN Tematik IPM	
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Asrama Sekolah	Kab Landak, Kab Melawi, Kab Kayong Utara
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Asrama Sekolah	
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Asrama Sekolah	
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Asrama Sekolah	
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Kab Bengkayang, Kab Sambas, Kab Mempawah dan Kab Kubu Raya
		Pembinaan Kelembagaan dan	

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
		Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kab Sambas, Kab Ketapang, Kota Pontianak, Kab Kubu Raya, Kab Sintang dan Kab Sekadau
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	Kab Sanggau, Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kab Melawi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMA	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMA	Kab Sambas, Kab Sanggau dan Kab Mempawah
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMK	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMK	Kab Sambas, Kab Sanggau, Kab Bengkayang Kota Singkawang
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
	Menengah Kejuruan	Sekolah Menengah Khusus	
Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Kab Ketapang, Kab. Sambas, Kab Sintang dan Kab Melawi
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	Kab Melawi, Kab Sekadau, Kab Bengkayang, Kab Mempawah, Kota Pontianak dan Kab Kayong Utara
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
	Kewenangan Provinsi		
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pelayanan Informasi Publik	14 Kabupaten/ Kota
Program Pengelolaan Informasi Adminiistrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD/BHI Provinsi Kalbar

### 3.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
		(Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan penerbitan sertifikat benih	Provinsi
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Provinsi dan kabupaten/kota
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Provinsi

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
		(Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Provinsi
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah provinsi dan kabupaten/kota lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah provinsi dan kabupaten/kota lain	Provinsi
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Provinsi
Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Provinsi
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Provinsi dan kabupaten/kota
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten/ Kota
Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Provinsi
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	Pembinaan dan Penguatan	Provinsi dan kabupaten/kota

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
		(Kepmendagri No 050- 5889 Tahun 2021)	
	Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani	
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Provinsi dan kabupaten/kota
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Provinsi.
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Provinsi.
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Provinsi dan kabupaten/kota
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Provinsi dan kabupaten/kota
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil	Kab/Kota Pesisir
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Program Pengembangan Ukm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Provinsi
Program Pemberdayaan Dan	Pemberdayaan dan Perlindungan	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Kabupaten/ Kota

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
		(Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	
Perlindungan Koperasi	Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi dan kabupaten/kota
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Provinsi
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Provinsi
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Provinsi
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
Program Pemberdayaan Lembaga	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
		(Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi asokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi dan 14 Kab/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Provinsi dan 14 Kab/Kota

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
		(Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi dan 14 Kab/Kota
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi asokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Provinsi
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi dan 14 Kab/Kota
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Lokus Program
		(Kepmendagri No 050- 5889 Tahun 2021)	
	Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi asokan dan Harga Pangan		
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	

### PEMAPARAN SUB-KEGIATAN UNGGULAN

Sub-kegiatan	Penjelasan Intervensi Unggulan	Peran Provinsi	Lokus
a. Pengadaan Perlengkapan Siswa SD			
b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah SD	<b>Ditujukan untuk masyarakat miskin/tidak sekolah</b>		
c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			

## 4 PERAN DAN AKSI PERCEPATAN PENINGKATAN IPM

### 4.1 Rencana Aksi

#### 4.1.1 Usulan Aksi Percepatan IPM

Dalam rangka mempercepat peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Barat. Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan IPM Kalbar telah merumuskan strategi program dan kegiatan yang melibatkan multi-stakeholder dan multi-sektoral di lingkungan pemerintah provinsi. Selain itu, sinergitas antar level pemerintah juga bagian dari strategi. Terutama merumuskan peran pemerintah provinsi dan peran pemerintah kabupaten. Berikut rumusan masalah, strategi dan program kegiatan antar dimensi yang mempengaruhi pertumbuhan IPM:

#### A. Dimensi Usia Harapan Hidup dan Hidup Sehat

Tujuan	Strategi	Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)
AHH - Penurunan AKI dan AKB	Memperkuat kebijakan dalam mendorong private sectors untuk mendukung mobilitas akses jalan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Program Penyelenggaraan Jalan Program Fasilitasi Pengembangan KESRA pelayanan dasar	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat, dan lintas sektor tingkat daerah provinsi.  Penyelenggaraan Jalan Provinsi (PUPR)  Fasiltsai koordinasi sinkronisasi evaluasi dan capaian kierja kebijakan kesra bidang kesehatan
	Kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mendukung program posyandu prima		

Melakukan inventarisasi DTKS di tingkat kabupaten	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.  Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.  Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (DINSOS)
Mendorong insentif fiskal berbasis kinerja komponen kesehatan ke Kabupaten/Kota	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.  Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi  Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKAD)
Memperkuat agenda pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.  Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi (DPPA)
Mendukung Gerakan mahasiswa (KKN) untuk merespon komponen kesehatan dan kampanye	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

<p>pengecahan perkawinan anak</p>	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p>	<p>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</p>
<p>Pendekatan teknologi dan sosial media. Promosi pengetahuan edukasi seks, dampak perkawinan anak dan kekerasan gender</p>		
<p>Memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam mempromosikan kesehatan gizi ibu hamil dan pencegahan perkawinan anak</p>	<p>Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.</p>	<p>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</p>
<p>Pendekatan teknologi tentang promosi pencegahan pernikahan anak, edukasi seks dan STBM</p>	<p>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.</p>	<p>Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.</p>
<p>Memperkuat data tumbuh kembang Balita melalui inventarisasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak sampai ke tingkat desa</p>	<p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan</p>	<p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem</p>

AHH - Sanitasi dan Air Bersih	Pendataan Sebaran Penggunaan Sumber Air Bersih dan Sarana Sanitasi	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (PUPR) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	Memperkuat kebijakan dalam mendorong keterlibatan aktor swasta dalam peningkatan sanitasi dan air bersih	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
AHH - Cakupan Masyarakat dalam Kebersertaan JKN	Memperkuat cakupan pada JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui sumber APBD Kabupaten	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.  Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Dinsos)
	Memperkuat implementasi PERGUB 28/2022 tentang kebersertaan JKN. Memperkuat sasaran program kebersertaan JKN		
AHH - Capaian Imunisasi	Memperkuat promosi imunisasi campak di tingkat kabupaten melalui program/kegiatan kader Posyandu di tingkat desa		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Melibatkan tokoh agama/masyarakat (Kemenag) dalam promosi imunisasi campak di tingkat desa		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pendekatan teknologi tentang promosi vaksinasi untuk kesehatan dan balita		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Menggalakkan kembali kader posyandu/relawan kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

## B. Dimensi Pengetahuan

Tujuan	Strategi	Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)
Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia SD (7-12 tahun)	Meningkatkan angka partisipasi sekolah.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia SMP (13-15 tahun)		Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Meningkatkan Angka		Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Partisipasi Sekolah (APS) Usia SMA/SMK (16-18 tahun)		Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perguruan Tinggi Usia (19-24 tahun)		Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Tinggi
Pengembalian anak usia sekolah yang tidak sekolah	Meningkatkan angka partisipasi sekolah.	Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah
Ketersediaan Asrama Gratis untuk siswa SMA/SMK	Menciptakan dan menjamin tersedianya fasilitas pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Meningkatkan Rasio peserta didik terhadap guru tingkat SD	Melakukan peningkatan dan mempertahankan mutu layanan pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
Meningkatkan Rasio peserta didik terhadap guru tingkat SMP		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP
Meningkatkan Rasio peserta didik terhadap guru tingkat SMA		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMA

Meningkatkan Rasio peserta didik terhadap guru tingkat SMK		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMK
		Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Mengurangi Kasus Pernikahan Anak tertinggi		Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah
Meningkatkan Akses Paket A,B, dan C	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi			

			Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Provinsi

### C. Dimensi Standar Hidup Layak

Tujuan	Strategi	Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)
	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

			yang sumbernya dari daerah provinsi lain
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah provinsi dan kabupaten/kota lain
		Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
		Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	Mendorong pemanfaatan platform digital Nasional dan dunia untuk pengembangan e-commerce UMKM dan Koperasi daerah	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
		Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
	Fasilitasi, Pembinaan dan Penguatan Koperasi Petani/ Peternak sesuai kewenangan provinsi/ Kabupaten/ Kota	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
	Mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
		Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

	usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Masyarakat Di Bidang Kehutanan	
		Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
	Penjaminan Usaha berbasis kemitraan industri dengan usaha kecil dan mikro	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
		Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
		Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
	Mendorong dan memfasilitasi Akses KUR	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
		Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
		Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
	Memfasilitasi Sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kompetensi Klaster

	Mengidentifikasi keragaman 98 produk (makanan dan non makanan) pada kab/kota	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Daerah Provinsi
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
	Menumbuhkan Pasar Induk/ Pusat Distribusi Provinsi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
	Membangun jaringan distribusi barang dan sistem logistik kabupaten/ kota	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi asokan dan Harga Pangan
	Menyediakan informasi sistem logistik provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
	Fasilitasi Distribusi barang pokok dan barang penting dari pusat produksi ke pusat konsumsi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi asokan dan Harga Pangan
	Distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
	Monitoring implementasi road map pengendalian inflasi provinsi/ kabupaten/ kota	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
	Mengembangkan dan Memperkuat Pasar domestik untuk komoditi/produk lokal (baru)	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

	Fasilitasi farmerday hari menjual produk dan komoditi hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri, HHBK, dll yang merupakan produk lokal oleh para pelaku UMKM lokal	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi asokan dan Harga Pangan
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

## 4.2 Pembagian Peran dan Aksi

### A. Peran dan Aksi pada Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Tabel 18 Usulan peran percepatan IPM melalui aspek Umur Panjang dan Hidup Sehat

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
Usia Harapan Hidup	1. Sulitnya akses ke tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan	1. Infrastruktur 2. Tidak meratanya sebaran tenaga kesehatan 3. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tidak memadai	1. Memperkuat kebijakan dalam mendorong private sectors dan masyarakat untuk mobilitas akses jalan dan fasilitas pelayanan kesehatan.	1. Memperkuat kebijakan dalam mendorong private sectors untuk mobilitas akses jalan dan Kabupaten/Kota 2. Mendorong insentif fiskal berbasis kinerja komponen kesehatan ke Kabupaten/Kota 3. Kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mendukung program posyandu prima 4. Menggalakkan program ambulan desa. 5. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama
	2. Rendahnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang persalinan	1. Rendahnya pendidikan 2. Kurangnya sosialisasi dan promosi kesehatan	1. Memperkuat kebijakan dalam mendorong private sectors untuk mobilitas akses jalan dan	1. Pendekatan teknologi dan sosial media. Promosi pengetahuan edukasi seks, dampak perkawinan anak dan kekerasan gender

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
			fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Mendukung Gerakan mahasiswa (KKN) untuk merespon komponen kesehatan dan kampanye pencegahan perkawinan anak	2. Gerakan mahasiswa (KKN) untuk merespon komponen kesehatan
	3.Kurangnya dukungan keluarga dalam mendapatkan pertolongan di sarana Kesehatan	1.Rendahnya kemampuan ekonomi keluarga untuk mendapatkan pertolongan ke sarana kesehatan 2.Akses terhadap jaminan kesehatan yang tidak merata	1. Memperkuat implementasi kebijakan dalam mendorong private sectors dan masyarakat.	1.Memperkuat kebijakan dalam mendorong private sectors dan masyarakat.
	1.Rendahnya pengetahuan ibu hamil terhadap gizi di masa kehamilan 2.Perilaku konsumsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan 3.Rendahnya ekonomi dalam keluarga 4.Ketersedian pemenuhan kebutuhan gizi yang terbatas	1.Rendahnya pendidikan 2.Kurangnya sosialisasi dan promosi kesehatan 3.Rendahnya pendapatan keluarga 4.Distribusi produksi yang tidak merata	1.Kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mendukung program gizi. 2.Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk kampanye dan promosi kesehatan	1. Mendorong Pemkab untuk mendukung program gizi masyarakat.
	1. Menyebabkan Wasting (Balita Kurus) 2. Tingginya angka Stunting 3. Menyebabkan Under Weight (Angka Under Weight di	1.Rendahnya pendidikan 2.Kurangnya sosialisasi dan promosi kesehatan 3.Rendahnya pendapatan keluarga 4.Distribusi produksi yang tidak merata	1.Kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mendukung program gizi. 2.Melibatkan tokoh masyarakat	1. Mendukung Gerakan mahasiswa (KKN) untuk merespon komponen kesehatan. 2. Mendorong Pemkab untuk mendukung program gizi masyarakat.

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
	<p>Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar 24% (SSGI 2021), tertinggi di Melawi (28,7%) Sambas (28,2%), dan Kubu Raya (27,5%)</p> <p>4. Rendahnya Capaian ASI Eksklusif di masyarakat</p> <p>5. Baduta diberikan ASI (Air Susu Ibu merupakan makanan bayi yang paling baik, dan sebaiknya diberikan sampai anak berusia 2 tahun. Dari data Susenas 2021 menunjukkan baduta yang diberikan ASI di Kalimantan Barat sebesar 82,57% terendah di Pontianak (66,95%) Kubu Raya (75,89%) dan Bengkayang (76,147%)</p>		dan pemuka agama untuk kampanye dan promosi kesehatan	
	<p>1. Rendahnya rumah tangga yang menggunakan air minum layak</p> <p>2. Rendahnya rumah tangga yang memiliki sumber air bersih</p> <p>3. Rendahnya sarana sanitasi yang layak</p>	<p>1. Akses sumber air terbatas</p> <p>2. Minimnya pengetahuan dan kemauan masyarakat dalam menyediakan dan memanfaatkan sumber air dan sarana sanitasi yang layak</p> <p>3. Ketidakmampuan sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan air</p>		

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
		bersih dan sanitasi yang layak		
	1. Rendahnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1. Ketidakmampuan sosial ekonomi masyarakat dalam mengikuti kepesertaan JKN 2. Pengetahuan dan kemauan masyarakat dalam mengikuti kepesertaan JKN yang rendah (Merespon Persepsi Publik Soal JKN)		1. Memperkuat implementasi Pergub tentang kepesertaan JKN. Memperkuat sasaran program kepesertaan JKN
	Untuk Capaian imunisasi pada Balita yang menjadi indikator utama adalah imunisasi Campak. Karena imunisasi campak merupakan imunisasi tertakhir yang diberikan pada bayi. 1. Rendahnya capaian imunisasi campak pada Balita	1. Minimnya pengetahuan dan kemauan masyarakat tentang vaksinasi 2. Adanya penolakan di masyarakat terkait vaksinasi 3. Adanya ketakutan di masyarakat karena adanya kejadian Pasca Imunisasi (KIPI)		1. Pendekatan tokoh agama/masyarakat untuk vaksinasi 2. Pendekatan teknologi tentang promosi vaksinasi untuk kesehatan dan balita 3. Menggalakkan kembali kader posyandu/relawan kesehatan

## B. Peran dan Aksi pada Dimensi Pengetahuan

Tabel 19 Usulan Peran & Aksi percepatan IPM melalui aspek Pengetahuan

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 - 12 tahun	Penduduk usia 7-12 tahun yang bekerja.	pola pikir orang tua yang apatis terhadap pentingnya pendidikan	Pencegahan pekerja anak baik di sektor formal maupun <i>non</i> formal	Penguatan koordinasi untuk meningkatkan anak usia 7-12 tahun untuk bersekolah.
	Model pendidikan yang tidak	Keterbatasan tenaga pendidik dalam mengembangkan	Implementasi kurikulum merdeka	Implementasi kurikulum merdeka

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
	berpusat pada murid	model pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik		
	Model pendidikan yang kurang ramah anak	Implementasi pendidikan inklusif sebagaimana diamanah aturan belum dilaksanakan sepenuhnya	Implementasi kurikulum merdeka	Implementasi kurikulum merdeka
	keterbatasan SDM Guru (kualitas dan kuantitas guru)	adanya kebijakan moratorium (pengangkatan guru tidak sesuai dengan jumlah guru yang keluar)	Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi melalui KKN Tematik	Mendukung kolaborasi dengan Perguruan Tinggi melalui KKN Tematik
	Santri yang tidak terdaftar di data EMIS tingkat MI (Kemenag) dan DAPODIK (Dikbud) (Jumlah Santri yang tidak mengikuti pendidikan yang disetarakan (formal dan non formal)	Orang tua peserta didik yang tidak melapor ke kemenag	Sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala dan terpusat	Sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala dan terpusat
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun	Penduduk usia 13-15 tahun yang bekerja.	pola pikir orang tua yang apatis terhadap pentingnya pendidikan	Pencegahan pekerja anak baik di sektor formal maupun <i>non</i> formal	Penguatan koordinasi untuk meningkatkan anak usia 13-15 tahun untuk bersekolah.
	Jarak tempuh ke sekolah	Kondisi Geografi dan Demografi	Revitalisasi Peran SKB/PKBM paket B	Penguatan koordinasi pelaksanaan revitalisasi peran SKB/PKBM paket B.
	Model pendidikan yang tidak berpusat pada murid	Keterbatasan tenaga pendidik dalam mengembangkan	Implementasi kurikulum merdeka	Implementasi kurikulum merdeka

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
		model pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik		
	Model pendidikan yang kurang ramah anak	Implementasi pendidikan inklusif sebagaimana diamanah aturan belum dilaksanakan sepenuhnya	Implementasi kurikulum merdeka	Implementasi kurikulum merdeka
	Santri yang tidak terdaftar di data EMIS tingkat MTs (Kemenag) dan DAPODIK (Dikbud) (Jumlah Santri yang tidak mengikuti pendidikan yang disetarakan (formal dan non formal)	Orang tua peserta didik yang tidak melapor ke kemenag	Sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala dan terpusat	Sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala dan terpusat
	Belum adanya koordinasi antara PKBM (satdik non formal) dengan sekolah (satdik formal) dalam mendorong siswa putus sekolah untuk melanjutkan ke PKBM	Belum adanya kebijakan di daerah tentang mekanisme koordinasi antara sekolah dan PKBM dalam mengatasi anak putus sekolah, tidak melanjutkan	kebijakan di daerah tentang mekanisme koordinasi antara sekolah dan PKBM dalam mengatasi anak putus sekolah dan tidak sekolah	kebijakan di daerah tentang mekanisme koordinasi antara sekolah dan PKBM dalam mengatasi anak putus sekolah dan tidak sekolah
	keterbatasan SDM Guru (kualitas dan kuantitas guru)	adanya kebijakan moratorium (pengangkatan guru tidak sesuai dengan jumlah guru yang keluar)	Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi melalui KKN Tematik	Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi melalui KKN Tematik
			Pendataan GTK	Pendataan GTK
	Eksodus peserta didik keluar kalbar		Peningkatan kualitas sekolah (sarana dan prasarana)	Peningkatan kualitas sekolah

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi		
			KAB/KOTA	PROVINSI	
				(sarana dan prasarana)	
		pola pikir terhadap kualitas sekolah Lokal	memaksimalkan peran pemangku kepentingan pendidikan dalam membangun perspektif orang tua tentang pentingnya pendidikan	memaksimalkan peran pemangku kepentingan pendidikan dalam membangun perspektif orang tua tentang pentingnya pendidikan	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun	Penduduk usia 16-18 tahun yang bekerja.	Pola pikir orang tua yang apatis terhadap pentingnya pendidikan		Penguatan koordinasi untuk meningkatkan anak usia 16-18 tahun untuk bersekolah.	
		Keterbatasan kapasitas tenaga pendidik dalam mengembangkan model pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik		Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam mengembangkan model pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik	
		Implementasi pendidikan inklusif sebagaimana diamanah aturan belum dilaksanakan sepenuhnya	bantuan finansial untuk anak putus sekolah agar kembali ke sekolah	bantuan finansial untuk anak putus sekolah agar kembali ke sekolah	
		adanya kebijakan moratorium (pengangkatan guru tidak sesuai dengan jumlah guru yang keluar)	Revitalisasi Peran PKBM paket C	Penguatan koordinasi pelaksanaan revitalisasi peran PKBM paket C.	
		pola pikir orang tua yang apatis terhadap pentingnya pendidikan	-	Membangun asrama sekolah di daerah yang membutuhkan	
		Santri yang tidak terdaftar di data EMIS tingkat MA/MAK (Kemenag) dan DAPODIK (Dikbud) (Jumlah Santri yang tidak	Keterbatasan tenaga pendidik dalam mengembangkan model pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik	Sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala dan terpusat	Sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala dan terpusat

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
	mengikuti pendidikan yang disetarakan (formal dan non formal)			
	Belum adanya koordinasi antara PKBM (satdik non formal) dengan sekolah (satdik formal) dalam mendorong siswa putus sekolah untuk melanjutkan ke PKBM	Implementasi pendidikan inklusif sebagaimana diamanah aturan belum dilaksanakan sepenuhnya		kebijakan di daerah tentang mekanisme koordinasi antara sekolah dan PKBM dalam mengatasi anak putus sekolah dan tidak sekolah
	Eksodus peserta didik keluar kalbar	pola pikir terhadap kualitas sekolah Lokal	Perlunya memasukkan muatan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pembelajaran sekolah	Perlunya memasukkan muatan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pembelajaran sekolah
		pola pikir orang tua untuk membangun kemandirian anak	- Mengutamakan keterlibatan peserta didik dalam kampanye kesehatan reproduksi	Mengutamakan keterlibatan peserta didik dalam kampanye kesehatan reproduksi
	Perkawinan Anak	Rendahnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi.	Mengedepankan tokoh masyarakat/ adat dalam kampanye pencegahan pernikahan anak	Mengedepankan tokoh masyarakat/ adat dalam kampanye pencegahan pernikahan anak
	Minat dan Bakat	Minimnya kualitas penyelenggaraan assesment		Evaluasi dan peningkatan kualitas instrumen dan penyelenggaraan assesment
Angka Partisipas Sekolah	Penduduk usia 19-24 tahun yang bekerja	Pendapatan yang rendah.	Memaksimalkan peran pemangku kepentingan pendidikan tinggi.	Memaksimalkan peran pemangku

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
(APS) usia 19-24 tahun				kepentingan pendidikan tinggi.
	Jarak tempuh ke perguruan tinggi	Kondisi Geografi dan Demografi	Mengusulkan terbentuknya lembaga pendidikan tinggi di tingkat Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat.	Mendukung terbentuknya lembaga pendidikan tinggi di tingkat Kabupaten/Kota.
			Pemberian beasiswa di lembaga pendidikan tinggi di masing-masing Kabupaten/Kota	Pemberian beasiswa non akademik di lembaga pendidikan tinggi di masing-masing Kabupaten/Kota
			Memfasilitasi pengusulan hibah untuk pembangunan asrama dan fasilitas pendukung lembaga pendidikan tinggi di masing-masing Kabupaten/Kota	Pemberian hibah untuk pembangunan asrama dan fasilitas pendukung lembaga pendidikan tinggi di masing-masing Kabupaten/Kota
	Eksodus peserta didik keluar kalbar	Keterbatasan kualitas dan pilihan jurusan di lembaga Pendidikan Tinggi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.	-	Mendoorng peningkatan kualitas dan pilihan jurusan Pendidikan Tinggi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dengan berkoordinasi ke Kemendikbudristek.
Faktor Pesantren dan Non Pesantren	Santri yang tidak terdaftar di data EMIS (Kemenag) dan DAPODIK (Dikbud) (Jumlah Santri yang tidak mengikuti pendidikan yang disetarakan (formal dan non formal)	kultur setempat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan pada anak perempuan	Sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala dan terpusat	Sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala dan terpusat
Jenis Pendidikan yang diikuti	Jumlah sekolah yang menyediakan layanan	pola pikir terhadap kualitas sekolah Lokal	Revitalisasi Peran Pendidikan Kesetaraan melalui SPNF	Penguatan Koordinasi Pendidikan

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	Peran dan Aksi	
			KAB/KOTA	PROVINSI
penduduk usia 25+	pendidikan inklusif sangat sedikit			Kesetaraan melalui SPNF
		pola pikir orang tua untuk membangun kemandirian anak	Perlunya peningkatan pendidikan kewirausahaan berijazah pendidikan kesetaraan	Penguatan Koordinasi penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan berijazah pendidikan kesetaraan
		kultur setempat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan pada anak perempuan	Revitalisasi Pendidikan Kesetaraan melalui SPNF	Peran melalui Penguatan Koordinasi Pendidikan Kesetaraan melalui SPNF

### C. Peran dan Aksi pada Dimensi Standar Hidup Layak

Tabel 20 Usulan Peran percepatan IPM melalui Pokja Standar Hidup Layak

VARIABEL	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	STRATEGI	
			KAB/KOTA	PROVINSI
<b>Pengeluaran per kapita per tahun (PPP) yang disesuaikan</b>	Produktivitas seluruh sektor yang masih rendah dan kurang beragam	Rendahnya skala usaha (kurang ekonomis) dan belum berorientasi pasar	Meningkatkan keragaman produksi dan produktivitas hasil pertanian, perikanan, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Meningkatkan Jumlah produksi dan produktivitas hasil pertanian, perikanan, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
			Mendorong pemanfaatan platform digital nasional dan dunia untuk pengembangan e-commerce koperasi daerah	Mendorong pemanfaatan platform digital nasional dan dunia untuk pengembangan e-commerce koperasi daerah
			Memfasilitasi UMKM lokal masuk ke e-commerce	Memfasilitasi UMKM lokal masuk ke e-commerce sebanyak 1000 UMKM

			sebanyak 1000 UMKM	
			Fasilitasi, Pembinaan dan Penguatan Koperasi Petani/ Peternak/Pembudidaya ikan sesuai kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitasi, Pembinaan dan Penguatan Koperasi Petani/ Peternak/Pembudidaya ikan sesuai kewenangan provinsi
			Mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
		Rendahnya akses dan literasi keuangan masyarakat	Penjaminan Usaha berbasis kemitraan industri dengan usaha kecil dan mikro	Penjaminan Usaha berbasis kemitraan industri dengan usaha kecil dan mikro
			Mendorong dan memfasilitasi Akses KUR	Mendorong dan memfasilitasi Akses KUR
	Daya serap tenaga kerja lokal rendah	Kompetensi Tenaga kerja belum memenuhi standar dunia usaha	Menyediakan Lembaga pelatihan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan tenaga kerja di kab/kota (cek kewenangan)	Memfasilitasi Sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha
	Kelangkaan barang dan kemahalan harga barang	Distribusi barang dan logistik belum optimal	Mengkaji ulang hasil identifikasi keragaman 96 produk (makanan dan non makanan) pada kab/kota	Mengidentifikasi keragaman 96 produk (makanan dan non makanan) pada kab/kota
			Membangun jaringan distribusi barang dan sistem logistik kabupaten/ kota	Menumbuhkan Pasar Induk/ Pusat Distribusi Provinsi

			Menyediakan informasi sistem logistik Kabupaten / Kota	Menyediakan informasi sistem logistik provinsi
		Kenaikan biaya/distribusi barang	Distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah	Fasilitasi Distribusi barang pokok dan barang penting dari pusat produksi ke pusat konsumsi
		Pengendalian inflasi belum optimal	Monitoring implementasi road map pengendalian inflasi kabupaten/kota	Monitoring implementasi road map pengendalian inflasi provinsi
	Rendahnya permintaan hasil produk lokal	Harga dan kualitas Produksi dalam daerah yang kurang kompetitif	Fasilitasi hari pasar/hari menjual produk hari menjual produk dan komoditi hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri, HHBK, dll yang merupakan produk lokal oleh para pelaku UMKM lokal.	Mengembangkan dan Memperkuat Pasar domestik untuk komoditi/produk lokal

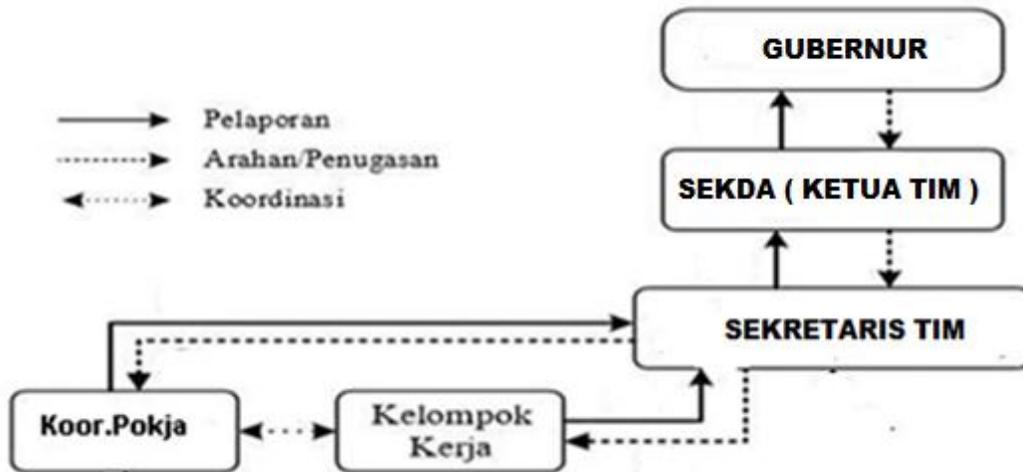
## 5 MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu kegiatan penentu keberlanjutan program dan kegiatan Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga merupakan salah satu penentu keberhasilan seluruh program dan kegiatan secara setara, efektif, efisien, dan ekonomis. Proses monitoring dan evaluasi tentunya harus inklusif, melibatkan semua pihak dan memadukan penjelasan data kuantitatif dan kualitatif.

Disamping itu, kegiatan monitoring dan evaluasi memastikan agar strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek manajemen dan tata kelola pemerintahan kegiatan ini dilakukan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penerapan rencana serta kesesuaian output dengan target yang diharapkan, yaitu peningkatan dalam dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak. Mekanisme pelaporan hasil rencana aksi dilakukan dengan cara :

1. Kelompok kerja pada Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat setiap 6 bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian Rencana Aksi baik pelaksanaan program tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Program dan kegiatan yang dimaksud merupakan program yang mendukung ketercapaian setiap target dan indikator pembentuk IPM serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan.
2. Laporan hasil kegiatan yang diterima Sekretaris Daerah selaku ketua Tim akan dilaporkan kepada Gubernur sebagai capaian Rencana Aksi IPM.
3. Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah. Hal ini karena program, dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk membantu percepatan peningkatan IPM di provinsi Kalimantan Barat bersifat sukarela (voluntary) maka mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme "Penilaian Diri Sukarela (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui self assessment tool (SAT) yang disepakati.

5. Pelaporan disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditempat kegiatan dilaksanakan dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Tim.



Gambar 21. Alur monev dan pelaporan

6. Untuk membantu pengembangan kerangka pengukuran kinerja, LAMPIRAN 2: MATRIK KERANGKA LOGIS menyediakan dasar pengembangan kerangka pengukuran kinerja dan untuk memudahkan melihat hubungan kausal antar tujuan berdasarkan kerangka waktu.

## **6 PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat, merupakan penjabaran dari RPJMD Kalbar 2018-2023. serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026 serta sebagai bahan Perencanaan di Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah provinsi Kalimantan barat terkait IPM dalam upaya pencapaian prioritas nasional. Selain itu, dokumen ini dapat menjadi dasar atau acuan untuk perangkat daerah di pemerintah propinsi Kalbar serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan kegiatannya, untuk mencapai target indikator pembangunan manusia. Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada rencana aksi ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan selanjutnya.

## LAMPIRAN 1: MATRIK RENCANA AKSI

[LAMPIRAN 1 RENAKSI.xlsx](#)

## **LAMPIRAN 2: MATRIK KERANGKA LOGIS**

[LAMPIRAN II KERANGKA LOGIS.xlsx](#)

LAMPIRAN I RENCANA AKSI DIMENSI UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT

Tujuan	Strategi	Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan (Work Flow)	Lokus Program	Output	Satuan	Baseline (2021)	Target 2023	Target 2024	Target 2025	APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	APRDes	Swasta	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Desa	Swasta
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Melakukan inventarisasi DTKS di tingkat kabupaten	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi. khusus data AKI dan AKB.	Koordinasi dengan sektor terkait untuk validasi data DTKS (Dinas Dukcapil, Dinkes, BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial).	Mempawah, Sintang, Bengkayang, Kubu Raya, Melawi, Sekadau dan Kayong Utara	Jumlah data dan informasi yang tersedia	3 dokumen		30	30	30		✓					Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor pendataan DTKS yang valid dan mutakhir	Melaksanakan monitoring dan pengawasan (Dinsos, Dukcapil)	Melaksanakan permutahran data ART dan status sosial ekonomi	
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Membangun kemitraan dengan Swasta dan DUDI	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat, dan lintas sektor tingkat daerah provinsi.	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan unsur masyarakat, swasta dan Pendidikan tinggi dalam upaya advokasi kesehatan	Mempawah, Sintang, Bengkayang, Kubu Raya, Melawi, Sekadau dan Kayong Utara	Jumlah MoU dengan swasta dan DUDI	Dokumen	0					✓	✓		✓		Bappeda koordinasi dengan Bappeda Kabupaten / Kota untuk menyediakan kerangka kebijakan mendorong peran swasta dalam pembangunan akses fasyankes	Menyusun kerrangka kebijakan keterlibatan swasta dalam pembangunan akses fasyankes termasuk jalan.	Memfasilitasi peran swasta dalam pembangunan akses fasyankes	Terlibat aktif dalam pembangunan akses fasyankes termasuk jalan
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Memperkuat agenda pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif.	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan melalui deteksi dini penyakit menular (Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Disnakertran)	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan deteksi dini penyakit menular	Persentase	0	25%	75%	100%	✓	✓					Monitoring dan evaluasi Germas Hidup Sehat	Kabupaten/Kota menyusun kebijakan Germas Hidup Sehat, melaksanakan gerakan dan monitoring	Menyusun Perdes Germas dan melaksanakan kegiatan	
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Memperkuat agenda pelayanan kesehatan masyarakat			Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif.	Pemeriksaan deteksi dini penyakit tidak menular (Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Disnakertran)	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan deteksi dini tidak menular	Dokumen	0	25%	75%	100%	✓	✓					Melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten / Kota	Melaksanakan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular		
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Memperkuat agenda pelayanan kesehatan masyarakat			Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan.	Membuat kebijakan Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan Sehat Nyaman Aman (Dinas Kesehatan, Dinas Trantibum, DLHK, Dinas Perkim, Dinas PU dan Satpol PP)	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Persentase Kabupaten/Kota memiliki peraturan dan kebijakan GERMAS Sadar Lingkungan	Dokumen	0	25%	75%	100%	✓	✓					Monitoring dan evaluasi Gerakan sadar lingkungan sehat nyaman dan aman	Kabupaten/Kota menyusun kebijakan Gerakan sadar lingkungan sehat nyaman dan aman	Menyusun Perdes Berakan sadar lingkungan sehat nyaman dan aman	
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Memperkuat agenda pelayanan kesehatan masyarakat			Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat.	Membuat kebijakan Gerakan Sadar Gizi Masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan.	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Prevelansi wasting pada Balita	0,3%	10%	7,3%	7%	6,7%	✓	✓					Monitoring dan evaluasi Gerakan sadar gizi masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan	Kabupaten/Kota menyusun kebijakan Gerakan sadar gizi masyarakat dengan memanfaatkan lahan dan pekarangan	Menyusun Perdes sadar gizi masyarakat dengan memanfaatkan lahan dan pekarangan	
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Memperkuat agenda pelayanan kesehatan masyarakat			Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Laporan Monitoring dan evaluasi	Dokumen	0	2	2	2		✓					Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas, efisiensi dan dampak pelaksanaan kurikulum pada jenjang pendidikan menengah dan PLB	Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas, efisiensi dan dampak pelaksanaan kurikulum pada jenjang pendidikan PAUD dan Dasar		
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Memperkuat agenda pelayanan kesehatan masyarakat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kerjasama Pelaksanaan sosialisasi kesehatan alat reproduksi, dampak perkawinan anak dan kekerasan gender (pihak swasta dan organisasi masyarakat)	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Jumlah dan peserta sosialisasi	Dokumen	0	3	3	3	✓	✓					Berkoordinasi dengan pihak Kabupaten / Kota dalam mengidentifikasi ormas dan pihak swasta yang berkompeten dalam kerjasama sosialisasi	Menyusun kerangka kerjasama dengan ormas dan swasta dalam sosialisasi		Menjadi pelaksana sosialisasi

Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Meningkatkan ketersediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak sampai ke tingkat desa		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Diseminasi Informasi Pelayanan atas tumbuh kembang Balita melalui inventarisasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak sampai ke tingkat desa kepada anggota dewan perwakilan rakyat	Sekadaw, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.	Jumlah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan usia produktif	Persentase	0	100	100	100	✓	✓					Mengolah data Buku Kesehatan Ibu dan Anak untuk presentasi kepada anggota DPRD Provinsi				
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Meningkatkan ketersediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak sampai ke tingkat desa			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cetak buku Informasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak sampai ke tingkat desa melalui dana Pokir anggota Dewan Perwakilan	Sekadaw, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.	Jumlah buku kesehatan ibu dan anak yang dicetak	Eksemplar	0	DK	DK		✓	✓					Berkoordinasi dengan DPRD Provinsi dalam menganggarkan kebutuhan pencetakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam menentukan kebutuhan Buku Kesehatan Ibu dan Anak			
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Meningkatkan ketersediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak sampai ke tingkat desa			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembuatan Aplikasi Mobile Sistem Peringatan Kehamilan dan Kelahiran (Diskominfo, penyedia jasa layanan selular)	Sekadaw, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.	Tersusunnya aplikasi mobile	Siklus Aplikasi	Tidak tersedia	Pengembangan dan uji coba	Sosialisasi	Sosialisasi	✓	✓					Menyusun kerangka pengembangan dan anggaran pengembangan sistem peringatan kehamilan dan kelahiran	Melaksanakan pelatihan pelatih kepada kader pos yandu dalam penggunaan aplikasi mobil sistem peringatan kehamilan dan kelahiran		Pengembang / Developer aplikasi	
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Meningkatkan kinerja Kabupaten / Kota melalui insentif	<b>Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.</b>	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan / program peningkatan AHH	Mempawah, Sintang, Bengkayang, Kubu Raya, Melawi, Sekadaw dan Kayong Utara	Jumlah kebijakan dan instrumen kinerja khusus komponen kesehatan	1 dokumen		1	0	0		✓					Menyusun kebijakan penilaian kinerja dan pemberian reward untuk Kabupaten/Kota dalam peningkatan AHH	Meningkatkan kinerja dan menyediakan laporan / data untuk proses penilaian	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja untuk mendukung AHH	Menyelenggarakan kegiatan dan pemberian / penjualan produk suplemen	
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan alat reproduksi	<b>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan (terintegrasi dengan KKN Tematik IPM melalui kurikulum STBM).	Koordinasi Dinas Kesehatan dengan Perguruan Tinggi untuk memasukkan isu kesehatan dalam kegiatan KKN mahasiswa	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Persentase Desa/Kelurahan ODF (pada lokasi KKN Tematik IPM)	5%	25%	30%	35%		✓	✓									
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan alat reproduksi			Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Melakukan pelatihan untuk para guru tentang kesehatan alat reproduksi untuk para siswa	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Jumlah guru yang dilatih	Orang	0%	25%	50%	100%		✓					Melaksanakan pelatihan kurikulum kepada guru jenjang pendidikan menengah dan PLB	Melaksanakan pelatihan kurikulum kepada guru jenjang pendidikan PAUD dan Dasar			
Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan alat reproduksi			Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Membuat kurikulum modul kesehatan alat reproduksi untuk siswa (PAUD sampai dengan pendidikan menengah) leading sektor Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, melibatkan PKK, Dinas PPPA, Tokoh Masyarakat, Akademisi.	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Tersusunnya kurikulum	Jenjang Pendidikan	0%	Tersusunnya Kurikulum	Uji coba	Replikasi		✓					Menyusun kurikulum bersama dinas terkait dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan menerapkan kurikulum pada jenjang satuan pendidikan menengah dan PLB	Mengadaptasi kurikulum Provinsi untuk diterapkan pada satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan dasar dan Kesetaraan			

Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan alat reproduksi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sebagai ajang promosi pengetahuan kesehatan alat reproduksi, dampak perkawinan anak dan kekerasan gender (pihak swasta dan organisasi masyarakat)	Ketapang, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Sintang, Kayong Utara dan Sanggau.	Jumlah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan usia produktif	Persentase	78,57%	100	100	100	✓	✓				Menyusun kebijakan, sosialisasi pada OMS di level propinsi,	Menyusun kebijakan, sosialisasi pada OMS di level kabupaten	Menyusun kebijakan, sosialisasi pada OMS di level desa	
Meningkatkan akses sumber air bersih dan sanitasi yang sehat	Meningkatkan peran serta swasta dan DUDI dalam akses sumber air bersih			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengadakan pertemuan dengan melibatkan sektor swasta dengan output MOU untuk penyediaan sebaran penggunaan Air Bersih	Kayong Utara, Landak, Sanggau, Mempawah, Ketapang	Jumlah MoU	Dokumen					✓	✓				Menyusun kerangka pertemuan dengan swasta dan DUDI			Menghadiri pertemuan dan menandatangani MoU
Meningkatkan akses sumber air bersih dan sanitasi yang sehat	Meningkatkan peran serta swasta dan DUDI dalam akses sumber air bersih			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pemerintah menyiapkan reward untuk sektor swasta yang berpartisipasi aktif untuk penyediaan air Bersih di daerah	Kayong Utara, Landak, Sanggau, Mempawah, Ketapang	Jumlah DUDI / Swasta mendapatkan reward	Dokumen					✓	✓				Menyusun kebijakan dan peraturan sebagai kerangka penghargaan dan kompensasi atas peran aktif swasta dalam akses air bersih			Mendukung program akses air bersih Pemerintah Daerah melalui mekanisme CSR, penyediaan jasa dan bentuk kemitraan lainnya
Meningkatkan akses sumber air bersih dan sanitasi yang sehat	Pendataan Sebaran Penggunaan Sumber Air Bersih			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengadakan sosialisasi dengan data data kesenjangan akses untuk penyediaan data dan sebaran penggunaan Air Bersih di daerah sekaligus mendapatkan data kesiapan bantuan dari pihak swasta untuk masalah tersebut.	Kayong Utara, Landak, Sanggau, Mempawah, Ketapang	Persentase sarana air minum yang diawasi kualitasnya sesuai standar	Persentase	59%	69%	74%	79%	✓	✓				Menyusun kerangka kerjasama dengan swasta, bekerjasama dengan Dinas PUPR dalam penyusunan kesenjangan akses air bersih			Swasta dan DUDI menjadi donatur atau menyediakan jasa layanan air bersih
Meningkatkan dan memperluas cakupan JKN	Memperkuat cakupan pada JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui sumber APBD Kabupaten	<b>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Koordinasi untuk memperkuat data dan validasi data untuk memperkuat kepesertaan Jamkesmas (dari provinsi ke pemerintah kabupaten/kota) . Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS kesehatan, Biro Kesra)	Sambas, Sanggau, Bengkayang, Ketapang	Database calon penerima JKN yang dibayar pemerintah	5.000 orang (rasionalisasi dukungan APBD Provinsi terhadap jumlah PBI di Kabupaten)	1.796.508 orang	5.000 orang	10,000 orang	15,000 orang	✓	✓				Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan dan Biro Kesra untuk meningkatkan akurasi dan validitas data	Melaksanakan koordinasi dengan pihak operator di Desa / Kelurahan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data	Melaksanakan pemutakhiran data sesuai kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data	
Meningkatkan dan memperluas cakupan JKN	Memperkuat implementasi PERGUB 28/2022 tentang kepesertaan JKN, Memperkuat sasaran program kepesertaan JKN			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sosialisasi PERGUB 28/2022 tentang kepesertaan JKN dengan tujuan Memperkuat sasaran program kepesertaan JKN	Sambas, Sanggau, Bengkayang, Ketapang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan peserta	Jumlah kegiatan dan orang	0 DK	DK	DK	DK	✓	✓				Menyusun kerangka sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi di Provinsi kepada Dinas relevan pada jenjang Provinsi dan Kabupaten / Kota	Menghadiri sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten / Kota	Menghadiri sosialisasi dan memutakhirkan data JKN untuk meningkatkan akurasi dan validitas data	
Meningkatkan dan memperluas akses vaksinasi	Melibatkan tokoh agama/masyarakat (Kemenag) dalam promosi imunisasi campak di tingkat desa		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota	Sosialisasi Pentingnya Imunisasi kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat	Mempawah, Ketapang, Pontianak, Kayong Utara, Singkawang	Jumlah tokoh terlibat	Jumlah	0%	DK	DK	DK	✓	✓				Mengidentifikasi tokoh, menyusun bahan dan kerangka sosialisasi, melaksanakan sosialisasi pada jenjang Provinsi.	Mengidentifikasi tokoh, menyusun bahan dan kerangka sosialisasi, melaksanakan sosialisasi pada jenjang Kabupaten / Kota	Mengidentifikasi tokoh, menyusun bahan dan kerangka sosialisasi, melaksanakan sosialisasi pada jenjang Desa / Kelurahan	Mendukung program sosialisasi dengan menyediakan informasi dan jasa layanan imunisasi

Meningkatkan dan memperluas akses vaksinasi	Pendekatan teknologi tentang promosi vaksinasi untuk kesehatan dan balita		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Sosialisasi aplikasi Peduli Lindungi - komponen Imunisasi Anak	Mempawah, Ketapang, Pontianak, Kayong Utara, Singkawang	14 kabupaten kota	Jumlah	0%	DK	DK	DK	✓	✓					Menyusun rencana aksi sosialisasi peduli lindungi komponen imunisasi anak melalui berbagai strategi dan media	Menyusun rencana aksi sosialisasi peduli lindungi komponen imunisasi anak melalui berbagai strategi dan media	Mendukung Pemerintah Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan sosialisasi aplikasi imunisasi anak	Mendukung program sosialisasi dengan menyediakan informasi dan jasa layanan imunisasi
---	---	--	---	--	--	---	-------------------	--------	----	----	----	----	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

LAMPIRAN I RENCANA AKSI DIMENSI PENGETAHUAN

Tujuan	Strategi	Jenjang	Program (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan (Work Flow)	Lokus Program	Output	Sasaran	Rencana (D61)	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Instansi Pelaksana (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) (Belum dibagi antara tugas pemprov dan penkab/pemkot)	Akumulasi indikatif alokasi anggaran (Rp Juta)	APBN	APBD Provinsi	APBD Kota / Kabupaten	APBDn	Swasta	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Desa	Swasta
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SD Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa SD	Pengadaan Baju Seragam, Tas, Sepatu dan Atribut lainnya berdasarkan usulan sekolah merunut data siswa kurang mampu.	Kab Sanggau, Kab Melawi dan Kab Kayong Utara	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Peserta Didik	N/A	15872,0	19841,0	23809,0	Dinas Pendidikan Kabupaten	44.641.500.000,00			✓			Penguatan koordinasi untuk meningkatkan akses pendidikan anak usia 7-12 tahun	Mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun anggaran kebutuhan pengadaan seragam dan alat tulis	Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung pengadaan siswa 7-12 di wilayah Desa	Swasta terkait sarpras pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam promosi dan penjualan	
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SD Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah SD	Pemberian biaya tidak langsung kepada peserta didik	Kab Sanggau, Kab Melawi dan Kab Kayong Utara	Jumlah peserta didik yang menerima BOP	Peserta Didik	N/A	794,0	1587,0	2381,0	Dinas Pendidikan Kabupaten	952.400.000,00			✓			Penguatan koordinasi untuk meningkatkan akses pendidikan anak usia 7-12 tahun	Mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun anggaran kebutuhan identifikasi siswa dengan validasi data	Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung identifikasi siswa dengan validasi data		
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMP Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP	Pengadaan Baju Seragam, Tas, Sepatu dan Atribut lainnya berdasarkan usulan sekolah merunut data siswa kurang mampu.	Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Kapuas Hulu	Jumlah Perlengkapan Peserta Sekolah Menengah Didik yang Tersedia	Peserta Didik	N/A	10293	12866	15439	Dinas Pendidikan Kabupaten	28.948.500.000,00			✓			Penguatan koordinasi untuk meningkatkan akses pendidikan anak usia 7-12 tahun	Mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun anggaran kebutuhan pengadaan seragam dan alat tulis	Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung pengadaan siswa 7-12 di wilayah Desa	Swasta terkait sarpras pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam promosi dan penjualan	
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMP Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pemberian biaya tidak langsung kepada peserta didik	Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	N/A	515	1029	1544	Dinas Pendidikan Kabupaten	2.470.400.000,00			✓			Penguatan koordinasi untuk meningkatkan akses pendidikan anak usia 7-12 tahun	Mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun anggaran kebutuhan biaya tidak langsung	Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung identifikasi siswa dengan validasi data		
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMP Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Provinsi)	Pengadaan Baju Seragam, Tas, Sepatu dan Atribut lainnya berdasarkan usulan sekolah merunut data siswa kurang mampu.	14 Kabupaten/ Kota (Prioritas Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Melawi)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Atas yang Menerima Perlengkapan Peserta Didik	Peserta Didik	10000	10806	10806	10806	Dinas Pendidikan Provinsi	27.782.226.000,00			✓			Bersama Kabupaten / Kota mengidentifikasi dan menyusun anggaran kebutuhan pengadaan seragam dan alat tulis	Mendukung Pemerintah Provinsi mengidentifikasi kebutuhan dan menyalurkan kepada siswa SD dan SMP		Swasta terkait sarpras pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam promosi dan penjualan	
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Pembiayaan Beasiswa Pendidikan berdasarkan usulan sekolah merunut data siswa kurang mampu		Jumlah Peserta Didik Sekolah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	13567	134895	134895	134895	Dinas Pendidikan Provinsi	373.928.940.000,00			✓			Mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun anggaran kebutuhan beasiswa untuk keluarga miskin	Mendukung Pemerintah Provinsi memvalidasi calon penerima dari keluarga miskin	Mendukung Pemerintah Provinsi memvalidasi calon penerima dari keluarga miskin		
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Baju Seragam, Tas, Sepatu dan Atribut lainnya berdasarkan usulan sekolah merunut data siswa kurang mampu.		Jumlah Peserta Didik Sekolah Kejuruan yang Menerima Perlengkapan	Peserta Didik	11366	9711	9711	9711	Dinas Pendidikan Provinsi	30.065.256.000,00			✓			Mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun anggaran kebutuhan pengadaan seragam dan alat tulis			Swasta terkait sarpras pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam promosi dan penjualan	
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Pembiayaan Beasiswa Pendidikan berdasarkan usulan sekolah merunut data siswa kurang mampu		Jumlah Peserta Didik Sekolah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	53333	59180	59180	59180	Dinas Pendidikan Provinsi	192.098.280.000,00			✓			Mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun anggaran kebutuhan biaya tidak langsung	Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi mendukung identifikasi siswa dengan validasi data	Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung identifikasi siswa dengan validasi data		

Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Asrama Sekolah	(1) Identifikasi siswa yang menempuh jarak lebih dari 4 jam; (2) Lokasi pembangunan asrama dilingkungan sekolah; (3) Berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan; (4) Berdasarkan usulan satuan pendidikan; (5) Usulan kegiatan dan anggaran oleh OPD berdasarkan	Kab Landak, Kab Melawi, Kab Kayong Utara	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	24	1	2	3	Dinas Dikbud Prov Kalbar	9.000.000.000,00	✓					Menyusun dan menetapkan kebutuhan anggaran			Pelaksana / kontraktor
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Asrama Sekolah	(1) Berdasarkan usulan satuan pendidikan; (2) Usulan kegiatan dan anggaran oleh OPD berdasarkan usulan satuan pendidikan; (3) Pelaksanaan pembangunan.		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	24			2	Dinas Dikbud Prov Kalbar	400.000.000,00	✓					Menyusun dan menetapkan kebutuhan anggaran			Pelaksana / kontraktor
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Asrama Sekolah	(1) Identifikasi siswa yang menempuh jarak lebih dari 4 jam; (2) Lokasi pembangunan asrama dilingkungan sekolah; (3) Berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan; (4) Berdasarkan usulan satuan pendidikan; (5) Usulan kegiatan dan anggaran oleh OPD berdasarkan		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	13	1	2	3	Dinas Dikbud Prov Kalbar	9.000.000.000,00	✓					Menyusun dan menetapkan kebutuhan anggaran			Pelaksana / kontraktor
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Asrama Sekolah	(1) Berdasarkan usulan satuan pendidikan; (2) Usulan kegiatan dan anggaran oleh OPD berdasarkan usulan satuan pendidikan; (3) Pelaksanaan pembangunan.		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	13			2	Dinas Dikbud Prov Kalbar	400.000.000,00	✓					Menyusun dan menetapkan kebutuhan anggaran			Pelaksana / kontraktor
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Tinggi	Peningkatan Advokasi, Koordinasi dan Sosialisasi Pendidikan	Koordinasi Pendidikan Perguruan Tinggi di Kab/Kota	14 Kabupaten/ Kota (Prioritas Kab Sekadau, Kab Melawi, Kab Kayong Utara)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Advokasi, Koordinasi dan Sosialisasi Pendidikan	Kegiatan	N/A	3	3	3	Perguruan Tinggi	600.000.000,00	✓					Koordinasi; kerjasama dengan PT; beasiswa; kkn tematik			
Meningkatkan akses pendidikan	Menciptakan dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan serta akses yang mudah dijangkau.	Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Tinggi	Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi	Pembiayaan Pendidikan berdasarkan prestasi Akademis dan non Akademis		Jumlah Mahasiswa yang mendapat Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi	Orang	N/A	1700	1700	1700	Perguruan Tinggi, Pemprov, Pemkab	10.200.000.000,00	✓	✓	✓	✓	Menyeleksi, menetapkan calon penerima dan menyalurkan beasiswa				

Meningkatkan akses pendidikan	Pencegahan pernikahan anak	Dasar & Menengah	Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Melalui Perjanjian Kerjasama pencegahan dan penanggulangan pernikahan anak dengan Kabupaten angka Pernikahan Anak Tinggi	Kab Ketapang, Kab. Sambas, Kab Sintang dan Kab Melawi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	N/A	4				Dinas PPPA Kab/Kota	400.000.000,00	✓					Memfasilitasi dan koordinasi program dan strategi pencegahan dan intervensi anak dalam pernikahan	Memfasilitasi, berkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan intervensi anak dalam pernikahan		
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	Digitalisasi PKBM dan SKB	Kab Melawi, Kab Sekadau, Kab Bengkayang, Kab Mempawah, Kota Pontianak dan Kab Kayong Utara	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Unit	48835		9767	14651	Dinas Dikbud Kab/Kota	48.836.000.000,00	✓						Penguatan koordinasi untuk meningkatkan akses pendidikan non formal Program Kesetaraan	Mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun anggaran kebutuhan digitalisasi pembelajaran dan bahan ajar		Swasta terkait sarpras digital pendidikan sebagai kontraktor
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Dana Stimulan bagi Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan berdasar Pergub No. 83 Tahun 2021 tentang Percepatan Peningkatan IPM Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	N/A	1	1	1	BKAD bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar	49.335.000.000,00	✓			✓			Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan pembagian bantuan stimulan	Menyusun laporan pembagian bantuan stimulan sesuai ketentuan Pergub 21 / 2021		
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	Pembangunan sarana dan prasana Program Kesetaraan		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	48835	4884	24418	48835	Dinas Dikbud Kab/Kota	390.685.000.000,00		✓					Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menentukan SKB / PKBM penerima bantuan sarpras	Melaksanakan seleksi dan menentukan SKB / PKBM penerima bantuan sarpras		
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Penyaluran Dana Stimulan bagi Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan berdasar Pergub No. 83 Tahun 2021 tentang Percepatan Peningkatan IPM Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	48835		24418	48835	Dinas Dikbud Kab/Kota	366.265.000.000,00		✓		✓			Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menentukan prioritas penerima bantuan stimulan	Berkoordinasi dengan SKB dan PKBM menentukan prioritas penerima bantuan stimula		

Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Pemanfaatan Laboratorium/Bengkel dengan SMK oleh SKB/PKBM Kab/Kota dan fasilitasi sarana pertemuan komunitas peserta didik program diktara		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	48835		24418	48835	Dinas Dikbud Kab/Kota	366.265.000.000,00			✓	✓	Melaksanakan sosialisasi Pergub Kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota	Melaksanakan sosialisasi kepada SKB dan PKBM		
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendataan dan Rekrumen Tenaga Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	977	98	489	977	Dinas Dikbud Kab/Kota	28.152.000.000,00			✓	✓		Menyusun pemetaan tutor dan pelatih, dan mengusulkan penambahan kebutuhan sesuai kemampuan fiskal daerah		
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Desain Ulang Tata Interior Bangunan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	81	8	41	81	Dinas Dikbud Kab/Kota	1.300.000.000,00			✓			Menyusun asesment kebutuhan rehab / pemeliharaan, menyeleksi satuan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan / rehab		
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Desain Ulang Tata Interior Bangunan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	81	8	41	81	Dinas Dikbud Kab/Kota	1.300.000.000,00			✓			Menyusun asesment kebutuhan rehab / pemeliharaan, menyeleksi satuan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan / rehab		
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganan pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pelayanan Informasi Publik	Tersediannya Informasi Publik Melalui Sesuai Media terhadap Program-Program Peningkatan IPM di Kab/Kota	14 Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Informasi Publik	Dokumen	N/A	1	1	1	Dinas Kominfo Provinsi	4.507.544.750,00			✓			Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan program rehab / pemeliharaan		

Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan fokus penanganannya pada penduduk usia 25 tahun ke atas dalam peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program pendidikan kesetaraan	Pendidikan Nonformal	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggaranya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	OPD/BHI Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen Hasil Pemfataan Data Kependudukan	Dokumen	21	31	33	33	Dinas Dukcapil Provinsi	180.000.000,00	✓						Dinas terkait menyusun kesepakatan pemanfaatan data bersama	Mendukung Pemerintah Kabupaten / Kota dalam memutakhirkan data ATS dan DTS	
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SD Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sosialisasi dan pelatihan pendidikan inklusi	Kab Sanggau, Kab Melawi dan Kab Kayong Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Sekolah	N/A	60	60	60	Dinas Pendidikan Kabupaten	9.000.000.000,00	✓					Memfasilitasi dan membiayai GTK di SLB sebagai pelatih/pembina pada Kabupaten / Kota yang membutuhkan dukungan Dinas Pendidikan Provinsi	Melaksanakan asesmen kebutuhan GTK inklusi, menyusun program pelatihan sekolah inklusi, menyusun program pelatihan GTK untuk anak penyandang disabilitas		
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMP Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sosialisasi dan pelatihan pendidikan inklusi	Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Kapuas Hulu	Jumlah Sekolah Menengah yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Sekolah	N/A	30	30	30	Dinas Pendidikan Kabupaten	6.750.000.000,00	✓					Memfasilitasi dan membiayai GTK di SLB sebagai pelatih/pembina pada Kabupaten / Kota yang membutuhkan dukungan Dinas Pendidikan Provinsi	Melaksanakan asesmen kebutuhan GTK inklusi, menyusun program pelatihan sekolah inklusi, menyusun program pelatihan GTK untuk anak penyandang disabilitas		
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMP Sederajat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Kab Sanggau, Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kab Melawi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan SMP	Laporan	N/A		1	1	Dinas Dikbud Kab/Kota	150.000.000,00	✓					Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan program pelatihan			
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMP Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	d. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Penyelenggaraan lomba akademik dan non akademik	Kab Sanggau, Kab Sintang dan Kab Kapuas Hulu	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	N/A	515	1029	1544	Dinas Pendidikan Kabupaten dan CSR	926.400.000,00	✓	✓				Menyusun penganggaran dan kerangka pelaksanaan dan kerjasama dengan pihak swasta dan pilantropi		Menyusun anggaran dan mematuhi kerangka pelaksanaan dari Dinas Kabupaten / Kota	
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Diadakan lomba akademik maupun non akademik		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	N/A	1163	2325	3488	Dinas Pendidikan Provinsi	2.790.400.000,00	✓					Menyusun penganggaran dan kerangka pelaksanaan dan kerjasama dengan pihak swasta dan pilantropi			

Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Diadakan lomba prestasi baik akademik maupun non akademik		Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	N/A	683	1366	2049	Dinas Pendidikan Provinsi dan Lembaga Filantropi	1.639.200.000,00		✓		✓				Menyusun anggaran dan mematuhi kerangka pelaksanaan dari Dinas Kabupaten / Kota
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMA Sederajat			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1	10	14	19	Dinas Dikbud Prov Kalbar	1.099.080.000,00		✓						Menyusun asesmen kebutuhan pelatihan, kerangka pelatihan dan penganggaran
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMA Sederajat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMA	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMA	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Kab Sambas, Kab Sanggau dan Kab Mempawah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	N/A		1	1	Dinas Dikbud Prov Kalbar	200.000.000,00		✓					Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan program pelatihan	
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMA Sederajat	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	N/A		450	450	Dinas Dikbud Prov Kalbar	301.500.000,00		✓					Menyusun asesmen kebutuhan pelatihan, kerangka pelatihan dan penganggaran	
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMA Sederajat		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	N/A		350	350	Dinas Dikbud Prov Kalbar	314.300.000,00		✓					Menyusun asesmen kebutuhan pelatihan, kerangka pelatihan dan penganggaran	
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	SMA Sederajat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMK	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMK	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Kab Sambas, Kab, Sanggau, Kab Bengkayang Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	N/A		1	1	Dinas Dikbud Prov Kalbar	200.000.000,00		✓					Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan program pelatihan	

Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	Pendidikan Nonformal	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Sertifikasi Peserta Didik Program Pendidikan Kesetaraan		Proses Pelaksanaan Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Orang	N/A	60	150	300	Dinas Nakertrans Prov Kalbar dan Dinas Nakertrans Kab/ Kota	2.727.326.400,00		✓	✓		✓	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga sertifikasi	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga sertifikasi	Lemaba Sertifikasi melaksanakan sertifikasi pada kompetensi tertentu yang dilaksanakan SKB / PKBM	
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	Pendidikan Nonformal	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	977	98	489	977	Dinas Dikbud Kab/Kota	4.692.000.000,00			✓		✓	Menyusun asesmen kebutuhan pelatihan, kerangka pelatihan dan penganggaran		Pihak swasta dan atau lembaga pelatihan menjadi pelaksana (kontraktor)	
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	Pendidikan Nonformal	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Kab Sambas, Kab Ketapang, Kota Pontianak, Kab Kubu Raya, Kab Sintang dan Kab Sekadau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	N/A		1	1	Dinas Dikbud Kab/Kota	100.000.000,00			✓			Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan program pelatihan			
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	Pendidikan Nonformal	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Pelatihan Kewirausahaan bagi Peserta Didik Program Diktara		Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	N/A	20	180	800	Dinas Porapar Prov Kalbar	448.541.600,00		✓			✓	Melaksanakan asesmen kebutuhan pelatihan kewirausahaan, penganggaran dan penyaluran anggaran kepada pihak ke 3 (swasta)		Lemaba pelatihan dan atau swasta menjadi kontraktor atau penyedia peningkatan kapasitas	
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	Pendidikan Nonformal	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pembinaan Kewirausahaan Peserta Didik Wanita Program Diktara		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan n Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan	N/A	1	1	1	Dinas PPPA Prov Kalbar	611.955.200,00		✓				Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan program pelatihan			
Meningkatkan mutu layanan pendidikan	Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan	Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Tinggi	KKN Tematik IPM	Terlaksananya KKN Themaik berdasarkan Buku Panduan KKN Tematik IPM		Jumlah Mahasiswa yang mengikuti KKN Tematik IPM	Orang	N/A	656	722	794	Perguruan Tinggi	2.172.000.000,00	✓			✓			Memfasilitasi KKN di lokasi (desa) sasaran		
Meningkatkan tata kelola satuan pendidikan	Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi program satuan pendidikan	Pendidikan Nonformal	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Peningkatan Kategori PKBM/SKB (Mandiri Berubah/Mandiri Berbagi)		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	81	20	41	81	Dinas Dikbud Kab/Kota	7.100.000.000,00		✓	✓		✓		Melaksanakan asesmen kebutuhan PKB dalam lingkungan SKB /PKBM, menetapkan anggaran dan melaksanakan pelatihan		Filantropi, eductech dan sektor swasta lain yang terkait dengan peningkatan kapasitas dapat menjadi penyedia pelatih

Meningkatkan tata kelola satuan pendidikan	Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi program satuan pendidikan	Pendidikan Nonformal	Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Tersedia HIBAH untuk Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	N/A	1	1	1	Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	49.335.000.000,00		✓				Melaksanakan asesmen kebutuhan biaya penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan, menetapkan prioritas dan menyalurkan hibah	Melaksanakan asesmen kebutuhan biaya penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan, menetapkan prioritas dan menyalurkan hibah	Melaksanakan asesmen kebutuhan biaya penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan, menetapkan prioritas dan menyalurkan hibah
--	--	----------------------	----------------------	--	--	--	--	---	---------	-----	---	---	---	----------------------------------	-------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN I RENCANA AKSI DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK

Tujuan	STRATEGI	Program (Kempendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Kegiatan (Kempendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan (Work Flow)	Lokus Program	Output	Satuan	Instansi Pelaksana (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Akumulasi Indikasi alokasi anggaran (Rp. Juta)	Sumber Pembiayaan	APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota	APBDes	Swasta	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Desa	Swasta
Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan HHBK daerah	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan penerbitan sertifikat benih	Sertifikasi benih	Provinsi	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi	4.000		✓					Bersama DUDI menyusun standar benih dan melaksanakan			
Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan HHBK daerah	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Perbaikan Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1. Penumbuhan dan pembentukan kelompok ternak oleh pemerintah desa; 2. pembinaan dan penilaian kelayakan usaha kelompok; 3. Intervensi sarana produksi untuk kelompok usaha tani/ ternak dalam kab/kota; 4. koordinasi kompetensi dan kinerja kelompok dengan kapasitas produksi untuk pemenuhan di tingkat provinsi; 5. Intervensi dukungan sarana produksi untuk pemenuhan hasil produksi lintas kabupaten/kota.	Provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Peternakan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	6.000		✓	✓				Koordinasi lintas Kabupaten / Kota; Program intensifikasi langsung kepada petani / peternak	Pembinaan Kelembagaan peternak di Kabupaten / Kota	Memfasilitasi penumbuhan kelembagaan peternak	Kemitraan dan Jaringan usaha
Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan HHBK daerah	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah		Pengendalian dan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1. Produksi ternak/ bibit ternak/ pakan/bahan pakan/ hijauan pakan ternak di kelompok; 2. pengendalian penyediaan dan pengawasan dalam kabupaten yang petugas/ aparat kab/kota; 3. pengendalian penyediaan dan pengawasan lintas kabupaten dan mengkoordinasikannya oleh petugas/ aparat provinsi.	Provinsi	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	Dinas Peternakan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	4.500	✓	✓	✓				Koordinasi dan tindakan pengendalian	Pengendalian di dalam Kabupaten / Kota	Pendataan sumber daya peternakan	Kepatuhan pada pengendalian
Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan HHBK daerah	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah provinsi lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/ Bibit ternak dari provinsi lain untuk perbaikan kualitas ternak	Provinsi	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	Dinas Peternakan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	7.500		✓	✓				Pengadaan ternak lintas provinsi	Identifikasi dan rekomendasi penerima manfaat	Pemenuhan persyaratan kelembagaan dan dukungan sumber daya lainnya	Penyedia
Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan HHBK daerah	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari daerah provinsi dan kabupaten/kota lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah provinsi dan kabupaten/kota lain	Pengadaan Benih/ Bibit ternak dari provinsi lain atau provinsi lain untuk perbaikan kualitas ternak	Provinsi	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah provinsi dan kabupaten/kota lain	Ekor	Dinas Peternakan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	75.000		✓	✓				Identifikasi, Penetapan dan pengadaan ternak	Pemenuhan persyaratan kelembagaan dan dukungan sumber daya lainnya	Penyedia	
Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan HHBK daerah	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	1. Penilaian kelayakan keamanan produksi dan distribusi produk hewan; 2. penerbitan sertifikat keamanan produk hewan	Provinsi	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	Dinas Peternakan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	3		✓	✓				Penerbitan sertifikasi keamanan produk hewan	Pembinaan sebelum dan sesudah sertifikasi	Pendataan pelaku usaha / produsen / distributor produk hewan	Kepatuhan
Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan HHBK daerah	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Pembinaan dan pendampingan untuk membentuk UMKM sampai beroperasi dan pemasarannya menurut lokasi sentra produksi pertanian	Provinsi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	UMKM	Dinas KUKM Provinsi	150		✓					Berkordinasi dengan Kabupaten / Kota untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan UMKM	Melaksanakan fasilitasi pembentukan UMKM dan pembinaan		
Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan HHBK daerah	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1. Sosialisasi dan edukasi 2. pelatihan dan membangun model demplot untuk media update teknis pertanian/ peternakan; 3. pendampingan, penyuluhan dan pembinaan pada demplot oleh aparat kab/kota	Provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (green economy, Teknologi Pupuk Organik, Pestisida Organik, Pakan Fermentasi dan pakan/bahan pakan lokal, Industri Bio Gas, Introduksi pertanian tanaman endemik/adaptik yang memiliki nilai tambah dan produksi yang tinggi (Apukat, tengkawang, kratom, kelapa dalam, kopi liberika)	Dokumen	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi	2500		✓					Koordinasi lintas kabupaten/kota	Pendampingan dan pembinaan	Memfasilitasi dan Mobilisasi Sumber Daya Desa	Mitra
Membangun dan mengaktifkan e-commerce UMKM dan Koperasi Daerah	Mendorong pemanfaatan platform digital Nasional dan dunia untuk pengembangan e-commerce UMKM dan Koperasi daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pendampingan UMKM untuk tergabung ke e-commerce untuk perluasan pasar.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha (Jumlah Unit Usaha Koperasi yang memanfaatkan platform digital nasional dan dunia untuk pengembangan e-commerce)	Unit Usaha	Dinas Koperasi Provinsi/ Kabupaten/ Kota			✓	✓				Menyusun standar kompetensi e-commerce bersama DUDI dan melaksanakan pelatihan kepada UMKM	Melaksanakan pendampingan UMKM dalam meningkatkan kompetensi e-commerce		

Membangun dan menguatkan e-commerce UMKM dan Koperasi Daerah	Mendorong pemanfaatan platform digital Nasional dan dunia untuk pengembangan e-commerce UMKM dan Koperasi daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pendampingan peningkatan skala usaha dari sisi teknologi produksi dan pemasaran	Provinsi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	Dinas KUKM Provinsi/Kabupaten/Kota	2300	✓	✓				Menyusun kebutuhan pasar bersama DUDI dan melaksanakan sosialisasi kepada UMKM	Menyelenggarakan penyuluhan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan pemasaran UMKM		
Membangun dan menguatkan e-commerce UMKM dan Koperasi Daerah	Mendorong pemanfaatan platform digital Nasional dan dunia untuk pengembangan e-commerce UMKM dan Koperasi daerah	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMERIKSAAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Menyelenggarakan pameran produk UMKM		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri				✓					Menyusun kerangka pelaksanaan pameran dan laporan pelaksanaan			
Meningkatkan kapasitas koperasi petani / peternak	Fasilitasi, Pembinaan dan Penguatan Koperasi Petani/Peternak sesuai kewenangan provinsi/ Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Pendampingan pengembangan usaha tani	Provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah koperasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi	200	✓				Berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan usaha tani	Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan usaha tani			
Meningkatkan kapasitas koperasi petani / peternak	Mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1. Koordinasi dan Pembinaan Penyuluhan kabupaten/kota oleh Provinsi; 2. Penyuluhan dan Pemberdayaan petani/peternak oleh penyuluh kabupaten/kota.	Provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan (pertanian dalam kawasan hutan)	Kelompok	Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Provinsi/Kabupaten/ Kota (Komoditas Pertanian hasil hutan : Kratom, Madu Hutan, Sarang Burung	1900	✓	✓			Koordinasi penyuluhan pertanian dan kelembagaan	Pelaksanaan penyuluhan kepada petani dan peternak	Memfasilitasi dan Mobilisasi Sumber Daya Desa	Pengguna	
Meningkatkan kapasitas koperasi petani / peternak	Mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pelatihan dan penguatan kelembagaan kelompok tani	Provinsi.	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan	Kelompok	Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/ Kota	500	✓	✓			Menyusun kerangka penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani	Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani			
Meningkatkan kapasitas koperasi petani / peternak	Mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengadaan hutan sosial	Provinsi.	Luas kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial. Dengan satuan Ha	Ha	Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/ Kota	500	✓	✓			Menyusun kerangka pengembangan hutan sosial	Berkoordinasi dengan Dinas Provinsi melaksanakan pengembangan hutan sosial			
Meningkatkan kapasitas koperasi petani / peternak	Penjaminan Usaha berbasis kemitraan industri dengan usaha kecil dan mikro	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	1. Pembinaan dan pendampingan koperasi petani eksisting oleh aparat/ petugas kabupaten/kota; 2. Koperasi petani dengan skala usaha lintas kabupaten/kota dialihkan pembinaan dan pendampingannya ke pemerintah provinsi	Provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Pendampingan Koperasi Koperasi Petani	Laporan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi		✓	✓			Pendampingan dan pembinaan koperasi petani lintas kabupaten / kota	Pendampingan dan pembinaan dalam kabupaten/kota	Memfasilitasi dan Mobilisasi Sumber Daya Desa	Pengguna, mitra	
Meningkatkan kapasitas koperasi petani / peternak	Penjaminan Usaha berbasis kemitraan industri dengan usaha kecil dan mikro	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Memfasilitasi UMKM memasarkan produk dalam negeri	Provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM	UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi		✓				Menghubungkan UMKM dengan pasar potensial dan DUDI				
Meningkatkan kapasitas koperasi petani / peternak	Penjaminan Usaha berbasis kemitraan industri dengan usaha kecil dan mikro	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Peningkatan kapasitas dan life skills masyarakat pesisir dan kepulauan	Kab/Kota Pesisir	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi		✓				Menyusun kerangka penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat				
Meningkatkan kapasitas koperasi petani / peternak	Mendorong dan memfasilitasi Akses KUR	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	1. Pemerintah kabupaten mendorong terbentuknya usaha tani/ ternak berbasis koperasi di dalam kabupaten/kota; 2. Pemerintah Provinsi mendorong pembentukan dan atau meningkatkan kapasitas Koperasi eksisting ke level lintas kabupaten/kota	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi		✓				Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi lintas kabupaten / kota	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi lintas kabupaten / kota	Memfasilitasi dan Mobilisasi Sumber Daya Desa	Pengguna, mitra	
Meningkatkan akses KUR	Mendorong dan memfasilitasi Akses KUR	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan desain dan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan skala usaha	Provinsi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi		✓				Menyusun kebutuhan pelatihan desain dan pemanfaatan teknologi, bekerjasama dengan DUDI dalam pelaksanaan pelatihan				
Meningkatkan akses KUR	Mendorong dan memfasilitasi Akses KUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Perluasan Akses Pasar, Akses Pemasaran, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Sertifikasi unit usaha dalam memanfaatkan platform digital	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha (Jumlah Unit Usaha Koperasi yang memantapkan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha yang memanfaatkan platform digital nasional dan dunia untuk pengembangan e-commerce)	Unit Usaha	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi		✓								

Meningkatkan akses dan pengukuran sertifikasi kompetensi	Memfasilitasi Sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan DUDI	Provinsi	Sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha	Orang Angkatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Sertifikasi sesuai rekomendasi kebutuhan sektoral (OPD terkait) sinergi dengan kebutuhan industri (disnakertrans))	1000	✓	✓				Bersama DUDI dan lembaga sertifikasi menyusun kerangka asesmen kompetensi	Bersama DUDI dan lembaga sertifikasi menyusun kerangka asesmen kompetensi		Bertindak selaku lembaga sertifikasi
	Memfasilitasi Sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan kerja menurut analisis kebutuhan dan sejalan dengan program yang dilaksanakan. (Contoh: Ada bantuan alat berat untuk pertanian, ada pelatihan pengoperasian alat berat. Ada bantuan alat industri pengolahan, ada pelatihan produksi pengolahan dengan alat tersebut.	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Serial pelatihan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan tenaga kerja di kab/kota berdasarkan kewenangan	Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Pelatihan sesuai rekomendasi kebutuhan sektoral (OPD terkait) sinergi dengan kebutuhan industri (disnakertrans).	1000	✓	✓				Menyusun kompetensi kebutuhan pelatihan sesuai kebutuhan DUDI	Menyusun kompetensi kebutuhan pelatihan sesuai kebutuhan DUDI		Salaku penyedia layanan pelatihan maupun sebagai pengguna (penyerap lulusan)
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Mengidentifikasi keragaman 98 produk (makanan dan non makanan) pada kab/kota	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kajian ketersediaan dan keragaman bahan makanan pokok dan non makanan di Kabupaten / Kota	Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Dokumen kajian dan identifikasi ketersediaan /keragaman 98 produk (makanan dan non makanan) pada kab/kota)	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kabur dan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota		✓	✓				Menyusun kerangka riset dan penentuan sampel di Kabupaten / Kota	Mendukung pelaksanaan riset dan mendapatkan hasil riset untuk kebijakan peraturan		
Meningkatkan relevansi penelitian dan pengembangan industri dan perdagangan	Menumbuhkan Pasar Induk Pusat Distribusi Provinsi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Provinsi	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen Kajian Peningkatan Pasar Induk Provinsi)	Dokumen	Balitbang Provinsi, Kajian 2024, updating dan percobaan di tahun 2025		✓					Menyusun kerangka riset dan penentuan sampel di pasar induk			
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Menumbuhkan Pasar Induk Pusat Distribusi Provinsi	PROGRAM PEMERAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Facilitasi pengembangan usaha ekonom di Desa	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Jumlah warung / toko kelontong / modern desa yang bermitra dengan Distributor di tingkat provinsi/ nasional)	Dokumen	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		✓					Menyusun kerangka kerjasama dengan pihak ketiga	Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga	Menjadi supplier atau kontraktor kerjasama	
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Menumbuhkan Pasar Induk Pusat Distribusi Provinsi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas asokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi / Kabupaten / Kota		✓	✓				Menyusun kajian kelayakan, penganggaran dan monitoring evaluasi	Berkordinasi dengan Provinsi untuk penetapan lokasi dan kerjasama distribusi		
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Menyediakan informasi sistem logistik provinsi/ Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Pengembangan sistem informasi logistik barang pokok dan barang penting	Provinsi dan 14 Kab/Kota	Informasi Logistik Barang Pokok dan barang penting Provinsi/Kabupaten/ Kota	Laporan	Dinas Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota		✓	✓				Menyusun blue print sistem informasi	Menyusun blue print sistem informasi	Kontraktor atau supplier pengembangan sistem informasi	
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Menyediakan informasi sistem logistik provinsi/ Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUHLATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Pengadaan prasarana pertanian seperti irigasi pertanian, jalan jalur distribusi dari kawasan produksi pertanian ke distributor/pasar	Provinsi dan 14 Kab/Kota	Panjang irigasi,	meter	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi / Kabupaten / Kota (2023 Tahap Persiapan; 2024 dan 2025 tahap persiapan dan pelaksanaan)		✓	✓				Studi kelayakan, penganggaran dan monitoring evaluasi	Berkordinasi dengan Provinsi untuk penetapan lokasi dan bentuk kerjasama dan dukungan lain		
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Menyediakan informasi sistem logistik provinsi/ Kabupaten/ Kota	PROGRAM PEMOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah	Provinsi	Informasi Logistik Pangan Asal Ikan Provinsi/Kabupaten/ Kota	Laporan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi		✓					Menyusun blue print sistem informasi			
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Menyediakan informasi sistem logistik provinsi/ Kabupaten/ Kota	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Monitoring dan evaluasi manajemen kebijakan ekonomi makro	Provinsi dan 14 Kab/Kota	Laporan Monitoring Pengendalian Inflasi	Laporan	Biro / Bagian Perekonomian /PID Provinsi /Kabupaten/ Kota		✓	✓				Menyusun kerangka laporan			
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Facilitasi Distribusi barang pokok dan barang penting dari pusat produksi ke pusat konsumen	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas asokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Jenis Pangan yang difasilitasi)	Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi		✓	✓				Menyusun kebijakan dan peraturan mendukung koordinasi dan sinkronisasi	Menyusun kebijakan dan peraturan mendukung koordinasi dan sinkronisasi		
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Program bantuan khusus petani miskin (integrasi antara banasos dan subsidi serta program ekonomi produktif). Contoh bantuan sarana pertanian seperti traktor, benih, pupuk, dll.	Provinsi	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Peningkatan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	Dinas Sosial Provinsi		✓					Menetapkan kriteria penerima bantuan, bersama Kabupaten / Kota mengidentifikasi calon penerima, Penyaluran dan monitoring evaluasi	Membantu identifikasi dan penyaluran bantuan		
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Mengembangkan dan Menguaskan Pasar domestik untuk komoditi/produk lokal (baru)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Facilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Menyelenggarakan pameran produk UMKM	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri	UMKM	Dinas Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota	600	✓	✓				Menyusun kerangka pelaksanaan pameran dan laporan pelaksanaan			

Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Mengembangkan dan Menguatkan Pasar domestik untuk komoditi/produk lokal (baru)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Pemasaran produk UMKM ke retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	Dinas Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota		10	✓	✓				Mengidentifikasi DUDI yang berpotensi memasarkan produk UMKM dan bekerjasama dalam mengembangkan QA fan QC	Mengidentifikasi DUDI yang berpotensi memasarkan produk UMKM dan bekerjasama dalam mengembangkan QA fan QC	Menjalin kerjasama dengan UMKM dengan memasarkan produk UMKM, menyusun standar QA dan QC	
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Fasilitas farmaday hari menjual produk dan komoditi hasil pertanian, peternakan, perikanan, industri, HHBK, dll yang merupakan produk lokal oleh para pelaku UMKM lokal	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas asokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Gelar pangan murah berkualitas	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya(Gelar Pangan Murah dan Berkualitas)	Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota		2,3	✓	✓				Menyusun kebutuhan / kesenjangan kebutuhan bahan pangan	Mendukung pelaksanaan gelar pasar murah		
Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	Fasilitas farmaday hari menjual produk dan komoditi hasil pertanian, peternakan, industri, HHBK, dll yang	PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA	Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitas kerjasama Pasar Desa dengan Pihak ketiga	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan (Hari Pasar Desa)	Lokasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/ Kabupaten		15,5	✓	✓	✓			Mengidentifikasi pihak ketiga dan memfasilitasi kerjasama	Mengidentifikasi pihak ketiga dan memfasilitasi kerjasama dengan pasar desa	Memfasilitasi kerjasama pasar desa dengan pihak ketiga	Menjadi suplier atau pelaksana

**LAMPIRAN II KERANGKA LOGIS DIMENSI UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT**

Jenjang	ID.I	Intervensi	ID.In	Indikator	Baseline	Target
Tujuan Jangka Panjang	1	Meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Barat	1.1	AHH		
			1.2	HLS		
			1.3	RLS		
			1.4	Pengeluaran Per Kapita		
Tujuan Jangka Menengah	1.1	Menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	1.1.1	AKI		
	1.2	Meningkatkan akses sumber air bersih dan sanitasi yang sehat	1.2.1	% Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan		
			1.2.2	% Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak		
	1.3	Meningkatkan dan memperluas cakupan JKN	1.2.2	% Rumah tangga memiliki akses asuransi kesehatan		0 5000 per tahun
	1.4	Meningkatkatkan dan memperluas akses vaksinasi	1.2.3	% Balita mendapatkan vaksinasi		
Tujuan Jangka Pendek	1.1.1	Meningkatkan kualitas data DTKS	1.1.1.1	% KK tervalidasi		
	1.1.2	Membangun kemitraan dengan Swasta dan DUDI	1.1.2.1	Meningkatnya jumlah swasta berpartisipasi		
	1.1.3	Meningkatkan kinerja Kabupaten / Kota melalui insentif	1.1.3.1	Meningkatnya jumlah Kabupaten / Kota berperan aktif		

1.1.4	Memperkuat agenda pelayanan kesehatan masyarakat	1.1.4.1	Tingkat pengetahuan dan perilaku hidup sehat		
1.1.5	Meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan alat reproduksi	1.1.5.1	Tingkat pengetahuan dan perilaku kesehatan alat reproduksi		
		1.1.5.2	Jumlah KKN tematik kesehatan alat reproduksi dan pencegahan perkawinan anak		
		1.1.5.3	Jumlah sosialisasi aplikasi kesehatan alat reproduksi		
		1.1.5.4	Jumlah pengguna aplikasi		
1.1.6	Meningkatkan ketersediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak sampai ke tingkat desa	1.1.6.1	Jumlah Ibu menerima buku kesehatan ibu dan anak		
1.2.1	Pendataan Sebaran Penggunaan Sumber Air Bersih	1.2.1.1	Laporan pendataan		
1.2.2	Meningkatkan peran serta swasta dan DUDI dalam akses sumber air bersih	1.2.2.1	Jumlah swasta dan DUDI berperan aktif		
1.3.1	Memperkuat cakupan pada JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui sumber APBD Kabupaten	1.3.1.1	Tersusunnya database yang valid dan akurat		

	1.3.2	Memperkuat implementasi PERGUB 28/2022 tentang kepersertaan JKN. Memperkuat sasaran program kepersertaan JKN	1.3.2.1	Pemangku kepentingan memahami Pergub 28/2022		
	1.4.1	Melibatkan tokoh agama/masyarakat (Kemenag) dalam promosi imunisasi campak di tingkat desa	1.4.1.1	Meningkatnya pengetahuan dan perilaku tokoh masyarakat		
	1.4.2	Pendekatan teknologi tentang promosi vaksinasi untuk kesehatan dan balita	1.4.2.1	Jumlah warga Kabupaten / Kota mengakses aplikasi peduli - vaksinasi anak		
Keluaran	1.1.1.1	Tersusunya pemutakhiran database DTKS yang akurat dan valid	1.1.1.1.1	Database DTKS		
			1.1.1.1.2	Buku manual pemutakhiran database DTKS		
			1.1.1.1.3	Laporan pemutakhiran database DTKS		
	1.1.2.1	Terbangunya kemitraan pembangunan jalan dan fasyankes dengan swasta dan DUDI	1.1.2.1.1	Panjang jalan yang dibangun		
			1.1.2.1.2	Jumlah fasyankes yang dibangun		
	1.1.3.1	Meningkatnya kinerja Kabupaten / Kota dalam layanan kesehatan	1.1.3.1.1	Kebijakan pemberian insentif kepada kabupaten / kota berbasis kinerja		
			1.1.3.1.2	Jumlah sosialisasi pemberian insentif dan jumlah peserta		
			1.1.3.1.3	Seleksi dan penetapan Kabupaten / Kota terpilih		

1.1.4.1	Menguatnya agenda pelayanan kesehatan masyarakat	1.1.4.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan produktif		
		1.1.4.1.2	Persentase Kabupaten/Kota menyelenggarakan deteksi dini penyakit menular		
		1.1.4.1.3	Persentase Kabupaten/Kota menyelenggarakan deteksi dini penyakit tidak menular		
		1.1.4.1.4	Persentase Kabupaten/Kota memiliki peraturan dan kebijakan GERMAS Sadar Lingkungan		
		1.1.4.1.5	Prevelansi wasting pada Balita		
		1.1.4.1.6	Laporan Monitoring dan evaluasi		
		1.1.4.1.7	Jumlah dan peserta sosialisasi		
1.1.5.1	Meningkatnya pengetahuan dan perilaku kesehatan alat reproduksi	1.1.5.1.1	Persentase Desa/Kelurahan ODF (pada lokasi KKN Tematik IPM)		
		1.1.5.1.2	Tersusunya kurikulum kesehatan alat reproduksi		
		1.1.5.1.3	Jumlah guru yang dilatih kurikulum kesehatan alat reproduksi		
		1.1.5.1.4	Jumlah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan usia produktif		

1.1.6.1	Meningkatnya ketersediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak sampai ke tingkat desa	1.1.6.1.1	Jumlah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan usia produktif		
		1.1.6.1.2	Jumlah buku kesehatan ibu dan anak yang dicetak		
		1.1.6.1.3	Tersusnya aplikasi mobile		
1.2.1.1	Database Sebaran Penggunaan Sumber Air Bersih	1.2.1.1.1	Persentase sarana air minum yang diawasi kualitasnya sesuai standar		
1.2.1.2	Meningkatnya peran serta swasta dan DUDI dalam akses sumber air bersih	1.2.1.2.1	Jumlah MoU		
		1.2.1.2.2	Jumlah DUDI / Swasta mendapatkan reward		
1.3.1.1	Meningkatnya cakupan pada JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui sumber APBD Kabupaten	1.3.1.1.1	Jumlah pelatihan pendataan dan peserta		
1.3.2.1	Sosialisasi PERGUB 28/2022 tentang kepersertaan JKN. Memperkuat sasaran program kepersertaan JKN	1.3.2.1.1	Jumlah sosialisasi dan jumlah orang yang menghadiri		
1.4.1.1	Melibatkan tokoh agama/masyarakat (Kemenag) dalam promosi imunisasi campak di tingkat desa	1.3.1.1.1	Jumlah tokoh terlibat		
1.4.2.1	Pendekatan teknologi tentang promosi vaksinasi untuk kesehatan dan balita	1.3.2.1.1	Jumlah kabupaten/kota mensosialisasikan aplikasi peduli		

**LAMPIRAN II KERANGKA LOGIS DIMENSI PENGETAHUAN**

Jenjang	ID.I	Intervensi	ID.In	Indikator	Baseline	Target
Tujuan Jangka Panjang	1	Meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Barat	1.1	AHH	DK	DK
			1.2	HLS	DK	DK
			1.3	RLS	DK	DK
			1.4	Pengeluaran Per Kapita	DK	DK
Tujuan Jangka Menengah	1.1	Meningkatkan Akses Pendidikan dasar, menengah & PT	1.1.1	APS	DK	DK
	1.2	Meningkatkan kualitas pendidikan dasar, menengah & PT	1.2.1	Skor Literasi AN	DK	DK
			1.2.2	Skor Numerasi AN	DK	DK
			1.2.3	Skor Karakter AN	DK	DK
	1.3	Meningkatkan tata kelola satuan pendidikan	1.1.1	Skor D2 - Kepemimpinan Instruksional	DK	DK
			1.3.2	Skor E2 - Penganggaran berbasis mutu	DK	DK
1.3.3			Akreditasi	DK	DK	
Tujuan Jangka Pendek	1.1.1	Mencegah peserta didik rentan putus sekolah / tidak melanjutkan	1.1.1.1	Angka Putus Sekolah	DK	DK
	1.1.2	Mencegah anak usia sekolah melaksanakan pernikahan	1.1.2.1	Jumlah kasus pernikahan anak	DK	DK
	1.2.1	Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	1.2.1.1	Nilai UKG	DK	DK
			1.2.1.2	Pengalaman pelatihan GTK	DK	DK
	1.2.2	Meningkatkan bakat dan minat peserta didik	1.2.2.1	Jumlah penghargaan bakat dan minat	DK	DK
	1.3.1	Meningkatkan kapasitas satuan pendidikan	1.3.1.1	Kemampuan satuan menyusun anggaran berbasis mutu	DK	DK
Keluaran	1.1.1.1	Bantuan Biaya tidak langsung jenjang pendidikan dasar	1.1.1.1.1	Jumlah siswa menerima bantuan biaya tidak langsung	DK	DK
	1.1.1.2	Bantuan pengadaan seragam, buku dan alat tulis	1.1.1.2.1	Jumlah siswa menerima bantuan pengadaan	DK	DK
	1.1.1.3	Beasiswa jenjang pendidikan menengah dan tinggi	1.1.1.3.1	Jumlah siswa menerima beasiswa	DK	DK

1.1.1.4	Rehabilitasi Asrama SMA / SMK	1.1.1.4.1	Jumlah asrama direhab	DK	DK
1.1.1.5	Pembangunan Unit Baru asrama SMA / SMK	1.1.1.5.1	Jumlah pembangunan asrama baru	DK	DK
1.1.1.6	Bantuan stimulasi BOP peserta didik kesetaraan	1.1.1.6.1	Jumlah penerima BOP stimulan	DK	DK
1.1.1.7	Bantuan sarpras untuk SKB / PKBM	1.1.1.7.1	Jumlah SKB / PKBM menerima bantuan sarpras	DK	DK
1.1.1.8	Pengadaan GTK untuk SKB / PKBM	1.1.1.8.1	Jumlah SKB / PKBM menerima GTK	DK	DK
1.1.1.9	Database ATS dan DTS terintegrasi	1.1.1.9.1	Tersedianya Database	DK	DK
				DK	DK
1.1.2.1	Koordinasi OPD terkait dan dengan Kabupaten / Kota	1.1.2.1.1	Jumlah koordinasi	DK	DK
1.1.2.2	Sosialisasi kesehatan alat reproduksi kepada satuan pendidikan	1.1.2.2.1	Jumlah sosialisasi	DK	DK
				DK	DK
1.2.1.1	Pelatihan guru dan tenaga kependidikan	1.2.1.1.1	Jumlah pelatihan dan jumlah pelatihan	DK	DK
1.2.2.1	Penyelenggaraan lomba akademik dan non akademik	1.2.2.1.1	Jumlah lomba	DK	DK
1.2.2.2	Penyelenggaraan sertifikasi bagi lulusan SKB / PKBM	1.2.2.2.1	Jumlah peserta sertifikasi dan % kelulusan	DK	DK
1.3.1.1	Peningkatan kategori SKB / PKBM	1.3.1.1.1	Proporsi kategori SKB / PKBM	DK	DK
1.3.1.2	Hibah penyelenggaraan PNF kepada PKBM / SKB	1.3.1.2.1	Satuan SKB / PKBM penerima hibah	DK	DK

**LAMPIRAN II KERANGKA LOGIS DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK**

Jenjang	ID.I	Intervensi	ID.In	Indikator	Baseline	Target
Tujuan Jangka Panjang	1	Meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Barat	1.1	AHH	DK	DK
			1.2	HLS	DK	DK
			1.3	RLS	DK	DK
			1.4	Pengeluaran Per Kapita	DK	DK
Tujuan Jangka Menengah	1.1	Membangun dan menguatkan e-commerce UMKM dan Koperasi Daerah	1.1.1	% UMKM mengakses e-commerce	DK	DK
	1.2	Meningkatkan akses KUR	1.2.1	% Korporasi / kelompok tani mengakses KUR	DK	DK
	1.3	Meningkatkan akses dan pengakuan sertifikasi kompetensi	1.3.1	% tenaga kerja tersertifikasi	DK	DK
	1.4	Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan HHBK daerah	1.4.1	Meningkatnya produksi per komoditi pertanian / peternakan	DK	DK
	1.5	Meningkatkan kapasitas koperasi petani / peternak	1.5.1	% koperasi bersertifikasi	DK	DK
	1.6	Meningkatkan relevansi penelitian dan pengembangan industri dan perdagangan	1.6.1	% serapan anggaran sektor ekonomi meningkat	DK	DK
	1.7	Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok	1.7.1	Laju inflasi < DK % per tahun	DK	DK
Tujuan Jangka Pendek	1.1.1	Mendorong pemanfaatan platform digital Nasional dan dunia untuk pengembangan e-commerce UMKM dan Koperasi daerah	1.1.1.1	% UMKM mengetahui manfaat e-commerce	DK	DK
	1.2.1	Mendorong dan memfasilitasi Akses KUR	1.2.1.1	Jumlah fasilitasi dan jumlah peserta	DK	DK
	1.3.1	Memfasilitasi Sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha	1.3.1.1	Meningkatnya jumlah lembaga sertifikasi	DK	DK
	1.4.1	Meningkatkan Jumlah dan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan HHBK daerah			DK	DK
	1.5.1	Fasilitasi, Pembinaan dan Penguatan Koperasi Petani/ Peternak sesuai kewenangan provinsi/ Kabupaten/ Kota	1.5.1.1	Meningkatnya kapasitas koperasi petani / peternak	DK	DK
	1.5.2	Mendorong dan memfasilitasi Akses KUR	1.5.2.1	Kelompok tani / ternak memahami alur akses KUR	DK	DK

	1.5.3	Mensinergikan program pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	1.5.3.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	DK	DK
	1.5.4	Penjaminan Usaha berbasis kemitraan industri dengan usaha kecil dan mikro	1.5.4.1	% Korporasi dapat mengakses KUR	DK	DK
	1.6.1	Menumbuhkan Pasar Induk/ Pusat Distribusi Provinsi	1.5.1.1	Meningkatnya volume transaksi	DK	DK
	1.7.1	Distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah	1.7.1.1	Meningkatnya daya beli	DK	DK
	1.7.2	Fasilitasi Distribusi barang pokok dan barang penting dari pusat produksi ke pusat konsumsi	1.7.2.1	Volume transaksi barang pokok meningkat	DK	DK
	1.7.3	Fasilitasi farmerday hari menjual produk dan komoditi hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri, HHBK, dll yang merupakan produk lokal oleh para pelaku UMKM lokal	1.7.3.1	Jumlah fasilitasi dan jumlah peserta	DK	DK
	1.7.4	Mengembangkan dan Memperkuat Pasar domestik untuk komoditi/produk lokal (baru)	1.7.4.1	Meningkatnya nilai transaksi pasar domestik	DK	DK
	1.7.5	Mengidentifikasi keragaman 98 produk (makanan dan non makanan) pada kab/kota	1.7.5.1	Laporan keragaman produk makanan dan non makanan	DK	DK
	1.7.6	Menumbuhkan Pasar Induk/ Pusat Distribusi Provinsi	1.7.6.1		DK	DK
	1.7.7	Menyediakan informasi sistem logistik provinsi/ Kabupaten/ Kota	1.7.7.1	Tingkat kemudahan akses informasi pelaku pasar	DK	DK
Keluaran	1.1.1.1	Pendampingan UMKM untuk bergabung ke e-commerce untuk perluasan pasar.	1.1.1.1.1	Jumlah UMKM didampingi	DK	DK
	1.1.1.2	Pendampingan peningkatan skala usaha dari sisi teknologi produksi dan pemasaran	1.1.1.2.1	Jumlah UMKM didampingi	DK	DK
	1.2.1.1	Sertifikasi unit usaha dalam memanfaatkan platform digital	1.2.1.1.1	Jumlah unit usaha tersertifikasi	DK	DK
	1.2.1.2	Pelatihan desain dan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan skala usaha	1.2.1.2.1	Jumlah unit usaha mengikuti pelatihan	DK	DK
	1.3.1.1	Sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan DUDI	1.3.1.1	Jumlah tenaga kerja tersertifikasi	DK	DK
	1.4.1.1	Sertifikasi benih	1.4.1.1.1	Jumlah sertifikat benih	DK	DK
	1.4.1.2	Pembentukan kelompok ternak	1.4.1.2.1	Jumlah kelompok tani terbentuk	DK	DK

1.4.1.3	Pelatihan anggota kelompok ternak	1.4.1.3.1	Jumlah pelatihan dan jumlah peserta	DK	DK
1.4.1.4	Produksi Ternak	1.4.1.4.1	Jumlah produksi ternak per satuan waktu	DK	DK
1.4.1.5	Pengendalian produksi ternak	1.4.1.5.1	Jumlah produksi ternak per satuan waktu	DK	DK
1.4.1.6	Pengadaan benih / bibit	1.4.1.6.1	Jumlah benih (ekor) dan bibit (satuan)	DK	DK
1.4.1.7	Penilaian kelayakan produk dan distribusi	1.4.1.7.1	Laporan	DK	DK
1.4.1.8	Sosialisasi dan edukasi demplot	1.4.1.8.1	Jumlah sosialisasi dan peserta	DK	DK
1.5.1.1	Pendampingan pengembangan usaha tani	1.5.1.1.1	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta	DK	DK
1.5.2.1	Penyuluhan dan pemberdayaan petani / peternak	1.5.1.2.1	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta	DK	DK
1.5.2.2	Pelatihan dan penguatan kelembagaan kelompok tani	1.5.1.2.1	Jumlah pelatihan dan jumlah peserta	DK	DK
1.5.2.3	Pengadaan hutan sosial	1.5.2.3.1	Luas dalam ha (hektare)	DK	DK
1.5.3.1	Memfasilitasi UMKM memasarkan produk dalam negeri	1.5.3.1.1	Jumlah UMKM didampingi	DK	DK
1.5.3.2	Peningkatan kapasitas dan life skills masyarakat pesisir dan kepulauan	1.5.3.2.1	Jumlah pelatihan dan jumlah peserta	DK	DK
1.5.3.3	Pembentukan korporasi petani / peternak	1.5.3.3.1	Jumlah korporasi terbentuk	DK	DK
1.5.4.1	Pelatihan dan penguatan korporasi petani / peternak	1.5.4.1.1	Jumlah pelatihan dan jumlah	DK	DK
1.6.1.1	Kajian pengembangan industri dan perdagangan di pasar induk provinsi	1.6.1.1.1	Laporan	DK	DK
1.7.1.1	Kajian ketersediaan dan keragaman bahan makanan pokok dan non makanan di Kabupaten / Kota	1.7.1.1.1	Laporan	DK	DK
1.7.2.1	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi di Desa	1.7.2.1.1	Jumlah fasilitasi dan jumlah peserta	DK	DK
1.7.2.2	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	1.7.2.2.1	Lembaga dan jaringan terbangun	DK	DK
1.7.3.1	Pengembangan sistem informasi logistik barang pokok dan barang penting	1.7.3.1.1	Sistem informasi terbantuan	DK	DK
1.7.3.2	Pengadaan prasarana pertanian seperti irigasi pertanian, jalan jalur distribusi dari kawasan produksi pertanian ke distributor/pasar	1.7.3.2.1	Panjang dalam KM	DK	DK

1.7.4.1	Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah	1.7.4.1.1	Sistem informasi terbantuan	DK	DK
1.7.5.1	Monitoring dan evaluasi manajemen kebijakan ekonomi makro	1.7.5.1.1	Laporan	DK	DK
1.7.6.1	Koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	1.7.6.1.1	Laporan	DK	DK
1.7.7.1	Program bantuan khusus petani miskin (integrasi antara bansos dan subsidi serta program ekonomi produktif). Contoh bantuan sarana pertanian seperti traktor, benih, pupuk, dll.	1.7.7.1.1	Jumlah penerima bantuan	DK	DK